

Indikator Kesejahteraan Rakyat

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2024



Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta

<https://yogyakarta.bps.go.id>

2024

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2024

ISSN : 2654-6655

No. Publikasi: 34550.21.07

Katalog: 4102004.34

Ukuran Buku : 17,6 cm X 25 cm

Jumlah Halaman : xiv + 116 halaman

Naskah :

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Gambar kulit

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Diterbitkan oleh:

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

Dicetak oleh :

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2024

TIM PENYUSUN

Pengarah : Herum Fajarwati

Penanggung Jawab : Kusriatmi

Editor : Zunadi

Naskah : Meitri Pafrida

Irwan Sutisna

Cahyawati Mandala Sari

Fitri Puji Astuti

Siti Maysaroh

Nurhidayati

Istato Hidayana

Fadlilah Nur Hidayah

Pengolah Data : Alwan Fauzani

Arif Widyadarma

Anisa Eka Puridewi

Kata Pengantar

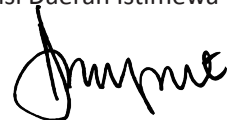
Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini yang menyajikan data mengenai capaian dan perkembangan indikator yang menggambarkan aspek kesejahteraan rakyat di wilayah DIY sampai kondisi tahun 2024. Selain itu, juga disajikan perbandingan capaian dan perkembangan indikator menurut wilayah. Data indikator yang disajikan diolah dari data primer hasil survei BPS, khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), hasil Sensus Penduduk dan SUPAS, serta data sekunder yang terkait dari sumber dinas/instansi lain di luar BPS.

Indikator statistik yang disajikan mencakup aspek kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan pemukiman, kemiskinan dan ketimpangan, serta indikator sosial lainnya. Isi dan kandungan publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan kesejahteraan yang telah dilaksanakan maupun bahan perencanaan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di masa mendatang. Semoga publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 ini mampu menjembatani dan memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan data statistik kesejahteraan rakyat.

Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah aktif berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyajian publikasi di masa mendatang.

Yogyakarta, November 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Ir. Herum Fajarwati

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Bab I Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Tujuan Penyusunan	4
Ruang Lingkup dan Cakupan	5
Sumber Data	5
Sistematika Penyajian	6
Bab II Penjelasan Teknis Indikator	7
Bab III Indikator Kependudukan	13
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	15
Sebaran dan Kepadatan Penduduk	17
Komposisi Penduduk Menurut Usia	19
Rasio Jenis Kelamin	19
Rasio Beban Ketergantungan	20
Status Perkawinan	21
Usia Perkawinan Pertama	22
Bab IV Indikator Kesehatan	25
Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup	28
Usia Perkawinan Pertama	29
Penolong Persalinan	30
Pemberian Air Susu Ibu	31
Imunisasi	33
Keluhan Kesehatan	34
Pengobatan dan Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan	35
Bab V Indikator Pendidikan	39
Angka Melek Huruf (AMH)	42
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	43
Angka Partisipasi Sekolah	45
Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Partisipasi Sekolah Murni (APM)	47
Rata-rata Lama Sekolah	48
Infrastruktur Pendidikan	49
Bab VI Indikator Angkatan Kerja	51
Komposisi Penduduk Usia Kerja	54
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	54
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	56
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama	58
Komposisi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi	59

Komposisi Penduduk Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu	59
Komposisi Pekerja Paruh Waktu dan Setengah Pengangguran	60
Tingkat Pengangguran Terbuka	61
Bab VII Indikator Konsumsi Penduduk	63
Pengeluaran Konsumsi Perkapita Penduduk	65
Komposisi Pengeluaran Penduduk	67
Pola Pengeluaran menurut Desil	68
Pola Konsumsi Makanan dan non Makanan	68
Konsumsi Energi dan Protein	70
Bab VIII Indikator Perumahan dan Pemukiman	73
Status Kepemilikan Rumah Tinggal	76
Kondisi Bangunan Tempat Tinggal	77
Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai	77
Jenis Dinding Bangunan Terluas	79
Jenis Atap Terluas	81
Rata-rata Jumlah Ruang Tidur	79
Fasilitas dan Sarana Pendukung Rumah	81
Sumber Penerangan	81
Sumber Air Minum Rumah Tangga	83
Tempat Pembuangan Air Besar	85
Bahan Bakar Utama untuk Memasak	86
Bab IX Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan	89
Pengukuran Kemiskinan Dan Perkembangan Garis Kemiskinan	91
Perkembangan Penduduk Miskin	93
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan	95
Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/ Kota	96
Perkembangan Distribusi Pendapatan	97
Bab X Indikator Sosial Lainnya	99
Pariwisata dan Perjalanan	101
Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi	103
Tindak Kejahatan	107
Kepemilikan Rekening Tabungan	109
Perkembangan Jumlah Jemaah Haji	109
Bab XI Penutup	111
Kesimpulan	113
Saran	113
Daftar Pustaka	115

Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2020-2025	17
Tabel 3.2.	Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2020-2024 (jiwa/km ²)	18
Tabel 3.3.	Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 1971-2020 (Persen)	21
Tabel 3.4.	Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2020-2024 (Persen)	21
Tabel 3.4.	Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2024 (Persen)	30
Tabel 4.1.	Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama, 2016-2024	30
Tabel 4.2.	Persentase Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY, 2018-2024.....	31
Tabel 4.3.	Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY, 2019-2024	32
Tabel 4.4.	Persentase Balita Usia 0-23 Bulan di DIY menurut Wilayah dan Lamanya Disusui, 2024	32
Tabel 4.5.	Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivitasnya Selama Sebulan yang Lalu, 2018-2023	34
Tabel 4.6.	Penduduk yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin di DIY, 2020-2023(%)	36
Tabel 4.7.	Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat, 2021-2024 (%)	37
Tabel 4.8.	Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Inap Setahun yang Lalu, 2020-2024 (Persen)	38
Tabel 4.9.	Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat Dirawat, 2020-2024 (%)	38
Tabel 5.1.	Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2017-2023 (Persen)	43
Tabel 5.2.	APS menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2022-2023 (Persen)	46
Tabel 5.3.	Perkembangan Rasio Murid-Kelas dan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2019/2020-2024/2025	50
Tabel 6.1.	Penduduk DIY Berusia 15 Tahun ke Atas menurut Aktivitas, 2020-2024 (000 jiwa)	54
Tabel 6.2.	Perkembangan TPAK DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2024 (Persen)	55
Tabel 6.3.	Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Status Pekerjaan Utama, 2020-2024 (%)	58

Tabel 6.4. Perkembangan TPT DIY menurut Jenis Kelamin dan Wilayah, 2010-2024 (Persen)	61
Tabel 7.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2022-2023	68
Tabel 7.2. Komposisi Konsumsi Perkapita menurut Komoditas di DIY, 2020-2024 (%)	69
Tabel 7.3. Konsumsi Energi dan Protein Perkapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2017-2024 (Persen)	70
Tabel 7.4. Konsumsi Energi Perkapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2022-2024	71
Tabel 7.5. Konsumsi Protein Perkapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2022-2024	72
Tabel 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2018-2024 (Persen)	76
Tabel 8.2. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2021-2024 (Persen)	80
Tabel 8.3. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2018-2024 (Persen)	81
Tabel 8.4. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2018-2024 (%)	83
Tabel 8.5. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Keberadaan Fasilitas Buang Air Besar, 2021-2024 (%)	85
Tabel 8.6. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Fasilitas Buang Air Besar, 2021-2024 (%)	85
Tabel 9.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2000-2024	90
Tabel 9.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY, 2010-2024	94
Tabel 9.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2023-2024	95
Tabel 10.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2022 (Persen)	96
Tabel 10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler/Nirkabel dan Menggunakan Telepon Seluler serta Komputer Selama Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2021-2024	104
Tabel 10.3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir di DIY, 2021-2024 (Persen)	105
Tabel 10.4. Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen), 2021-2024.....	106

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil Sensus Penduduk 1971-2020, SUPAS 2015, dan Proyeksi Penduduk 2021-2025	16
Gambar 3.2. Distribusi Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 1990, 2000 dan 2024 (Persen)	17
Gambar 3.3. Piramida Penduduk DIY tahun 2024 Hasil Proyeksi Penduduk SP2020..	19
Gambar 3.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia, 2023 (Persen).....	20
Gambar 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY, 2000-2020	28
Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY, 2016-2024	29
Gambar 4.3. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10+ Tahun Berstatus Pernah Kawin, 2020-2023	29
Gambar 4.4. Persentase Balita Usia 0-23 Bulan di DIY menurut Wilayah dan Lamanya Disusui (persen), 2024.....	29
Gambar 4.5. Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI, 2024.....	32
Gambar 4.6. Persentase Anak berusia 0-59 Bulan Menurut Status Kepemilikan KIA/ KMS di DIY (persen), 2024.....	33
Gambar 4.7. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Telah Imunisasi di DIY, 2024	33
Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DIY, 2022-2024	33
Gambar 4.9. Distribusi Penduduk DIY Menurut Jaminan Kesehatan Rawat Jalan Sebulan Terakhir, 2023 (Persen)	37
Gambar 4.10. Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Rawat Inap di DIY, 2024 (Persen)	38
Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jenis Kelamin dan Wilayah, 2024 (Persen)	44
Gambar 5.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2017-2023 (Persen)	45
Gambar 5.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang di DIY, 2017-2023 (Persen)	47
Gambar 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2017-2023 (Persen)	48
Gambar 5.5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk DIY, 2018-2024 (Tahun)	49
Gambar 6.1. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut 3 Sektor, 2010-2023 (Persen)	49
Gambar 6.2. Komposisi Penduduk Bekerja di DIY menurut Lapangan Usaha 17 Kategori, Februari 2023 (Persen)	54

Gambar 6.3. Distribusi Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi di DIY, 2022-2024	59
Gambar 6.4. Distribusi Penduduk Bekerja di DIY menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu, Agustus 2022-2024 (Persen)	59
Gambar 6.5. Perkembangan Proporsi Pekerja Tak Penuh di DIY, 2022-2024 (Persen)	60
Gambar 6.6. Proporsi Setengah Penganggur dan Pekerja Paruh Waktu di DIY, 2022-2024	60
Gambar 7.1. Perkembangan Pengeluaran Perkapita Penduduk DIY, 2014-2024 (000 Rp)	66
Gambar 7.2. Pengeluaran Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2014-2024 (000 Rp) ...	66
Gambar 7.3. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di DIY, 2023 (Juta Rp)	66
Gambar 7.4. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan menurut Wilayah di DIY, 20254 (Persen)	67
Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2024 (Persen)	76
Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2018-2024 (Persen)	77
Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2024 (Persen)	78
Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran di DIY, 2023 (Persen)	78
Gambar 8.5. Luas Lantai Rumah Tinggal menurut Wilayah di DIY, 2024 (m ²).....	79
Gambar 8.6. Luas Lantai Perkapita menurut Wilayah di DIY, 2024 (m ²)	79
Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding dan Desil, 2023(Persen)	80
Gambar 8.8. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah, 2024	80
Gambar 8.9. Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2023 (%)	82
Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2023 (%)	82
Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Standar Air Minum di DIY, 2023 (%)	84
Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya, 2024 (%)	84
Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak, 2024 (%)	86

Gambar 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2012-2024 (000 Rp/kapita/bulan)	92
Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2010-2023 (Persen)	97
Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2020-2023	98
Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2022 (Orang)	102
Gambar 10.2. Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Sejak 1 Januari-31 Desember 2022 (Persen)	103
Gambar10.3. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Media, 2022-2024	106
Gambar 10.4. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tempat Mengakses Internet, 2022-2023	107
Gambar 10.5. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tujuan Mengakses Internet, 2022-2023	107
Gambar 10.6. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2013-2023 (%)	108
Gambar 10.7. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY, 2022-2023(Persen).....	108
Gambar 10.8. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Rekening Bank atau Koperasi, Maret 2023 (Persen)	109
Gambar10.9. Jumlah Jamaah Haji Asal DIY menurut Jenis Kelamin, 2012-2024 (orang)	110
Gambar10.10. Sebaran Jamah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2022 (Persen)	110

SINGKATAN DAN AKRONIM

AKB	Angka Kematian Bayi
AHH	Angka Harapan Hidup
APK	Angka Partisipasi Kasar
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
AMH	Angka Melek Huruf
BPS	Badan Pusat Statistik
DIY	Daerah Istimewa Yogyakarta
KB	Keluarga Berencana
RLS	Rata-rata Lama Sekolah
MDGs	<i>Millenium Development Goals</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDKI	Survei Demografi Kesehatan Indonesia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SP	Sensus Penduduk
SUPAS	Survei Penduduk Antar Sensus
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TFR	<i>Total Fertility Rate</i> (Angka Fertilitas Total)
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka

Bab



<https://yogyakarta.bps.go.id>

Pendahuluan

Pendahuluan

Latar Belakang

Proses pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di level nasional maupun regional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan penduduk. Kesejahteraan yang dimaksud tidak semata-mata direpresentasikan oleh meningkatnya pendapatan perkapita yang diterima atau jumlah aset yang dimiliki penduduk. Namun, kesejahteraan yang dimaksud menyangkut aspek yang lebih luas berupa pemerataan pendapatan, kemudahan dalam mengakses kesempatan kerja, kemudahan dalam mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan, kebebasan individu untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat, dan lainnya.

Makna pembangunan senantiasa berkembang dan mengalami perluasan secara dinamis sesuai dengan dimensi dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya. Pandangan tradisional memaknai pembangunan sebagai proses peningkatan kapasitas perekonomian suatu wilayah atau negara. Kesejahteraan diidentikkan dengan meningkatnya aktivitas perekonomian. Alat yang sering digunakan untuk mengukurnya adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional atau regional bruto atau pertumbuhan pendapatan nasional/regional perkapita (*income percapita*). Sampai dengan era 1970-an, konsep pembangunan semata-mata dipandang sebagai sebuah fenomena ekonomi dan ukuran keberhasilan pembangunan hanya dilihat dari tinggi atau rendahnya level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya. Wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan perkapita dan pertumbuhan yang tinggi dianggap berhasil dalam mengelola proses pembangunan. Sebaliknya, jika level pendapatan perkapita dan pertumbuhannya rendah maka wilayah tersebut dikategorikan sebagai daerah yang kurang berkembang, belum sejahtera, atau bahkan terbelakang. Pada masa itu, pertumbuhan yang tinggi diyakini akan membawa manfaat bagi terciptanya kesempatan kerja di banyak sektor dan mampu mendorong kepada perbaikan kondisi sosial ekonomi ke arah yang lebih merata. Mekanisme ini dikenal luas dengan istilah “efek menetes ke bawah” atau *trickle down effect*.

Pandangan ekonomi baru memaknai pembangunan secara lebih komprehensif sebagai proses perbaikan yang sifatnya multidimensional dan berkesinambungan dari suatu sistem tatanan

Pembangunan sosial dan ekonomi yang dilaksanakan secara simultan di semua wilayah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat dan kualitas kehidupan penduduk.

sosial atau masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan tidak sekedar merepresentasikan aspek ekonomi dalam mengejar akselerasi pertumbuhan, namun juga menyangkut perubahan-perubahan yang mendasar pada struktur atau tatanan sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro dan Smith, 2006). Bank Dunia dalam salah satu publikasi yang dirilis menyatakan bahwa tantangan terbesar dalam pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan manusia, terutama di negara-negara miskin dan terbelakang. Perbaikan kualitas kehidupan memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi. Namun, masih ada syarat-syarat lainnya yang harus diperjuangkan yaitu kualitas pendidikan yang lebih baik, peningkatan nutrisi dan kesehatan, pemberantasan kemiskinan, perbaikan kualitas lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan kebebasan individu serta pelestarian aneka ragam budaya (Bank Dunia, 2001).

Seberapa besar dampak atau hasil dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat diukur menggunakan pendekatan beberapa indikator. Indikator menjadi sebuah petunjuk adanya kecenderungan yang sistematis berupa capaian hasil dari sebuah kebijakan yang telah dijalankan di suatu wilayah. Dalam konteks ini, indikator berfungsi sebagai alat evaluasi yang bisa bermakna positif maupun negatif. Indikator juga menjadi sinyal yang cukup efektif untuk menginformasikan keputusan-keputusan terkait dengan perencanaan pembangunan pada masa mendatang yang akan atau harus dilakukan di suatu wilayah. Terkait dengan tema “kesejahteraan rakyat”, maka

materi yang disajikan dalam publikasi ini merupakan informasi strategis yang fokus pada aspek yang mencirikan capaian hasil beserta perkembangan standar kehidupan/kesejahteraan penduduk khususnya di wilayah DIY.

Indikator merupakan suatu besaran nilai yang diturunkan dari parameter yang dapat memberikan informasi tentang karakteristik atau keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah. Sebagai alat ukur untuk mengetahui perubahan kondisi sosial maupun ekonomi antarwaktu dalam suatu wilayah maupun perbandingan antarwilayah pada suatu titik waktu, maka sebuah indikator harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, indikator harus relevan terhadap kebijakan yang ada. Kedua, indikator bersifat simpleks atau mudah dimengerti oleh pengguna. Artinya, meskipun penghitungannya rumit, hasilnya mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, indikator harus valid atau merefleksikan kenyataan yang ingin digambarkan dengan cara yang semestinya. Keempat, ketersediaan data untuk mengukur indikator harus tersedia secara kualitas maupun deret waktu dan menggambarkan perkembangan terkini. Kelima, indikator harus reliabel dan mudah diukur secara obyektif. Keenam, indikator harus sensitif dan mampu mengukur seberapa besar perubahan yang terjadi.

Tujuan Penyusunan

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 merupakan publikasi berkala yang diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh BPS Provinsi DIY. Penyusunan publikasi ini secara umum memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi dan gambaran umum mengenai capaian indikator yang berhubungan dengan aspek kesejahteraan rakyat di wilayah DIY sampai tahun 2023-2024.
2. Mengkaji perkembangan capaian kesejahteraan rakyat selama beberapa tahun terakhir.
3. Mengkaji perbandingan capaian indikator antara wilayah perkotaan dan perdesaan serta antara kabupaten/kota di wilayah DIY.

Manfaat yang diharapkan dari penerbitan publikasi ini adalah data dan informasi yang disajikan bisa berguna bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi atau ukuran kinerja pembangunan maupun sebagai bahan perencanaan pembangunan di wilayah DIY pada masa yang akan datang. Sementara bagi peneliti atau pengguna yang lain, penerbitan publikasi ini diharapkan mampu melengkapi kebutuhan data indikator bidang sosial dan ekonomi.

Ruang Lingkup dan Cakupan

Lingkup atau cakupan yang menjadi obyek analisis adalah wilayah administrasi DIY beserta semua kabupaten/kota yang berada di dalamnya. Selain itu, juga dianalisis perbandingan indikator menurut wilayah perkotaan atau urban dan wilayah perdesaan atau rural. Referensi waktu penyajian indikator adalah selama tahun 2024 dan beberapa tahun sebelumnya disesuaikan dengan ketersediaan data pembandingan maupun data pendukung.

Dimensi Kesejahteraan Rakyat disadari sangat luas dan kompleks. Artinya, taraf kesejahteraan rakyat tidak bisa terlihat dari aspek-aspek tertentu saja. Dalam pengertian yang lebih luas sangat tidak mungkin untuk menyajikan statistik atau indikator tertentu yang mampu mengukur

kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh karena itu, indikator yang disajikan hanya menyangkut segi-segi kesejahteraan yang dapat diukur (*measurable welfare*). Dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari beberapa aspek yang spesifik, seperti aspek kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan, serta aspek sosial yang lainnya.

Sumber Data

Sumber utama data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 diolah dari data primer hasil pengumpulan data dari berbagai survei dan sensus yang dilakukan oleh BPS. Beberapa diantaranya adalah Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lainnya. Jenis data primer ini cukup baik untuk membandingkan capaian hasil pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, jenis data ini mempunyai keterbatasan sebagai sumber informasi publikasi tahunan jika disajikan secara berkala. Salah satu kelemahannya adalah sering kali series datanya berfluktuasi. Upaya untuk menyediakan sumber data yang tetap bagi publikasi Inkesra telah dilakukan melalui perluasan cakupan pertanyaan pokok (data kor) Susenas yang diadakan setiap tahun. Dengan demikian publikasi Inkesra mempunyai sumber data yang pasti dan berkesinambungan sehingga selalu dapat menyajikan data yang relatif terkini (*up to date*). Selain menggunakan data primer, publikasi ini juga menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa instansi-instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kantor Wilayah Kemenag, dan sebagainya.

Sistematika Penyajian

Penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan manfaat penyusunan, ruang lingkup dan cakupan, serta sumber data.
- Bab II Penjelasan Teknis, berisi penjelasan mengenai konsep variabel dan indikator yang disajikan beserta proses penghitungannya.
- Bab III Kependudukan, berisi penjelasan mengenai perkembangan capaian indikator kependudukan seperti jumlah penduduk dan pertumbuhan, karakteristik kependudukan, kepadatan dan persebaran, angka beban ketergantungan, dan perkawinan.
- Bab IV Kesehatan dan gizi, menyajikan data perkembangan indikator bidang kesehatan seperti persalinan, ASI, imunisasi, angka kesakitan, fasilitas berobat, dan pemanfaatan jaminan kesehatan.
- Bab V Pendidikan, menyajikan data perkembangan indikator bidang pendidikan seperti fasilitas pendidikan, partisipasi sekolah, melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi.
- Bab VI Angkatan kerja, menyajikan data perkembangan indikator angkatan kerja seperti TPAK, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, dan karakteristik penduduk bekerja.
- Bab VII Pola konsumsi penduduk, menyajikan data perkembangan indikator pola konsumsi penduduk, konsumsi kalori dan protein.
- Bab VIII Perumahan dan pemukiman, menyajikan data perkembangan indikator bidang perumahan dan pemukiman seperti penggunaan listrik, air bersih, kondisi rumah, dan sanitasi.
- Bab IX Kemiskinan dan ketimpangan, menyajikan data perkembangan indikator kemiskinan dan ketimpangan.
- Bab X Sosial lainnya, menyajikan data perkembangan indikator sosial lainnya seperti perjalanan, pariwisata, teknologi informasi, kejahatan, dan ibadah haji.
- Bab XI Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



Bab



Penjelasan Teknis Indikator

Penjelasan Teknis Indikator

Penjelasan teknis mengenai konsep, definisi, dan penghitungan dari beberapa indikator yang disajikan dalam publikasi diringkas sebagai berikut:

Konsep penduduk yang digunakan oleh BPS dalam kegiatan statistik mencakup semua orang yang tinggal/mendiami suatu wilayah tertentu selama enam bulan atau lebih atau kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Penduduk menurut kelompok umur adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, dan biasanya dikelompokkan ke dalam kelompok interval 5 tahunan yang dimulai dari usia 0 tahun.

Kepadatan penduduk/km² adalah rata-rata jumlah penduduk yang mendiami setiap 1 km² luas wilayah.

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran rata-rata kecepatan pertambahan penduduk per tahun. Ada dua metode untuk menghitung pertumbuhan penduduk, yaitu geometris dan eksponensial. Pertumbuhan penduduk geometris atau secara bertahap dihitung dari formula sebagai: $P_t = P_0(1+r)^t$. Pertumbuhan penduduk eksponensial berlangsung terus menerus dan dihitung menggunakan formula: $P_t = P_0 e^{rt}$. P_0 adalah jumlah penduduk pada awal periode penghitungan, P_t adalah jumlah penduduk pada akhir periode penghitungan, r adalah rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun, t adalah jumlah tahun dari 0 ke t dan e adalah bilangan eksponensial (2,718282).

Angka beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam usia yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan usia tidak produktif (65 tahun ke atas) dengan penduduk berusia produktif (usia 15-64 tahun).

Umur perkawinan pertama menunjukkan umur seseorang pada saat melangsungkan upacara perkawinan yang pertama.

Rumah sakit adalah tempat (fasilitas) pemeriksaan dan perawatan kesehatan yang biasanya di bawah pengawasan dokter/tenaga medis dan dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

Bagian ini berisi penjelasan teknis mengenai konsep/definisi variabel dan indikator kesejahteraan rakyat beserta jenis data dan metode penghitungan.

Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

AMH (Angka Melek Huruf) dihitung dari besarnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas.

Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila ia dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu huruf.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid (tanpa melihat usia) yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang tersebut (dalam satuan persen).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah murid SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun/13-15 tahun/16-18 tahun (dalam persentase).

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan rasio atau perbandingan antara murid atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah pada jenjang SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang sekolah tersebut (dalam persentase).

Angka putus sekolah merupakan rasio atau perbandingan antara jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas yang putus sekolah di SD/SLTP/SLTA dengan jumlah penduduk usia 7 tahun/13 tahun/16 tahun ke atas (dalam satuan persen).

Masih bersekolah adalah status mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementerian Agama (Kemenag), instansi negeri lain maupun instansi swasta.

Rasio murid terhadap guru adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rasio murid per kelas adalah perbandingan antara jumlah murid yang berstatus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah kelas yang tersedia pada jenjang pendidikan yang bersesuaian.

Rata-rata lama sekolah adalah sebuah angka yang menunjukkan rata-rata lama bersekolah seseorang mulai dari masuk sekolah dasar sampai kelas/jenjang pendidikan terakhir yang diduduki. Rata-rata lama sekolah bisa dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 15 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas.

Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Bekerja adalah status mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan dan bekerja paling sedikit 1 (satu) jam berturut-turut dalam seminggu yang lalu.

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio atau perbandingan antara jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran dengan jumlah angkatan kerja (dalam satuan persen).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) dalam satuan persen.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, baik mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.

Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja (*manpower*) yang tidak bekerja ataupun bukan pengangguran, seperti sekolah, mengurus rumah tangga atau tua dan cacat.

Sekolah adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Tidak termasuk yang sedang libur (mulai tahun 2010 termasuk non formal).

Bagan Ketenagakerjaan:



Mengurus rumah tangga adalah penduduk 15 tahun ke atas yang selama seminggu yang lalu mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah/gaji.

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/ perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.

Pekerja penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja 35 jam atau lebih dalam seminggu.

Pekerja tak penuh adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Setengah pengangguran adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau mau menerima pekerjaan lain/tambahan.

Pekerja paruh waktu adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu dan tidak mau menerima pekerjaan lain.

Konsumsi Rumah Tangga adalah pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Kelompok

makanan mencakup pengeluaran konsumsi bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Sedangkan kelompok bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Indeks Gini adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Pengeluaran rata rata perkapita sebulan adalah rata rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.



<https://yogyakarta.bps.go.id>

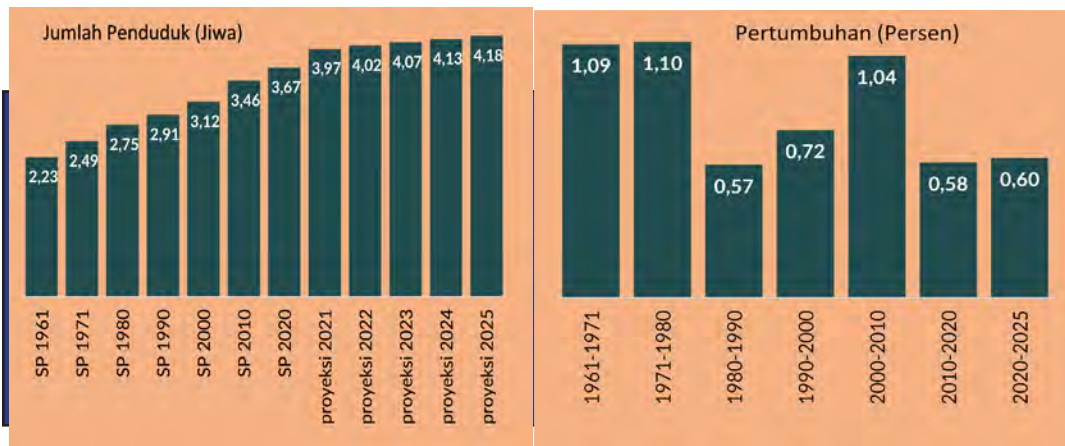
Indikator Kependudukan

Indikator Kependudukan

Penduduk memiliki peranan yang sangat strategis dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Penduduk merupakan subyek yang berperan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan. Penduduk juga menjadi obyek yang akan merasakan manfaat terbesar dari proses pembangunan yang dijalankan. Dinamika kependudukan senantiasa berkembang secara cepat. Jumlah penduduk yang besar yang diikuti oleh peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia akan menjadi potensi dan modal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar juga menjadi pasar potensial bagi berbagai barang dan jasa yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian. Sebaliknya, jumlah penduduk besar yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas dan kapasitas hanya akan menjadi beban dalam proses pembangunan. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan untuk menyediakan berbagai pelayanan yang paling mendasar.

Karakteristik kependudukan seperti jumlah dan pertumbuhan penduduk; kepadatan dan persebaran penduduk; komposisi penduduk menurut usia, jenis kelamin, pendidikan, status, dan lainnya menjadi indikator penting yang sangat bermanfaat dalam proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Keberhasilan pembangunan diukur dari seberapa besar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum. Dengan kata lain, hasil pembangunan harus bisa dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan juga ditentukan oleh penanganan permasalahan kependudukan, seperti kebijakan pembangunan kependudukan yang terarah dan terencana sebagai upaya pengendalian jumlah dan perkembangan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Harapannya adalah akan tercipta penduduk yang berkualitas dan tersebar secara merata di seluruh wilayah, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata.

“Jumlah penduduk DIY pada tahun 2024 mencapai 3.759,5 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,62 persen dari tahun sebelumnya (Proyeksi Penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020)”



Sumber: SP 1971-2020 dan proyeksi penduduk 2020-2035 hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk DIY (Juta Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen) Hasil Sensus Penduduk 1971-2020, dan Proyeksi Penduduk 2021-2025

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk yang tinggal di wilayah DIY berdasarkan hasil Sensus Penduduk semakin meningkat. Berdasarkan hasil SP2020, jumlah penduduk DIY mencapai 3,67 juta jiwa dan memberi kontribusi sebesar 1,36 persen terhadap total populasi nasional. Pada tahun 2023, penduduk D.I. Yogyakarta meningkat menjadi 4,07 juta jiwa, akan tetapi masih memiliki kontribusi sebesar 1,36 persen terhadap total penduduk nasional. Jumlah penduduk D.I. Yogyakarta diproyeksikan akan terus bertambah menjadi 4,18 juta jiwa pada tahun 2025.

Pertumbuhan penduduk antarsensus di D.I. Yogyakarta sangat berfluktuasi. Pertumbuhan penduduk selama periode 1961-1971 sangat tinggi mencapai 1,1 persen per tahun. Tingginya pertumbuhan didorong oleh tingkat fertilitas yang sangat tinggi pasca kemerdekaan. Kebijakan pengendalian jumlah penduduk melalui Program

Keluarga Berencana (KB) Nasional sejak era 1970-an terlihat cukup berhasil dalam menurunkan tingkat fertilitas. Di sisi yang lain, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur kesehatan secara bertahap mampu menurunkan jumlah kasus kematian penduduk. Imbasnya adalah laju pertumbuhan penduduk mulai melambat pada periode 1980-1990 dan 1990-2000 dimana pertumbuhan penduduk mampu terkoreksi menjadi 0,57 persen dan 0,72 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk DIY kembali meningkat selama periode 2000-2010. Penyebabnya adalah dorongan migrasi masuk ke DIY dengan tujuan untuk belajar maupun bekerja. Namun, pertumbuhan penduduk kembali melambat selama periode 2010-2020. Kegiatan pendataan yang bersamaan dengan masa pandemi sangat berpengaruh terhadap hasil pendataan, khususnya penduduk migran. Selama periode 2020-2025, pertumbuhan penduduk kembali naik dikarenakan setelah pandemi berakhir, banyak migran yang masuk kembali ke DIY.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk DIY (Jiwa) dan Pertumbuhan (Persen), 2020-2025

Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)			Pertumbuhan
	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	1 814,65	1 857,46	3 662,11	0,58
2021	1 826,80	1 860,97	3 687,77	0,70
2022	1 838,44	1 874,13	3 712,57	0,67
2023	1 849,54	1 886,95	3 736,49	0,64
2024	1 860,12	1 899,95	3 759,50	0,62
2025	1 870,14	1 911,41	3 781,55	0,59

Sumber: Proyeksi penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

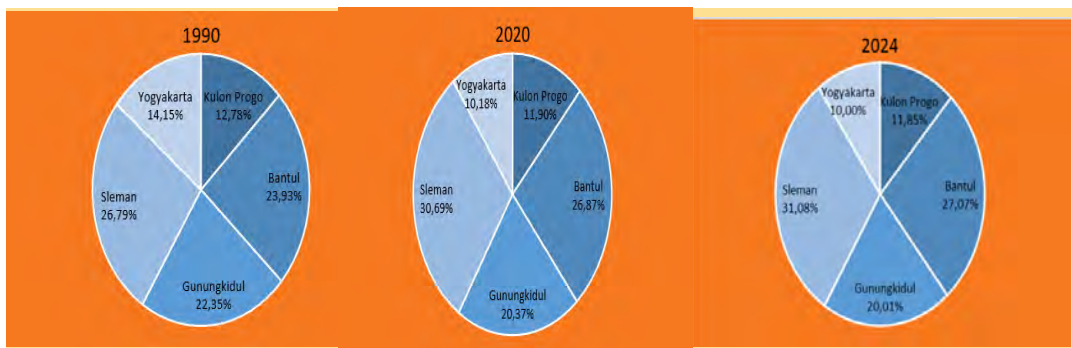
Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Tingkat persebaran dan kepadatan penduduk (*population density*) menjadi indikator yang mencerminkan tingkat pemerataan dan pemusatan penduduk dalam suatu wilayah. Isu persebaran dan kepadatan penduduk memiliki persinggungan yang cukup besar dengan faktor pendorong maupun dampak yang ditimbulkan. Tinggi atau rendahnya kepadatan penduduk dan merata atau tidaknya persebaran penduduk bisa membawa dampak positif maupun negatif.

Kepadatan yang sudah mencapai

titik jenuh, mungkin akan lebih banyak memberi dampak negatif dan menciptakan banyak persoalan terkait dengan ketimpangan alokasi sumber daya manusia. Permasalahan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan pertanian produktif, kerusakan lingkungan akan semakin meningkat jika tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti penyediaan sarana dan fasilitas sosial dan ekonomi serta penciptaan kesempatan bekerja yang berkelanjutan. Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian terkait dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar wilayah kabupaten/kota. Beberapa pemicu tingkat persebaran penduduk yang tidak merata adalah faktor geografis wilayah, perbedaan pola fertilitas dan mortalitas, faktor migrasi, ketersediaan infrastruktur, ketersediaan kesempatan kerja dan kemudahan mengakses tenaga kerja, dan kebijakan pembangunan antar wilayah yang tidak merata.

Pemerataan penduduk dapat dilakukan melalui kebijakan relokasi penduduk dalam bentuk migrasi untuk menciptakan kondisi ideal dan seimbang antara penduduk dan ketersediaan sumber daya. Selain itu,



Sumber: SP 1971, SP 1980, dan hasil proyeksi penduduk SP2020 DIY, BPS DIY

Gambar 3.2 Distribusi Penduduk DIY menurut Kabupaten/Kota Tahun 1990, 2020, dan 2024 (Persen)

kebijakan pembangunan berbasis pinggiran atau perdesaan harus lebih ditingkatkan untuk mengurangi laju migrasi penduduk ke wilayah perkotaan dan mengurangi konsentrasi penduduk di kawasan pusat-pusat perekonomian. Kondisi umum yang terjadi adalah bahwa konsentrasi dan kepadatan penduduk cenderung tinggi di daerah-daerah perkotaan.

Ketersediaan fasilitas kehidupan yang lebih lengkap dan beragam serta bervariasinya lapangan pekerjaan merupakan daya tarik tersendiri yang mendorong penduduk untuk melakukan perpindahan atau migrasi ke pusat-pusat ekonomi di daerah perkotaan.

Persebaran atau konsentrasi penduduk DIY sampai 2024 masih terpusat di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. Kedua kabupaten tersebut memiliki kontribusi jumlah penduduk terbesar dan cenderung meningkat. Secara proporsional, sekitar 31,08 persen penduduk DIY tinggal di wilayah Kabupaten Sleman dan 27,07 persen tinggal di Kabupaten Bantul. Sementara itu, penduduk yang tinggal di Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta proporsinya hanya sekitar 10-12 persen. Proporsi penduduk yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat semakin menurun yang dikarenakan oleh faktor migrasi keluar pada kelompok penduduk berusia kerja dan menurunnya tingkat fertilitas. Hal ini berdampak pada level pertumbuhan penduduk per tahun di ketiga wilayah yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Sleman dan Bantul. Pangsapopulasi di Kota Yogyakarta terlihat meningkat sampai periode 1990. Akan tetapi, populasi kembali menurun sampai periode 2024 akibat daya dukung wilayah Kota Yogyakarta yang semakin jenuh untuk menampung perkembangan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi

yang melingkupinya.

Tingkat kepadatan penduduk DIY pada tahun 2020 mencapai 1.155 jiwa per km². Perkembangan angka kepadatan penduduk DIY dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, sementara dari sisi luas wilayah administrasi tidak mengalami perluasan. Pada tahun 2024, kepadatan penduduk DIY diproyeksikan mencapai 1.286 jiwa per km². Artinya, setiap 1 km² wilayah DIY dihuni oleh 1.286 jiwa. Perkembangan tingkat kepadatan penduduk di semua kabupaten/kota menunjukkan peningkatan. Wilayah dengan kepadatan tertinggi sampai tahun 2024 tercatat di Kota Yogyakarta. Setiap 1 km² wilayah Kota Yogyakarta dihuni oleh 11.450 jiwa

Kepadatan penduduk tertinggi berikutnya secara berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (2.037 jiwa per km²) dan Bantul (1.989 jiwa per km²). Kedua kabupaten tercatat memiliki kenaikan kepadatan penduduk tertinggi dalam beberapa dekade terakhir. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk yang relatif

Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2020-2024 (jiwa/km²)

Kabupaten/ Kota	Kepadatan Penduduk/Km ²				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	755	759	763	768	771
Bantul	1 920	1 938	1 956	1 973	1 989
Gunungkidul	506	507	508	509	510
Sleman	1 956	1 977	1 997	2 017	2 037
Yogyakarta	11 423	11 435	11 442	11 448	11 450
DIY	1 155	1 163	1 171	1 178	1 186

Sumber: Proyeksi penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

lebih tinggi, terutama di wilayah kecamatan yang menjadi penyangga perkembangan kawasan *urban* Kota Yogyakarta. Sementara, Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 510 jiwa per km². Rendahnya kepadatan ini disebabkan oleh wilayah administrasi Gunungkidul yang paling luas yakni mencakup 46,53 persen wilayah DIY. Di samping itu, karakteristik wilayah yang berupa pegunungan dan ketersediaan infrastruktur ekonomi dan hiburan juga kurang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Komposisi Penduduk Menurut Usia

Komposisi penduduk DIY menurut kelompok usia mengalami pergeseran yang cukup nyata. Komposisi penduduk hasil SP 1971 didominasi oleh kelompok penduduk muda atau kurang dari 20 tahun. Penyebabnya adalah tingginya tingkat

kelahiran selama era 1970-an dan kualitas layanan kesehatan yang belum begitu baik yang berpengaruh pada usia harapan hidup yang masih rendah. Penyebab lainnya adalah rendahnya proporsi penduduk tua akibat dampak perang dan konflik sosial politik selama masa sebelum dan setelah kemerdekaan RI.

Seiring dengan perkembangan waktu dan perbaikan kualitas hidup penduduk, komposisi penduduk semakin bergerak ke atas. Hasil Proyeksi penduduk SP2020 menggambarkan komposisi penduduk DIY didominasi oleh kelompok penduduk berusia 20-49 tahun. Artinya, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja muda atau produktif secara signifikan. Seandainya momentum ini bisa dimanfaatkan secara optimal yang didukung oleh peningkatan kualitas modal manusia maka bonus demografi ini akan mampu mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi selama beberapa dekade ke depan.

Komposisi penduduk penduduk berusia tua (60+ tahun) secara proporsional juga semakin meningkat akibat kualitas kehidupan yang semakin membaik, sehingga usia harapan hidup juga terus meningkat. Bahkan, berdasarkan hasil proyeksi penduduk komposisi penduduk tua akan meningkat sangat nyata pada akhir periode 2030. Hal ini membutuhkan pemikiran terkait dengan penyediaan fasilitas dan layanan untuk menunjang aktivitas dan kehidupan para lansia di masa mendatang.

Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk DIY menurut jenis kelamin berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 didominasi oleh penduduk perempuan. Nilai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 98,02 persen. Demikian pula

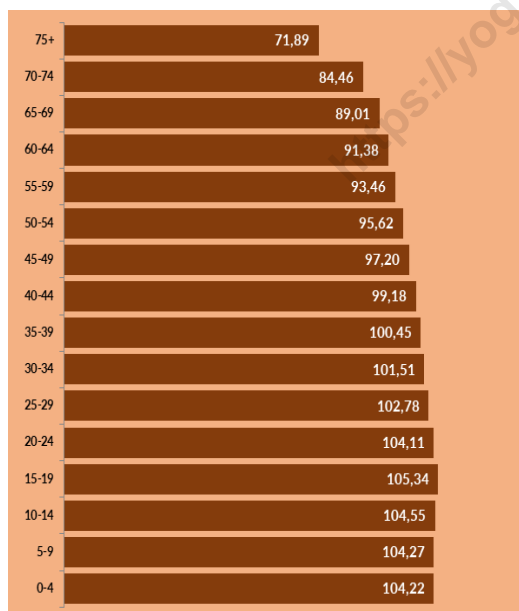


Sumber: Proyeksi penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

Gambar 3.3 Piramida Penduduk DIY tahun 2024 hasil proyeksi penduduk SP2020

dengan hasil proyeksi penduduk SP2020 juga menunjukkan populasi penduduk perempuan pada tahun 2024 lebih banyak dengan nilai rasio sebesar 97,93 persen. Angka ini menggambarkan terdapat 97 atau 98 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

Nilai rasio jenis kelamin menurut kelompok usia 0 (nol) sampai 39 tahun berada di atas 100. Artinya, populasi penduduk laki-laki lebih dominan dari perempuan pada kelompok usia di bawah 40 tahun. Pada usia 40 tahun ke atas, penduduk perempuan lebih banyak, hal ini lebih dikarenakan lebih banyaknya laki-laki yang migrasi ke luar DIY untuk bekerja. Bahkan, pada kelompok usia 65 tahun ke atas, nilai rasio jenis kelamin tercatat berada di bawah 90 dan mencapai level terendah sebesar 71,89 pada kelompok usia 75 tahun ke atas.



Sumber: Proyeksi penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

Gambar 3.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk DIY menurut Kelompok Usia, tahun 2023 (Persen)

Secara umum, nilai rasio jenis kelamin kurang dari 100 dipengaruhi oleh angka harapan hidup perempuan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Hal ini terkait dengan jenis aktivitas baik pekerjaan maupun kegiatan lain sehari-hari yang dilakukan penduduk laki-laki yang cenderung memiliki risiko kecelakaan atau kematian yang lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi cenderung diisi oleh pekerja laki-laki. Tingkat mobilitas dan lama jam kerja penduduk laki-laki pada umumnya juga lebih tinggi dari perempuan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas daya tahan tubuh, kesehatan tubuh, kerentanan terhadap berbagai macam penyakit, dan ujungnya adalah usia harapan hidup.

Rasio Beban Ketergantungan

Indikator kependudukan yang cukup penting adalah rasio beban ketergantungan. Indikator ini diukur dari proporsi penduduk yang tidak produktif secara ekonomi yaitu penduduk berumur muda (<15 tahun) dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk yang produktif secara ekonomi (15-64 tahun). Pada umumnya, penduduk berusia di bawah 15 tahun secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Sementara, penduduk berusia di atas 65 tahun juga sudah pensiun dan dianggap tidak produktif lagi secara ekonomi.

Dengan indikator rasio beban ketergantungan dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Semakin tinggi rasio beban ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi. Sebaliknya, semakin

rendah rasio ini menggambarkan semakin rendah pula beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) di DIY selama periode 2000-2024, cukup stabil pada kisaran 45-46 persen. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata setiap 100 penduduk berusia produktif memiliki beban untuk menanggung sekitar 45-46 penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Secara berkala, rasio beban ketergantungan di DIY berdasarkan hasil sensus cenderung menurun dari 82 persen di tahun 1971 menjadi 69 persen (SP 1980) kemudian 46 persen (SP 2010) dan 45 persen pada SP2020. Perubahan ini terjadi seiring dengan pergeseran komposisi penduduk menurut kelompok usia antarsensus. Komposisi penduduk produktif semakin meningkat dan penduduk belum produktif semakin menurun, meskipun penduduk tua semakin meningkat.

Tabel 3.3 Komposisi Penduduk menurut Usia dan Rasio Beban Tanggungan di DIY, 1971-2020 (Persen)

Tahun	Umur			Jumlah	Rasio Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1971	40,90	54,82	4,28	100	82
1980	35,07	59,15	5,78	100	69
1990	28,28	64,47	7,25	100	55
2000	22,38	69,09	8,53	100	45
2010	20,41	68,78	10,81	100	46
2020	20,23	68,72	11,05	100	45
2021	20,05	68,64	11,31	100	46
2022	19,86	68,55	11,59	100	46
2023	19,68	68,44	11,88	100	46
2024	19,49	68,32	12,19	100	46

Sumber: Proyeksi penduduk 2020-2035 Hasil Sensus Penduduk 2020, BPS DIY

Secara ekonomi, besarnya komposisi penduduk yang berusia produktif menjadi peluang dari bonus demografi yang bisa dioptimalkan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan. Tentu saja hal ini akan terjadi dengan syarat bahwa setiap penduduk usia produktif betul-betul produktif secara ekonomi, yakni memiliki keterampilan yang menunjang aktivitas dalam pasar tenaga kerja. Jika tidak, tentu akan lebih berat lagi karena beban tanggungan usia produktif menjadi bertambah karena harus menanggung usia produktif lainnya. Bahkan, usia produktif yang secara nyata tidak dapat diberdayakan secara ekonomi (pengangguran) akan menimbulkan masalah yang cukup serius dalam kehidupan sosial terutama tingkat kriminalitas dan kerawanan sosial lainnya.

Status Perkawinan

Status perkawinan secara demografi sering menjadi variabel antara dalam analisis fertilitas, khususnya status perkawinan penduduk perempuan. Status kawin menggambarkan kestabilan status penduduk dalam membentuk dan membina rumah tangga. Untuk melihat stabil atau tidaknya ketahanan rumah tangga, dapat dicermati dari komposisi penduduk yang berstatus cerai hidup. Makin tinggi proporsinya, maka kualitas ketahanan rumah tangga relatif makin rendah atau buruk.

Komposisi penduduk DIY yang berusia 10 tahun ke atas berdasarkan status perkawinan sampai tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin. Proporsinya mencapai 58,78 persen. Sementara, yang berstatus belum kawin sebanyak 31,12 persen, cerai hidup 2,06 persen, dan cerai mati 8,04 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk

perempuan yang berstatus cerai hidup atau cerai mati tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini terlihat dari perkembangan data selama lima tahun terakhir (2019-2023). Secara umum, perbandingan tersebut mencerminkan bahwa penduduk perempuan lebih dapat bertahan untuk tidak kawin/menikah lagi setelah ditinggal mati oleh pasangannya (janda cerai mati) atau setelah cerai hidup. Penduduk laki-laki ketika ditinggal mati oleh pasangannya memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk menikah atau mencari pasangan lagi dibandingkan perempuan. Demikian pula ketika bercerai hidup dengan pasangannya, laki-laki juga memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menikah lagi dibanding perempuan. Fenomena ini secara kasat mata juga ditunjukkan oleh persentase laki-laki dengan status kawin yang tercatat lebih

tinggi dibanding perempuan selama tujuh tahun terakhir. Lebih tingginya proporsi perempuan yang berstatus cerai mati atau cerai hidup dibandingkan dengan laki-laki juga bisa dipengaruhi oleh usia harapan hidup penduduk perempuan yang lebih panjang dari penduduk laki-laki.

Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama terutama bagi wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas dan perkembangan jumlah penduduk. Semakin muda usia perkawinan akan semakin panjang masa reproduksi, sehingga peluang fertilitasnya semakin besar. Di sisi yang lain, usia perkawinan yang terlalu dini juga memiliki pengaruh terhadap tingkat risiko ketika masa kehamilan dan persalinan. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan usia menikah untuk perempuan minimal 16 tahun. Sementara, menurut Undang Undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah berumur 18 tahun. Berdasarkan ketentuan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang yang ideal adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan estimasi menggunakan data Susenas, rata-rata usia perkawinan pertama baik laki-laki maupun perempuan di wilayah DIY tercatat semakin meningkat. Pada posisi Maret 2024 rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki mencapai 25,90 tahun dan hampir sama dari periode sebelumnya yakni 25,87 tahun. Sementara, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan sebesar 22,07 tahun.

Tabel 3.4 Komposisi Penduduk Berusia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan di DIY, 2020-2024 (Persen)

Tahun	Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Jumlah
		Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020	L	26,09	59,47	2,62	11,82	100
	P	30,64	59,93	1,96	7,47	100
	L+P	35,25	60,31	1,50	2,94	100
2021	L	35,25	60,31	1,50	2,94	100
	P	26,30	59,47	2,62	11,82	100
	L+P	30,64	59,93	1,96	7,47	100
2022	L	35,02	60,32	1,32	3,43	100
	P	25,93	59,74	2,38	11,95	100
	L+P	30,42	60,02	1,81	7,74	100
2023	L	35,09	60,52	1,19	3,20	100
	P	26,29	59,39	2,72	11,60	100
	L+P	30,63	59,95	1,96	7,46	100
2024	L	35,61	59,19	1,45	3,75	100
	P	26,74	58,39	2,66	12,21	100
	L+P	31,12	58,78	2,06	8,04	100

Sumber: Susenas Maret 2020-2024, BPS DIY

Jika dikaji berdasarkan distribusinya, maka mayoritas wanita berusia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas. Proporsi pada tahun 2024 mencapai 59,34 persen. Angka ini menggambarkan kesadaran wanita untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yang semakin meningkat. Komposisi terbesar berikutnya menikah pada usia 19-20 tahun ke atas dengan proporsi sebesar 24,96 persen. Sementara, proporsi wanita yang pernah kawin dengan usia 18 tahun ke bawah juga

kasus yang terjadi pada masa sekarang, terutama pada kelompok remaja yang salah dalam pergaulan dan terpaksa melakukan pernikahan pada usia yang sangat dini.

Secara psikologis, seorang wanita yang berusia kurang dari 18 tahun belum siap untuk membina sebuah rumah tangga. Seharusnya mereka masih bersekolah di jenjang pendidikan menengah. Upaya untuk meningkatkan usia perkawinan dapat ditempuh dengan memberi kesempatan pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, serta memperluas kesempatan memperoleh akses bekerja.

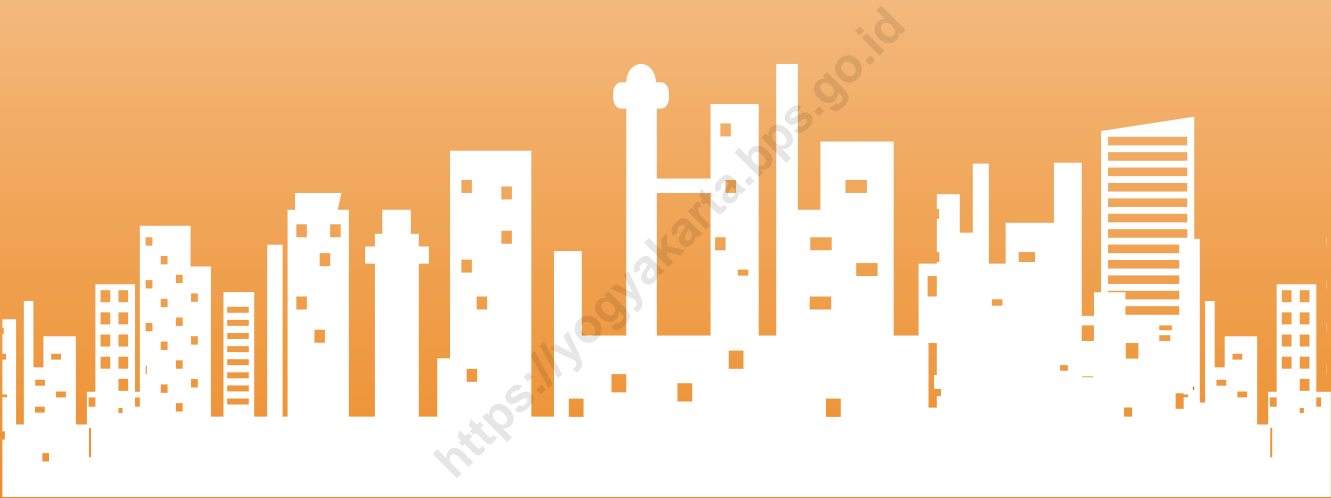
Tabel 3.5 Persentase Perempuan pernah kawin berumur 10 tahun ke atas menurut Kabupaten/Kota, dan umur perkawinan pertama, 2024

Tahun	Usia Perkawinan Pertama				Jumlah
	<= 16	17-18	19-20	21+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kulon Progo	5,22	13,84	20,82	60,12	100
Bantul	5,82	10,70	22,28	61,21	100
Gunungkidul	14,40	22,41	26,26	36,93	100
Sleman	3,01	6,75	19,95	70,29	100
Yogyakarta	3,52	7,47	17,27	71,74	100
DIY	6,62	12,23	21,81	59,34	100

Sumber: Susenas Maret 2024, BPS DIY

masih cukup besar yakni 18,85 persen. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 6,62 persen yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah. Apabila dilihat berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Gunungkidul memiliki proporsi perempuan pernah kawin berumur 10 tahun ke atas yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah mencapai 14,40 persen. Proporsi ini masih cukup besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius terutama pada mereka yang berusia muda. Sebagian besar kasus perkawinan dengan usia di bawah 16 tahun terjadi pada masa lampau. Namun, tidak sedikit

Bab **IV**



Indikator
Kesehatan

Indikator Kesehatan

Investasi di bidang kesehatan memiliki andil strategis dalam meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong peningkatan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi.

Investasi sektor kesehatan mempunyai *multiplier effect* yang cukup tinggi terhadap output pembangunan di sektor lainnya. Pada tingkat mikro, kualitas kesehatan penduduk atau lebih spesifik angkatan kerja adalah penentu produktivitas dalam aktivitas produksi barang dan jasa. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih produktif dibandingkan dengan tenaga kerja yang kurang sehat. Konsekuensinya pekerja yang sehat akan mendapatkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Pada tingkat makro, kualitas kesehatan penduduk yang baik menjadi masukan atau input penting untuk menurunkan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Karenanya, kualitas kesehatan menjadi salah satu aspek yang mencirikan kesejahteraan penduduk dan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan manusia.

Komitmen global untuk meningkatkan status kesehatan penduduk secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*-MDGs) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs). Tujuan ketiga dari SDG's adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera, yakni memastikan hidup yang sehat dan mendukung kesejahteraan semua usia. Beberapa butir target atau sasaran yang ingin dicapai adalah mengurangi rasio kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita, mengakhiri epidemi AIDS, tuberculosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air dan penyakit menular lainnya, melakukan pencegahan dan pengobatan dari zat berbahaya (narkotika dan alkohol), meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, dan lainnya.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah pada level pusat sampai level regional sudah menggalakkan berbagai program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum. Sasaran utama yang ingin dicapai memiliki irisan yang kuat dengan tujuan SDG'S seperti meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta menurunkan prevalensi gizi kurang. Beberapa upaya yang telah dilakukan di antaranya meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, yaitu dengan memberikan

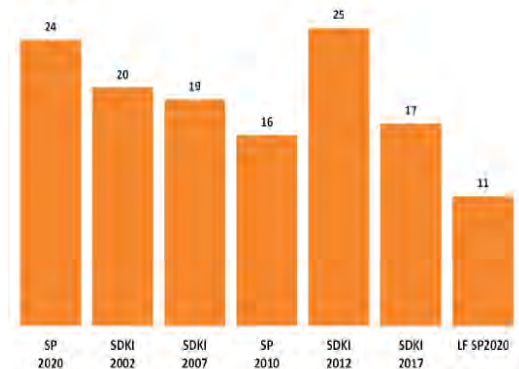
pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; penyediaan sumber daya kesehatan yang kompeten; peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, posyandu, dan rumah sakit; penyediaan obat yang terjangkau oleh masyarakat, serta pendistribusian tenaga kesehatan secara merata.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator *outcome* seperti Angka Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi. Indikator kesehatan dan fertilitas yang lain berupa angka kesakitan, prevalensi balita kurang gizi, serta indikator yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Angka Kematian Bayi dan Harapan Hidup

Aspek kesejahteraan penduduk DIY dilihat dari dimensi kesehatan secara umum semakin meningkat atau membaik. Hal ini terlihat dari perkembangan dua indikator *outcome* yang menggambarkan derajat kesehatan penduduk secara umum, yakni angka kematian bayi dan angka harapan hidup pada saat lahir. Angka kematian bayi tercatat semakin menurun dan sebaliknya angka harapan hidup penduduk pada saat lahir tercatat semakin meningkat.

Berdasarkan data hasil pendataan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dan hasil Sensus Penduduk dalam dua dekade terakhir, Angka Kematian Bayi di DIY menunjukkan perkembangan yang semakin menurun secara berfluktuasi. Angka kematian bayi pada tahun 2000

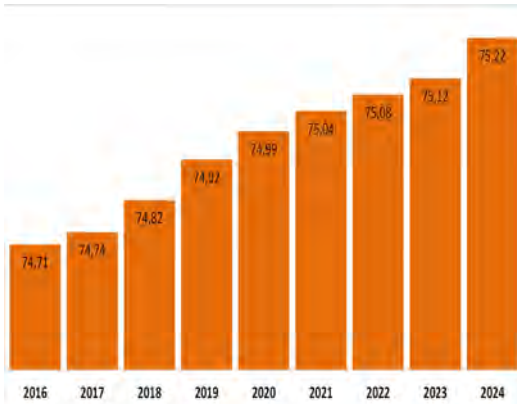


Gambar 4.1. Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY (per 1.000 kelahiran hidup), 2000-2020

Sumber : BPS DIY, Beberapa Terbitan

tercatat sebesar 24, artinya terjadi 24 kasus kematian bayi untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Angka menurun secara bertahap menjadi 20 (hasil SDKI 2002) dan 19 (hasil SDKI 2007) dan 16 (hasil SP 2010). Hasil SDKI 2012 menunjukkan jumlah kasus kematian bayi meningkat menjadi 25 kasus per 1.000 kelahiran hidup, meskipun kembali menurun menjadi 17 kasus berdasarkan hasil SDKI 2017 dan 11 kasus per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan data *Long Form* SP2020. Pada taraf nasional, angka kematian bayi di DIY termasuk dalam kategori rendah.

Secara umum, kasus kematian bayi sebagian besar terjadi pada masa persalinan sampai bulan pertama setelah kelahiran bayi (kematian *neonatal*). Hasil LF SP2020 mencatat angka kematian neonatal mencapai 11 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini membawa implikasi terkait pentingnya penanganan proses persalinan oleh tenaga penolong terdidik (tenaga medis) dan mempermudah akses menuju fasilitas persalinan. Di samping itu, perlu upaya meningkatkan pengetahuan ibu tentang tata cara perawatan bayi pasca kelahiran maupun selama dalam masa kehamilan.



Gambar 4.2. Perkembangan Angka Harapan Hidup pada Saat Lahir di DIY (tahun), 2016-2024

Sumber : IPM DIY, 2016-2024

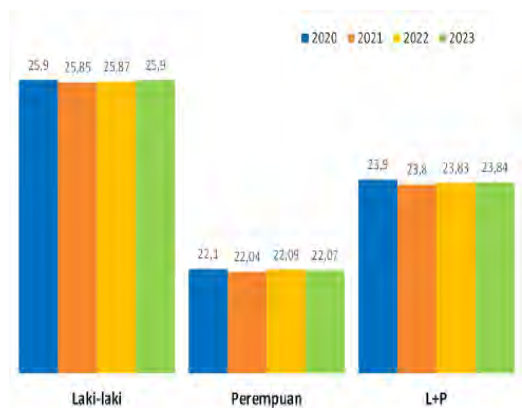
Meningkatnya derajat kesehatan juga ditandai oleh bertambahnya usia harapan hidup penduduk pada saat lahir (e_0). Angka harapan hidup penduduk DIY pada saat lahir menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2016, angka harapan hidup tercatat sebesar 74,71. Angka 74,71 tahun ini menggambarkan perkiraan rata-rata usia yang akan dijalani oleh seorang bayi yang dilahirkan hidup pada tahun 2016 hingga akhir hayatnya.

Secara bertahap usia harapan hidup semakin meningkat hingga mencapai level 75,22 tahun pada tahun 2024. Angka harapan hidup penduduk DIY berada pada level yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Tingginya usia harapan hidup DIY didorong oleh perbaikan kualitas kesehatan penduduk, terutama pada kelompok bayi, balita, dan wanita berusia subur. Perbaikan kualitas kesehatan ini ditandai oleh tingkat kemudahan penduduk dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas asupan gizi, serta berkurangnya angka kesakitan. Selain itu, gaya hidup penduduk DIY yang *low profile* juga turut menjadi pendorong.

Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama terutama bagi wanita sangat mempengaruhi tingkat fertilitas secara khusus dan perkembangan jumlah penduduk secara umum. Semakin muda usia perkawinan akan semakin panjang masa reproduksi, sehingga peluang fertilitasnya semakin besar. Di sisi yang lain, usia perkawinan yang terlalu dini juga memiliki pengaruh terhadap tingkat resiko ketika masa kehamilan dan persalinan. Semakin tinggi usia perkawinan pertama akan mempersingkat masa reproduksi wanita dan itu berarti peluang tingkat kelahiran akan rendah.

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mensyaratkan batas usia menikah untuk perempuan minimal 16 tahun. Sementara, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah berumur 18 tahun. Berdasarkan ketentuan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang perempuan yang ideal adalah 21-25 tahun. Berdasarkan hasil estimasi dengan data Susenas, rata-rata



Gambar 4.3. Rata-rata Usia Perkawinan Pertama Penduduk Usia 10+ Tahun Berstatus Pernah Kawin (tahun), 2020-2023

Sumber: Susenas Maret 2020-2023, BPS DIY

usia perkawinan pertama baik laki-laki maupun perempuan di DIY tercatat relatif meningkat. Pada posisi Maret 2023 rata-rata usia perkawinan pertama laki-laki mencapai 25,9 tahun. Sementara, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan sebesar 22,07 tahun. Secara rata-rata, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki usia perkawinan pertama dalam batas usia yang cukup ideal.

Jika dikaji berdasarkan distribusinya, maka mayoritas wanita berusia 10 tahun ke atas yang berstatus pernah kawin melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 21 tahun. Proporsi pada tahun 2024 mencapai 59,34 persen. Angka ini menggambarkan kesadaran wanita untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yang semakin meningkat. Komposisi terbesar berikutnya menikah pada usia 19-20 tahun dengan proporsi sebesar 21,81 persen. Sementara, proporsi wanita yang pernah kawin dengan usia 18 tahun ke bawah juga masih cukup besar. Jika lebih dirinci, maka masih terdapat 6,62 persen yang kawin pada usia 16 tahun ke bawah dan 12,23 persen pada usia 17-18 tahun. Proporsi ini masih cukup besar dan membutuhkan perhatian yang lebih serius terutama pada mereka yang berusia muda. Sebagian besar kasus perkawinan dengan usia di bawah 16 tahun terjadi pada masa lampau. Namun, tidak sedikit kasus yang terjadi pada masa sekarang, terutama pada kelompok remaja yang salah dalam pergaulan dan terpaksa melakukan pernikahan pada usia yang sangat dini.

Secara psikologis, seorang wanita yang berusia kurang dari 18 tahun belum siap untuk membina sebuah rumah tangga. Seharusnya mereka masih berstatus sekolah pada jenjang pendidikan menengah. Upaya untuk meningkatkan usai perkawinan dapat ditempuh dengan memberi kesempatan

Tabel 4.1. Persentase Wanita Pernah Kawin 10 Tahun ke Atas di DIY menurut Umur Perkawinan Pertama (persen), 2016-2024

Tahun	Umur Perkawinan Pertama				Jumlah
	≤16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2016	7,34	14,28	54,16	24,23	100
2017	4,55	13,59	55,10	26,76	100
2018	6,21	14,66	52,43	26,70	100
2019	7,89	14,28	52,68	25,15	100
2020	6,81	13,80	52,91	26,48	100
2021	6,76	14,69	53,31	25,24	100
2022	6,60	14,54	53,14	25,72	100
2023	6,25	13,49	55,31	24,96	100
2024	6,62	12,23	21,81*	59,34**	100

Ket : * usia perkawinan pertama 19-20

** usia perkawinan pertama 21+

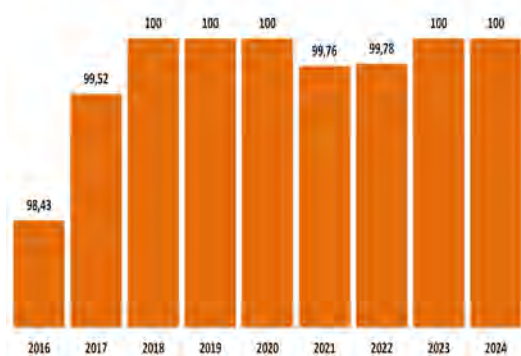
Sumber: Susenas Maret 2016-2024, BPS DIY

pada wanita untuk bersekolah lebih tinggi, memberikan penyuluhan dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan resiko kawin usia dini, serta memperluas kesempatan memperoleh pekerjaan bagi wanita muda.

Penolong Persalinan

Kualitas kesehatan dan kasus kematian balita tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu dan janin semasa kehamilan. Kesehatan dan kasus kematian balita juga dipengaruhi pula oleh faktor lain, seperti proses kelahiran/persalinan serta kondisi lingkungan tempat tinggal. Data penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan, terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Proses persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau medis, seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik dan lebih aman dibandingkan dengan proses



Gambar 4.4. Persentase Penolong Persalinan Balita Terakhir oleh Tenaga Medis (persen) 2016-2024

Sumber : Susenas 2016-2024, BPS

yang ditolong oleh tenaga tradisional seperti dukun atau lainnya. Secara tidak langsung, hal ini juga menggambarkan tingkat kemajuan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada saat kelahiran. Perkembangan data proporsi balita menurut penolong persalinan selama sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa mayoritas persalinan telah ditangani oleh tenaga kesehatan atau medis. Proporsinya mencapai 100 persen pada kondisi Maret 2022.

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa sampai tahun 2024 proses persalinan di DIY yang ditolong oleh dokter pada kisaran 57,49 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan yang ditangani oleh bidan sebesar 41,57 persen dan 0,94 persen persalinan ditangani oleh tenaga medis lainnya seperti perawat. Berdasarkan sampel, pada saat referensi pencacahan, kasus persalinan yang ditangani oleh tenaga tradisional atau tenaga nonkesehatan sebesar 0 persen. Artinya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencapai 100 persen dari jumlah seluruh persalinan.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret 2024, sebagian besar proses

Tabel 4.2. Persentase Persalinan Balita menurut Penolong Kelahiran Terakhir di DIY (persen), 2018-2024

Tahun	Tenaga Medis			Tenaga Tradisional	
	Dokter	Bidan	Medis lain	Dukun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	53,31	45,23	1,46	0,00	0,00
2019	55,61	43,86	0,53	0,00	0,00
2020	61,43	37,87	0,69	0,00	0,00
2021	57,80	40,27	1,69	0,24	0,00
2022	57,35	42,02	0,41	0,22	0,00
2023	56,98	42,42	0,6	0,00	0,00
2024	57,49	41,57	0,94	0,00	0,00

Sumber: Susenas, 2018-2024, BPS

persalinan bayi telah dilakukan di rumah sakit baik negeri maupun swasta dengan proporsi 56,62 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah persalinan di klinik bersalin, diikuti oleh Puskesmas/Polindes/Pustu/praktik nakes. Fenomena ini menggambarkan sebagian besar rumah tangga sudah memiliki kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan yang tersedia, terutama tempat untuk melakukan persalinan dan perawatan pasca persalinan.

Pemberian Air Susu Ibu

Peran ibu dalam menunjang kesehatan balita dapat dikaji menggunakan indikator lamanya menyusui anak berusia 2-4 tahun. Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi, karena mengandung gizi yang tinggi dan zat pembentuk kekebalan tubuh dari berbagai macam penyakit. Manfaat lain yang diperoleh dari pemberian ASI antara lain dapat menumbuhkan ikatan batin dan kasih sayang antara ibu dan anak. Semakin lama pemberian ASI cenderung membuat daya tahan tubuh anak balitanya semakin baik.

Tabel 4.3. Persentase Anak Usia di Bawah 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI di DIY (persen), 2019-2024

Tahun	Wilayah		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	98,46	98,94	98,56
2020	99,90	98,70	99,60
2021	97,86	97,21	97,70
2022	95,94	96,56	96,10
2023	98,47	99,33	98,66
2024	na	na	99,03

Sumber: Susenas, 2019-2024, BPS

Tabel 4.3 menyajikan data proporsi anak berusia di bawah dua tahun yang pernah diberi asupan ASI berdasarkan hasil Susenas. Secara umum, mayoritas anak berusia di bawah dua tahun telah menerima asupan ASI. Proporsi selama enam tahun terakhir sudah berada di kisaran 99 persen. Artinya, masih ada sekitar 1 persen anak yang belum pernah menerima pemberian ASI. Proporsi ini seharusnya mendapat perhatian lebih besar untuk sosialisasi pentingnya ASI dan perlu digali lebih dalam alasan mengapa tidak memberi asupan ASI kepada bayi dan balitanya. Sementara, proporsi anak usia di bawah dua tahun yang masih menerima asupan ASI pada

Tabel 4.4. Persentase Balita Usia 0-23 Bulan di DIY menurut Wilayah dan Lamanya Disusui (persen), 2024

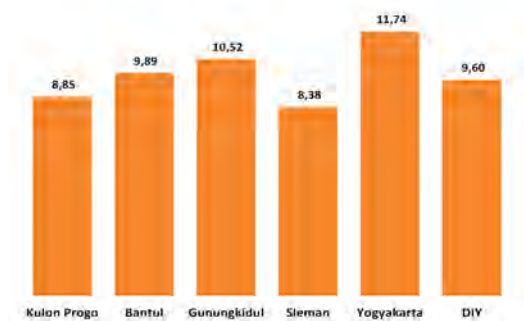
Ket	Lama Pemberian ASI (Bulan)					
	KP	Bantul	GK	Sleman	Kota Yk	DIY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<6	34,22	27,25	26,36	34,05	21,60	29,43
6-23	65,78	72,75	73,64	65,95	78,40	70,57

Sumber: Susenas, 2024, BPS

saat periode pendataan jumlahnya cukup tinggi. Untuk mengevaluasi pemberian ASI, digunakan referensi penduduk pada usia 0-23 bulan.

Tabel 4.4 menunjukkan persentase balita berumur 0-23 bulan menurut lamanya disusui dalam satuan bulan selama periode 2024. Secara Rata-rata, lama pemberian ASI kepada balita di DIY sudah cukup tinggi. Pada usia kurang dari 2 tahun, lebih dari 99,03 persen bayi mendapatkan ASI. Secara rata-rata, lamanya periode pemberian ASI mencapai 10 bulan. Hal ini menjadi fenomena yang cukup baik dan menggambarkan peningkatan pemahaman ibu terkait manfaat pemberian ASI.

Periode pemberian ASI bagi bayi dapat dibagi menjadi dua, yakni ASI saja tanpa makanan tambahan (ASI Eksklusif) dan ASI dengan makanan tambahan. Berdasarkan ketentuan dari Kementerian Kesehatan lama pemberian ASI eksklusif adalah enam bulan pertama pasca kelahiran. Semakin besar proporsi bayi yang memperoleh ASI eksklusif menggambarkan pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan bayi yang semakin meningkat. Pada akhirnya pengetahuan ini akan memberi pengaruh terhadap kekebalan bayi terhadap penyakit dan mengurangi kasus kematian bayi.



Gambar 4.5. Rata-rata Lama Bulan Balita di Bawah 2 Tahun Mendapat Asupan ASI (bulan), 2024

Sumber : Susenas Maret 2024, BPS

Berdasarkan data Susenas Maret 2024, anak berusia 0-23 bulan sebagian besar telah menerima asupan ASI dengan periode yang bervariasi. Secara rata-rata, periode pemberian ASI di DIY tercatat sebesar 9,60 bulan. Wilayah dengan rata-rata pemberian ASI paling lama adalah di Kota Yogyakarta (11,74 bulan). Wilayah dengan rata-rata pemberian ASI yang tertinggi berikutnya adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan lama pemberian ASI rata-rata 10,52 bulan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor pendidikan/pengetahuan dan sikap ibu. Wanita di perkotaan memiliki pengetahuan gizi yang baik, demikian pula dengan penduduk perdesaan.

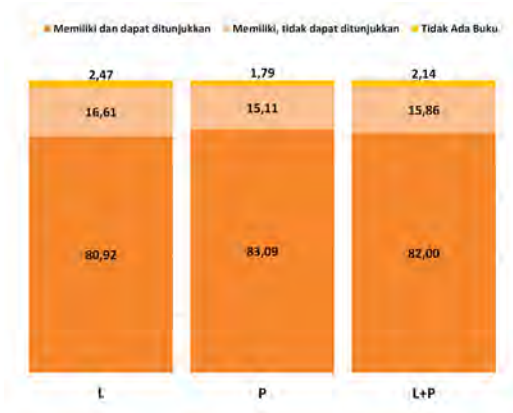
Imunisasi

Selain pemberian ASI, pemberian imunisasi juga berperan penting dalam membentuk ketahanan tubuh anak dari serangan berbagai penyakit. Kementerian Kesehatan menganjurkan agar semua anak-anak dapat memperoleh imunisasi secara lengkap. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang

di sekitarnya. Jenis imunisasi yang wajib diberikan pada balita adalah BCG, DPT, Polio, Campak/Morbili, dan Hepatitis B.

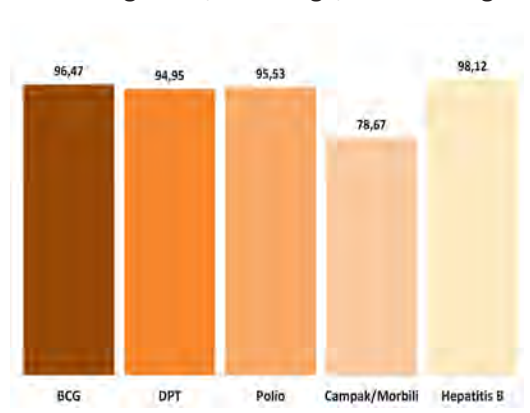
Dalam Susenas, pertanyaan mengenai imunisasi ditanyakan kepada anggota rumah tangga berusia 0-59 bulan. Mekanisme penggalan data ditanyakan kepada orang tua atau anggota rumah tangga yang mengetahui riwayat imunisasi berdasarkan catatan dalam buku KIA/KMS/kartu imunisasi atau wawancara jika tidak memiliki/tidak dapat menunjukkan kartu. Pada kondisi Maret 2024, proporsi balita usia 0-59 bulan yang memiliki kartu imunisasi dan mampu menunjukkannya tercatat sebesar 82,00 persen. Sebanyak 15,86 persen mengaku memiliki kartu, tetapi tidak bisa menunjukkannya. Sisanya, 2,14 persen tidak memiliki buku KIA/KMS. Pola perbandingan menurut wilayah maupun jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Berdasarkan Susenas Maret 2024, sebagian besar balita sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi diri, keluarga, dan bangsa.



Gambar 4.6. Persentase Anak berusia 0-59 Bulan Menurut Status Kepemilikan KIA/KMS di DIY (persen), 2024

Sumber : Susenas Maret 2024, BPS



Gambar 4.7. Persentase Anak Usia 0-59 Bulan yang Telah Diberi Imunisasi di DIY (persen), 2024

Sumber : Susenas Maret 2024, BPS

Imunisasi merupakan langkah terbaik untuk mencegah penyakit berbahaya yang dapat dicegah, seperti cacar air, flu, hepatitis, campak, gondongan, polio, dan banyak lagi.

Berdasarkan catatan kartu/buku imunisasi dapat disajikan proporsi balita berdasarkan jenis imunisasi yang telah didapatkan. Proporsi jenis imunisasi tertinggi yang telah diberikan kepada balita di DIY adalah Hepatitis B, dengan persentase 98,12 persen, dan diikuti oleh polio (96,47 persen), polio (95,53 persen), dan DPT (94,95 persen). Sementara, jenis imunisasi campak capaiannya di bawah 90 persen yakni 78,67 persen. Salah satu penjelasannya adalah umur balita belum mencukupi untuk diberikan jenis imunisasi tersebut.

Keluhan Kesehatan

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari tingkat morbiditas (angka kesakitan). Indikator ini menunjukkan ada tidaknya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah

tangga maupun aktivitas lainnya. Keluhan yang dimaksud mengindikasikan adanya gangguan suatu penyakit tertentu.

Morbiditas atau angka kesakitan diukur menggunakan proporsi penduduk yang memiliki keluhan sakit pada selang waktu tertentu. Dalam Susenas, keluhan kesehatan yang dimaksud mencakup: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Referensi waktu yang digunakan dalam Susenas adalah sebulan sebelum periode pencacahan. Semakin tinggi angka morbiditas menunjukkan semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan.

Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk adalah batuk, pilek dan panas. Secara umum, tingkat morbiditas penduduk selama periode 2018-2023 cukup berfluktuasi. Tingkat morbiditas menunjukkan *trend* meningkat pada periode 2018-2020, dan menurun pada tahun 2021, dan kembali naik tahun 2022, dan kembali turun di tahun 2023. Penduduk DIY yang mengalami keluhan kesehatan pada Maret 2023 mencapai 26,96

Tabel 4.5. Persentase Penduduk DIY yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Terganggu Aktivasnya Selama Sebulan yang Lalu (persen), 2018-2023

Wilayah/ Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan (%)						Aktivitas Terganggu (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
K	35,18	34,81	37,56	31,95	33,50	26,84	36,63	40,66	33,19	43,39	41,54	36,45
Wilayah D	35,68	37,99	39,44	25,19	42,26	27,35	50,33	59,11	52,69	37,16	45,33	50,58
K+D	35,32	35,67	38,07	30,20	35,73	26,96	40,37	45,96	38,64	42,04	42,68	40,03
L	34,11	33,66	35,82	29,51	33,27	25,04	40,32	48,07	36,87	58,23	42,84	40,49
Jenis Kelamin P	36,50	37,65	40,27	30,88	38,16	28,86	40,41	44,11	40,19	26,84	42,55	39,64
L+P	35,32	35,67	38,07	30,20	35,73	26,96	40,37	45,96	38,64	42,04	42,68	40,03

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2018-2023, BPS DIY

persen. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2022, keluhan kesehatan yang dialami oleh penduduk mengalami penurunan cukup tinggi. Demikian pula jika dilihat dari proporsi penduduk mengalami keluhan sakit sampai terganggu aktivitasnya terlihat mengalami penurunan. Proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sampai terganggu aktivitas sehari-harinya (pekerjaan, sekolah, dan lainnya) pada kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 40,03 persen. Artinya, ada penurunan morbiditas secara umum atau kualitas kesehatan penduduk semakin meningkat.

Keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk di wilayah perkotaan cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk perdesaan. Proporsi penduduk yang terganggu aktivitasnya di wilayah perkotaan juga lebih rendah dari perdesaan. Secara umum, hal ini menggambarkan kualitas kesehatan penduduk perkotaan relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

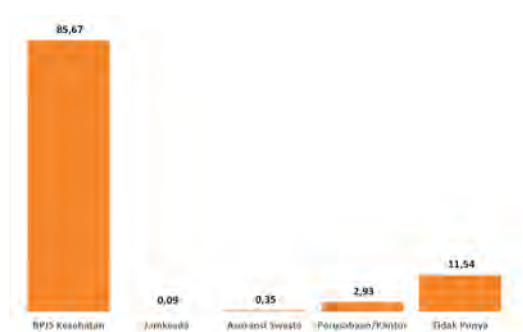
Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan lebih rentan mengalami keluhan kesehatan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan yang cenderung lebih tinggi dari laki-laki. Kondisi Maret 2023, tingkat morbiditas perempuan mencapai 28,86 persen dan laki-laki sebesar 25,04 persen. Tidak setiap keluhan kesehatan tersebut menjadikan terganggunya aktivitas pekerjaan/sekolah/kegiatan sehari-hari. Sebesar 40,49 persen penduduk laki-laki mengalami gangguan aktivitasnya, sementara penduduk perempuan, 39,64 persen yang mengalami gangguan pada aktivitasnya akibat dari keluhan kesehatan yang dialaminya.

Pengobatan dan Pemanfaatan Fasilitas

Kesehatan

Untuk menjamin dan meningkatkan kualitas kesehatan penduduk, pemerintah telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan dasar yang representatif, murah, dan mudah dijangkau oleh semua kalangan. Upaya ini juga ditopang oleh pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta didukung oleh peran pihak swasta. Penyediaan fasilitas kesehatan juga disertai dengan distribusi tenaga kesehatan yang memadai, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, proporsi penduduk DIY yang telah memiliki jaminan kesehatan mencapai 88,46 persen. Jaminan kesehatan ini bisa berupa BPJS kesehatan baik berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun mandiri, jamkesda, asuransi swasta, perusahaan atau kantor, dan lainnya. Angka tersebut juga menggambarkan masih ada sekitar 11,54 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Dibandingkan dengan tahun 2023, proporsi penduduk yang tidak memiliki jaminan ini semakin menurun, artinya masyarakat semakin menyadari pentingnya jaminan kesehatan.



Gambar 4.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan di DIY (persen), 2024

Sumber : Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

Tabel 4.6. Penduduk yang Melakukan Pengobatan Sendiri dan Berobat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Wilayah dan Jenis kelamin di DIY (persen), 2020-2023

Wilayah/ Jenis Kelamin		Mengobati Sendiri				Berobat Jalan Sebulan Terakhir			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Wilayah	K	67,89	82,19	84,33	75,06	46,25	44,16	42,03	38,88
	D	51,44	75,19	79,04	68,14	60,31	44,76	37,56	46,13
	K+D	63,29	80,68	82,74	73,3	50,18	44,29	40,68	40,72
Jenis Kelamin	L	65,15	82,87	83,43	73,29	46,08	58,57	39,64	39,45
	P	61,67	78,61	82,14	72,32	53,77	30,88	41,58	41,8
	L+P	63,29	80,68	82,74	73,3	50,18	44,29	40,68	40,72

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020-2023, BPS DIY

Penduduk yang mengalami keluhan dan gangguan kesehatan pada umumnya melakukan berbagai upaya pengobatan, baik mengobati sendiri, rawat jalan, maupun rawat inap. Pada kondisi Maret 2023, terdapat 73,3 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan melakukan pengobatan sendiri. Mereka menggunakan obat tradisional, obat pabrikan yang dijual eceran di pasar maupun di apotik. Proporsi penduduk yang mengobati sendiri terlihat terus meningkat. Secara umum, proporsi penduduk perkotaan yang melakukan pengobatan sendiri lebih tinggi dari penduduk perdesaan dan penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan.

Proporsi penduduk yang mengalami keluhan sakit dan pernah rawat jalan pada kondisi Maret 2023 sebesar 40,72 persen. Meskipun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan 2022, namun proporsi ini cenderung menurun setiap tahunnya, karena semakin meningkatnya pengetahuan penduduk mengenai penerapan pola hidup yang sehat. Penduduk di wilayah perkotaan memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk berobat jalan dibanding penduduk

perdesaan. Sementara itu, penduduk laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih rendah untuk rawat jalan dibandingkan perempuan. Dalam rentang waktu sebulan terakhir dari referensi pendataan, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan rata-rata melakukan rawat jalan antara 1-2 kali.

Alasan utama mereka yang tidak berobat dengan rawat jalan adalah melakukan pengobatan sendiri. Proporsinya mencapai 66,26 persen. Alasan berikutnya adalah merasa tidak perlu berobat (31,29 persen), dan lainnya (1,41 persen). Alasan yang lainnya adalah waktu tunggu pelayanan lama, tidak ada sarana transportasi, tidak ada biaya transportasi, dan tidak ada yang mendampingi. Namun demikian, secara proporsional jumlahnya sangat kecil yakni di bawah satu persen dari keseluruhan penduduk yang mengalami keluhan sakit.

Penduduk yang melakukan rawat jalan kebanyakan memanfaatkan fasilitas berobat ke puskesmas, dengan proporsi sebesar 33,03 persen pada kondisi Maret 2024. Proporsi penduduk yang berobat jalan ke puskesmas terlihat menurun dibanding tahun sebelumnya. Sebaliknya, proporsi yang berobat jalan ke klinik/

Tabel 4.7. Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Jalan Selama Sebulan yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat (persen), 2021-2024

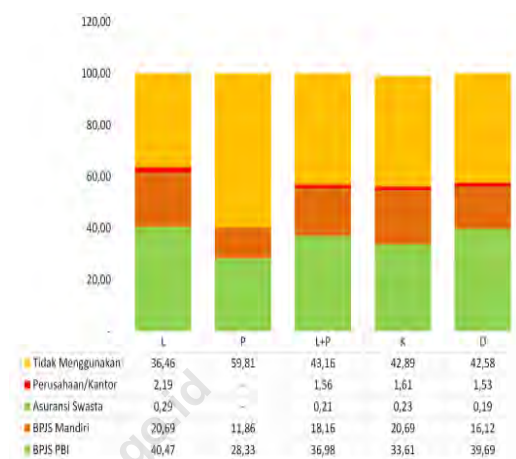
Fasilitas/Tempat Berobat Jalan	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	5,36	5,94	9,5	11,51
RS Swasta	13,30	10,71	20,46	18,94
Praktik Dokter/Bidan	19,61	30,37	25,74	25,45
Klinik/Praktik Bersama	47,05	14,53	15,82	16,76
Puskesmas	17,17	39,44	33,1	33,03
UKBM	0,49	0,66	0,88	2,04
Tradisional	0,77	0,60	0,61	0,00
Lainnya	0,35	0,28	0,92	0,00

Sumber: Susenas, 2021-2024, BPS

praktek bersama cenderung meningkat. Proporsi penduduk yang melakukan rawat jalan di rumah sakit pemerintah meningkat, sedangkan rawat jalan ke rumah sakit swasta menunjukkan penurunan. Hal ini didorong peningkatan kualitas dan pelayanan RS pemerintah. Sistem pelayanan kesehatan yang berjenjang atau rujukan yang diterapkan bagi peserta jaminan kesehatan BPJS ikut berpengaruh terhadap perubahan pola penduduk yang melakukan rawat jalan. Penduduk yang melakukan rawat jalan ke UKBM (poskesdes, polindes, dan posyandu) relatif kecil dengan proporsi 2,04 persen.

Ketika melakukan rawat jalan, penduduk DIY yang memanfaatkan jaminan kesehatan baru mencapai 60,69 persen. Sisanya, sebanyak 39,31 persen tidak menggunakan jaminan meskipun mereka memilikinya. Alasannya adalah prosedur yang sulit dan kualitas layanan yang diterima akan berbeda ketika mereka menggunakan jaminan kesehatan. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan ketika sedang rawat jalan

Gambar 4.9. Distribusi Penduduk DIY Menurut Jaminan Kesehatan Rawat Jalan Sebulan Terakhir (persen), 2023



Sumber : diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

adalah BPJS kesehatan. Baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang melakukan rawat inap lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS, baik BPJS PBI maupun mandiri.

Secara umum, ada sedikit perbedaan pola pemanfaatan jaminan kesehatan antara penduduk laki-laki dan perempuan ketika sedang rawat jalan. Penggunaan jaminan kesehatan BPJS lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk perempuan, yakni sebanyak 64,07 persen yang menggunakan jaminan kesehatan ketika sedang rawat jalan. Pertimbangan nilai ekonomis bisa jadi menjadi salah satu faktor yang mendorong penggunaan jaminan kesehatan saat sedang rawat jalan.

Selain pengobatan secara rawat jalan, upaya yang dilakukan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan adalah melakukan pengobatan secara rawat inap. Berdasarkan data Susenas lima tahun terakhir, proporsi penduduk DIY yang melakukan rawat inap cenderung semakin menurun. Kondisi Maret 2024, penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun

Tabel 4.8. Proporsi Penduduk DIY yang Melakukan Rawat Inap Setahun yang Lalu (persen), 2020-2024

Wilayah/ Jenis Kelamin	Melakukan Rawat Inap					
	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Jenis Kelamin	L	5,55	3,32	3,14	3,83	4,14
	P	8,25	5,34	4,81	4,79	5,72
Wilayah	K	7,07	4,51	4,24	4,78	
	D	6,48	3,83	3,25	2,90	
Kabupaten	KP	5,83	4,18	3,99	3,53	
	BTL	7,47	4,87	4,97	4,25	
	GK	6,27	3,65	3,00	3,22	
	SLM	7,51	4,36	3,39	4,93	
	YK	6,07	4,34	5,03	5,35	
DIY	6,91	4,34	3,98	4,31	4,94	

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020-2024, BPS DIY

terakhir proporsinya mencapai 4,94 persen.

Secara demografis, proporsi penduduk perempuan yang melakukan rawat inap lebih tinggi dari laki-laki dan penduduk perkotaan lebih tinggi dari perdesaan. Lama melakukan rawat inap di DIY rata-rata sebanyak 4,94 hari.

Fasilitas tempat yang paling banyak digunakan penduduk DIY untuk rawat inap sampai tahun 2024 adalah rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Proporsi penduduk yang melakukan rawat inap di RS pemerintah mencapai 34,83 persen dan RS swasta sebesar 60,78 persen. Pemanfaatan tempat rawat inap yang lainnya relatif kecil.

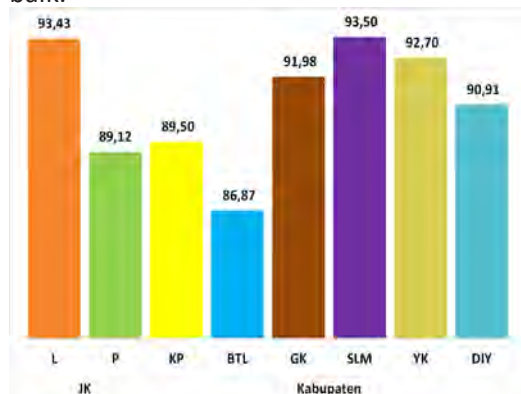
Sebagian besar penduduk DIY yang melakukan rawat inap telah memanfaatkan jaminan kesehatan, dengan persentase sebesar 90,91 persen. Proporsi penduduk laki-laki lebih banyak yang menggunakan jaminan kesehatan saat rawat inap, yaitu 93,43 persen. Sementara penduduk perempuan hanya 89,12 persen yang menggunakan jaminan kesehatan saat

Tabel 4.9. Penduduk DIY yang Rawat Inap Selama Setahun yang Lalu menurut Fasilitas/Tempat Dirawat (persen), 2020-2024

Fasilitas/Tempat Rawat Inap	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
RS Pemerintah	32,01	25,64	31,39	32,92	34,83
RS Swasta	57,00	60,72	55,33	59,88	60,78
Praktek Bidan	3,45	4,30	6,20	2,70	2,47
Klinik/Praktek Dokter bersama	5,86	7,10	4,98	3,65	3,03
Puskesmas	4,49	3,21	3,51	1,85	1,70
Tradisional	0,00	0,21	0,64	0,00	0,00
Lainnya	0,26	0,00	0,04	0,00	0,00

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020-2024, BPS DIY

rawat inap. Dari sisi wilayah, penduduk Kabupaten Sleman paling banyak menggunakan jaminan kesehatan saat rawat inap, yaitu sebesar 93,50 persen. Sedangkan Kabupaten Bantul merupakan yang terendah di DIY, dengan persentase sebesar 86,87 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah. Belum maksimalnya penggunaan jaminan kesehatan perlu evaluasi agar penjaminan kesehatan penduduk secara berkualitas, mudah, dan murah bisa benar-benar terlaksana dengan baik.



Gambar 4.10. Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Ketika Berobat Rawat Inap di DIY (persen), 2024

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY



Indikator Pendidikan

Indikator Pendidikan

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah yang ditempuh untuk mewujudkannya melalui jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang sama pentingnya dengan investasi modal fisik untuk mencapai tujuan ekonomi jangka panjang suatu negara (Mankiw, 2007). Output dari proses pendidikan adalah untuk menambah dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemandirian dan kepribadian yang merupakan modal dasar yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Menurut Todaro (2004), pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar dan pendidikan adalah hal pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Pendidikan bukan sekedar hak asasi manusia, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya.

Tantangan terbesar pembangunan pendidikan di Indonesia terletak pada aspek pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu dan daya saing, serta tata kelola dan pembiayaan

Pendidikan merupakan bentuk aktivitas penyediaan barang/jasa publik, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah. Kebijakan fiskal diyakini merupakan intervensi pemerintah melalui pengeluaran pemerintah untuk pemenuhan pelayanan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, tenaga pengajar, kegiatan belajar mengajar, maupun pembiayaannya. Meskipun demikian, seiring dengan perkembangan waktu pihak swasta juga bisa ikut berpartisipasi dalam aktivitas penyediaan pendidikan mulai prasekolah sampai pendidikan tinggi. Pengeluaran pemerintah dalam pelayanan kebutuhan dasar terutama pendidikan, merupakan bentuk investasi terhadap sumber daya manusia karena dapat meningkatkan produktivitas masyarakat di masa mendatang. Harapannya dengan produktivitas yang semakin tinggi maka tingkat pendapatan yang diterima masyarakat akan meningkat dan kesejahteraannya juga akan terangkat.

Dalam beberapa tahun mendatang pembangunan pendidikan nasional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius. Dalam upaya meningkatkan kinerja pendidikan, tantangan tersebut mencakup: (a) pemerataan dan perluasan akses; (b) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; (c) penataan tata

kelola, akuntabilitas, dan citra publik; dan (d) peningkatan pembiayaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ada beberapa sasaran pembangunan bidang pendidikan yang ingin dicapai melalui Program Indonesia Pintar dengan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Sasaran tersebut antara lain ditandai oleh meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah; meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan; meningkatnya kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Sasaran yang lain adalah meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif; serta meningkatnya dan meratanya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Beberapa indikator output yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kualitas pendidikan SDM antarlain adalah Angka Melek Huruf (AMH), tingkat pendidikan tertinggi penduduk, dan rata-rata lama sekolah. Indikator proses dapat diukur dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Sementara, indikator input pendidikan salah satunya adalah ketersediaan fasilitas pendidikan.

Angka Melek Huruf (AMH)

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat lebih maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang

kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (*Literacy Rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat (BPS, 2011). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolok ukur penting dalam mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan pada masa lampau.

Dalam Susenas, kemampuan baca tulis dibedakan menjadi huruf latin dan lainnya. Dalam masyarakat Indonesia, huruf latin masih merupakan satu-satunya huruf yang dominan digunakan, sehingga dalam uraian ini dititikberatkan pada kemampuan baca tulis huruf latin.

Penduduk berusia 15 tahun ke atas merupakan masyarakat dewasa yang sudah seharusnya dapat membaca dan menulis. Dalam kenyataannya, sampai dengan tahun 2023 masih ada sekitar 7,73 persen penduduk DIY berusia 15 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan atau menulis. Hal ini berarti capaian angka melek huruf di DIY masih 92,27 persen. Dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas sekitar 92-93 orang sudah

Tabel 5.1. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia DIY, 2017-2023 (Persen)

Jenis Kelamin/Kelompok Usia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	
Jenis Kelamin	Laki-laki	97,34	97,09	97,87	97,40	97,46	96,91	96,35
	Perempuan	92,05	92,66	92,16	92,86	93,05	92,80	93,52
	Laki-laki+Perempuan	94,64	94,83	94,96	95,09	94,85	94,82	94,92
Kelompok Usia	15+ Tahun	94,64	94,83	94,96	95,09	94,85	94,82	92,27
	15-44 Tahun	99,80	99,91	99,95	99,94	99,93	99,78	99,2
	45+ Tahun	87,62	87,94	88,44	88,74	89,06	89,66	90,32

Sumber: Susenas 2017-2023, BPS

mampu membaca dan menulis. Sedangkan sisanya sekitar 7-8 orang berstatus buta huruf.

Perkembangan AMH dalam beberapa tahun terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap. Secara umum, AMH penduduk laki-laki relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan akibat pengaruh pembangunan pendidikan pada masa lampau yang bias gender. Level AMH laki-laki pada tahun 2023 sudah mencapai 96,35 persen. Sementara, level AMH perempuan sebesar 93,52 persen. Dalam beberapa tahun terakhir gap atau selisih AMH antara laki-laki dan perempuan terlihat semakin berkurang. Penyebabnya adalah tingkat partisipasi sekolah penduduk perempuan pada jenjang menengah dan tinggi yang semakin meningkat.

Perbandingan AMH menurut wilayah menunjukkan bahwa AMH penduduk perkotaan masih lebih tinggi dari pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan pada masa lampau yang lebih berorientasi di kawasan perkotaan. AMH tertinggi masih tercatat di Kota Yogyakarta selanjutnya Sleman. Sementara AMH terendah di Gunungkidul.

Jika dilihat menurut kelompok usia maka terlihat lebih jelas penyebab relatif rendahnya AMH di DIY disebabkan oleh rendahnya AMH pada kelompok penduduk berusia tua (45 tahun ke atas). Pada tahun 2023, AMH usia 45 tahun ke atas sebesar 90,32 persen. Sementara, AMH pada kelompok usia muda (15-44 tahun) sudah mendekati 100 persen, tepatnya 99,72 persen. Secara umum fenomena ini dipengaruhi oleh besarnya komposisi penduduk berusia tua akibat tingginya angka harapan hidup penduduk DIY. Di satu sisi hal ini menjadi sebuah kelebihan. Tetapi, di sisi yang lain memberi persoalan pada tingginya angka buta huruf, karena cukup banyak lansia yang statusnya buta huruf. Secara alamiah, AMH penduduk berusia tua akan terus meningkat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Daya saing suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari kualitas SDM yang dimiliki sebagai salah satu modal dasar pembangunan bangsa. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin luas pengetahuan serta

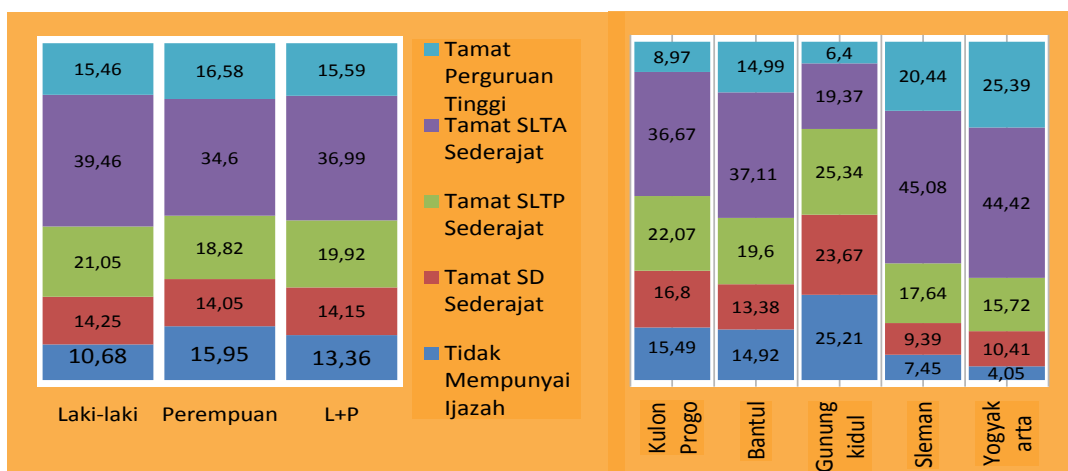
keterampilan/keahlian yang tinggi. Semakin meningkat keterampilan/keahlian, maka semakin berkualitas modal yang dimiliki penduduk untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja. Namun demikian, ijazah yang dimiliki terkadang belum menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Keterampilan dan keahlian yang dimiliki seseorang selalu perlu dilatih dan dipraktekkan dalam dunia kerja.

Komposisi penduduk berusia 15 tahun ke atas di DIY menurut ijazah tertinggi yang dimiliki pada kondisi Maret 2024 disajikan dalam Gambar 5.1. Secara umum, bagian terbesar penduduk berusia kerja telah mengenyam pendidikan sampai jenjang SLTA sederajat. Proporsinya mencapai 36,99 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berijazah SLTP sederajat dan SD sederajat dengan proporsi masing-masing sebesar 19,92 persen dan 14,15 persen. Penduduk yang berijazah diploma, sarjana, dan pascasarjana memiliki proporsi total sebesar 15,59 persen.

Komposisi penduduk yang tidak memiliki ijazah masih cukup besar.

Kelompok ini terdiri dari mereka yang berstatus tidak/belum tamat SD dan tidak/belum pernah sekolah sama sekali. Proporsi mencapai 13,36 persen. Karakteristik kelompok ini didominasi oleh penduduk yang berusia tua. Seiring dengan perkembangan waktu, komposisi kelompok ini cenderung berkurang secara alamiah.

Dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, komposisi penduduk yang berijazah SLTA ke atas tercatat semakin meningkat. Sebaliknya, proporsi penduduk yang berijazah hingga SLTP sederajat ke bawah semakin menurun. Hal ini menggambarkan adanya kenaikan level atau kualitas pendidikan penduduk akibat meningkatnya tingkat partisipasi sekolah terutama pada jenjang menengah dan tinggi. Proporsi penduduk yang tidak/belum pernah sekolah dan belum/tamat SD juga semakin berkurang. Hal ini menggambarkan adanya proses kenaikan level pendidikan penduduk akibat meningkatnya angka partisipasi pada jenjang pendidikan dasar dan berkurangnya populasi penduduk tua secara alamiah karena proses kematian.

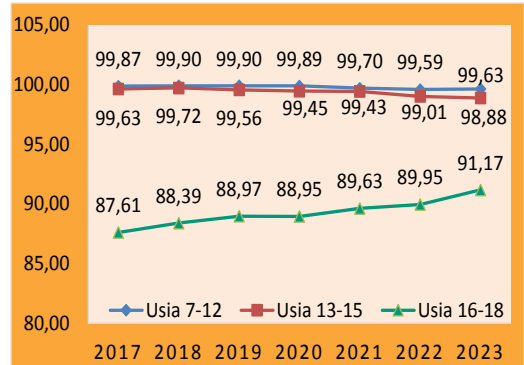


Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2024 BPS

Gambar 5.1. Distribusi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, Jenis Kelamin dan Wilayah, 2024 (Persen)

Komposisi penduduk berusia kerja berdasarkan ijazah tertinggi dan jenis kelamin menunjukkan pola yang hampir sama. Komposisi terbesar baik laki-laki maupun perempuan didominasi oleh mereka yang berijazah SLTA ke atas. Proporsinya adalah 54,92 persen untuk laki-laki dan 51,18 persen untuk perempuan. *Gap* proporsi ini menggambarkan masih adanya ketimpangan gender dalam pembangunan pendidikan di masa lampau, meskipun dalam perkembangannya nilai *gap*-nya semakin mengecil. Bahkan di tahun ini, komposisi penduduk yang berijazah di atas SMA, untuk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, masing-masing 16,58 persen dan 15,46 persen. Hal ini terjadi baik pada kelompok ijazah Diploma I/II/III dan DIV/S1/Profesi.

Komposisi penduduk berusia kerja menurut ijazah tertinggi dan wilayah kabupaten/kota terlihat masih kontras. Di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, penduduk yang berijazah SLTA ke atas atau berpendidikan tinggi lebih mendominasi, masing-masing proporsinya mencapai 69,81 persen dan 65,52 persen. Sementara, proporsi penduduk berijazah SLTA ke atas di wilayah Gunungkidul hanya tercatat sebesar 25,77 persen. Artinya, struktur penduduk di wilayah Kabupaten Gunungkidul lebih didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah atau SLTP ke bawah. *Gap* yang cukup besar ini juga menggambarkan adanya ketimpangan dalam pembangunan pendidikan antar wilayah di DIY pada masa lalu. Penyebab lainnya adalah keterbatasan kesempatan kerja formal yang mendorong pekerja terdidik melakukan migrasi ke wilayah perkotaan. Berdasarkan perkembangan data dalam beberapa tahun terakhir *gap* atau selisih ini semakin kecil.



Sumber: diolah dari data Susenas Maret, BPS

Gambar 5.2. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Usia di DIY, 2017-2023 (Persen)

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pencapaian pendidikan dari sisi proses. APS digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun meningkatnya APS belum selalu identik dengan meningkatnya tingkat pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan APS penduduk DIY pada kelompok usia 16-18 tahun selama satu dekade terakhir terlihat semakin meningkat secara bertahap. Artinya, ada peningkatan kualitas dari sisi partisipasi atau akses terhadap sekolah. Secara umum, APS memiliki pola semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan (Gambar 5.2). APS penduduk usia 7-12 tahun lebih tinggi dari usia 13-15 tahun. Sementara APS penduduk usia 13-15 tahun lebih tinggi dari usia 16-18 tahun. Artinya, hampir semua

Tabel 5.2. APS menurut Kelompok Usia, Jenis Kelamin, dan Wilayah di DIY, 2022-2023 (Persen)

Jenis Kelamin/ Wilayah		2022			2023		
		7-12	13-15	16-18	7-12	13-15	16-18
(1)		(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin	L	99,43	98,28	88,01	99,57	99,04	88,73
	P	99,76	99,76	91,94	99,70	98,71	93,63
	L+P	99,59	99,01	89,95	99,63	98,88	91,17
Wilayah	KP	99,45	99,13	82,82	99,52	99,41	84,73
	BTL	99,79	98,95	91,21	99,5	98,79	91,14
	GK	99,37	97,84	80,15	99,26	97,58	80,59
	SLM	99,46	99,65	94,52	99,98	99,35	95,02
	YK	99,93	99,32	96,73	99,76	99,61	97,18
	DIY	99,59	99,01	89,95	99,63	98,88	91,17

Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2022-2023, BPS

penduduk berusia 7-15 tahun sedang terlibat dalam aktivitas sekolah pada berbagai jenjang dan kelas.

APS usia 7-12 tahun berada pada posisi 99,63 persen di tahun 2023. Artinya, masih ada sekitar 0,37 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang belum mulai mengikuti pendidikan formal. Salah satu alasan utamanya adalah karena terlambat masuk sekolah. Sementara, APS penduduk usia 13-15 tahun berada pada posisi 98,88 persen, artinya masih terdapat 1,12 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang tidak mengenyam pendidikan menengah pertama dengan berbagai kondisi. Ada yang memang belum pernah bersekolah, sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah karena berbagai faktor, maupun peserta kejar Paket B.

APS pada kelompok usia 16-18 tahun 2023 tercatat sebesar 91,17 persen. APS pada kelompok usia ini terlihat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Artinya masih terdapat 8,83 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan menengah atas dengan berbagai kondisi. Ada yang memang belum

pernah bersekolah, sudah tidak bersekolah lagi atau putus sekolah karena berbagai faktor, maupun sebagai peserta program Kejar Paket C.

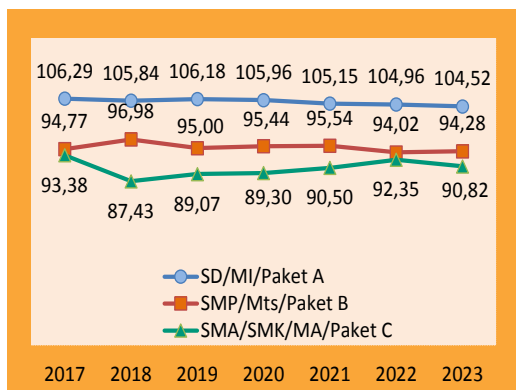
Relatif rendahnya APS pada kelompok umur 16-18 disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang paling berpengaruh adalah persoalan ekonomi. Tidak semua biaya pendidikan di tingkat menengah dan tinggi ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, banyak juga penduduk pada kelompok usia tersebut yang sudah mulai bekerja untuk membantu atau menopang ekonomi keluarga. Selain itu, alasan non ekonomi sangat terkait dengan kesulitan untuk mengakses sarana pendidikan tingkat menengah dan tinggi, merasa tidak mampu mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta cara pandang penduduk mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pendidikan anak yang dianggap belum setimpal dengan biaya yang dikeluarkan.

Perbandingan APS menurut jenis kelamin tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada kelompok usia 7-12 tahun. Perbedaan justru terlihat pada kelompok usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun atau

pendidikan menengah. Namun, pada seluruh kelompok usia, partisipasi sekolah penduduk perempuan sudah melebihi partisipasi sekolah penduduk laki-laki. Artinya, tidak ada lagi ketimpangan gender dalam memperoleh akses pendidikan di setiap level.

Sementara, perbandingan APS menurut kabupaten/kota di wilayah DIY menunjukkan bahwa APS pada semua kelompok umur di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Gunungkidul. Pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun *gap* partisipasi sekolah terlihat relatif rendah. Namun, pada kelompok usia 16-18 *gap* partisipasi sekolah mencapai 16,59 persen untuk Kota Yogyakarta dan 14,43 persen untuk Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup lebar untuk partisipasi sekolah antara Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terhadap Kabupaten Gunungkidul terutama pada jenjang pendidikan menengah.

Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) dan Partisipasi Sekolah Murni (APM)



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2017-2023, BPS

Gambar 5.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kasar (APK) menurut Jenjang Sekolah di DIY, 2017-2023 (Persen)

Indikator partisipasi sekolah yang lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan terkait.

Nilai APK suatu jenjang pendidikan bisa lebih dari 100 persen karena masih terdapat siswa yang berusia di luar batasan usia sekolah, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Hasil Susenas 2017-2023 menunjukkan bahwa APK di DIY untuk tingkat pendidikan SD selalu berada di atas 100 persen. Hal ini mencerminkan kondisi bahwa penduduk yang bersekolah pada jenjang SD tidak hanya penduduk yang berusia pendidikan SD (7-12 tahun) saja. Tetapi, juga mencakup penduduk yang berusia lebih dari 12 tahun tetapi terlambat masuk sekolah dan kasus tinggal kelas. Juga termasuk penduduk berusia kurang dari 7 tahun yang masuk sekolah dasar terlalu awal/dini. Tetapi, hal ini tidak berarti bahwa penduduk usia 7-12 tahun sudah bersekolah semua, karena APK tidak dapat mencerminkan besaran anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah.

APK SLTP sederajat pada kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 94,28 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang SLTP proporsinya hanya 94,28 persen dari jumlah penduduk pada kelompok usia SLTP.

Kemungkinan terdapat penduduk berusia SLTP yang masih menempuh pendidikan di jenjang SD, karena kasus terlambat sekolah dan tinggal kelas atau sudah bersekolah pada jenjang SLTA karena masuk sekolah terlalu muda.

Angka Partisipasi Murni (APM) dihitung menggunakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan atau mengakses fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Jika seluruh penduduk yang berusia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK karena nilai APK juga mencakup penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

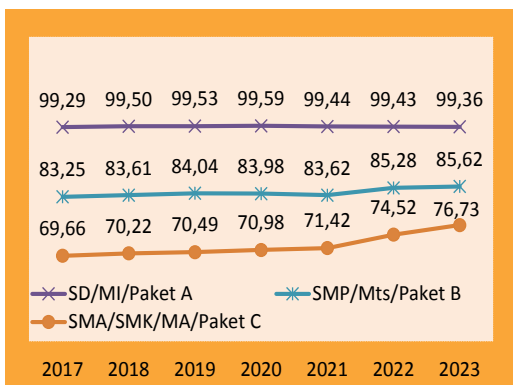
Hasil Susenas 2023, menunjukkan bahwa nilai APM semakin menurun dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Artinya, APM SD>SLTP>SLTA. APM SD pada tahun 2023 mencapai 99,36 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 7-12 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SD. Artinya, masih ada 0,64 persen penduduk berusia 7-12 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SD karena terlambat masuk sekolah atau kemungkinan sudah bersekolah di jenjang SLTP. Perkembangan APM SD selama satu dekade terakhir sudah berada pada level mendekati 100 persen, artinya sudah mendekati kondisi yang ideal.

APM SLTP pada kondisi Maret 2023 tercatat sebesar 85,62 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk DIY berusia 13-15 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTP. Artinya, masih ada 14,38 persen penduduk berusia 13-15 tahun yang statusnya tidak bersekolah pada jenjang SLTP.

Perkembangan APM SLTP selama enam tahun terakhir terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan adanya proses perbaikan kualitas kegiatan belajar mengajar di DIY.

APM tingkat SLTA tercatat pada level 76,73 persen. Angka ini meningkat secara bertahap dalam enam tahun terakhir. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang bersekolah pada jenjang SLTA. Artinya, masih ada 23,27 persen penduduk berusia 16-18 tahun yang sedang tidak bersekolah pada jenjang SLTA.

Perbandingan APM menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa APM perempuan cenderung lebih tinggi dari laki-laki pada semua jenjang. Artinya,



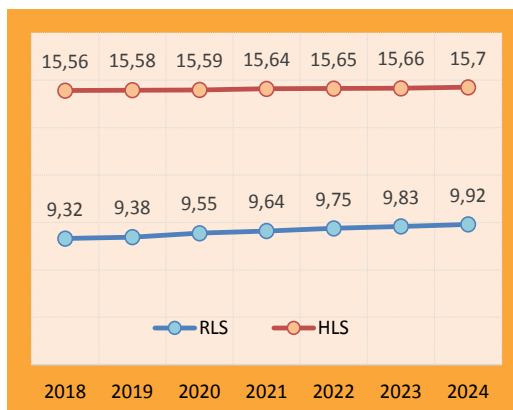
Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2017-2023, BPS

Gambar 5.4. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Murni (APM) menurut Jenjang di DIY, 2017-2023 (Persen)

penduduk perempuan lebih tepat waktu dalam menempuh pendidikan yang sesuai dengan usianya. Sementara, perbandingan menurut wilayah menunjukkan bahwa APM perkotaan cenderung lebih tinggi dari pedesaan pada semua jenjang. Artinya, penduduk perkotaan lebih tepat waktu dalam bersekolah dibandingkan dengan penduduk pedesaan.

Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan yang dapat menggambarkan kualitas pendidikan dari sisi capaian atau output adalah rata-rata lama sekolah penduduk. Indikator ini dihitung menggunakan referensi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Asumsinya adalah kelompok penduduk ini telah menyelesaikan masa pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah penduduk menggambarkan stok modal manusia yang semakin meningkat. Harapannya adalah akan mampu meningkatkan kualitas dan keterampilan penduduk berusia kerja yang mendorong kenaikan produktivitas dan pada akhirnya akan mengangkat kesejahteraan penduduk.



Sumber: diolah dari data Susenas Maret 2018-2024, BPS

Gambar 5.5. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Penduduk DIY, 2018-2024 (Tahun)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja di DIY selama periode 2018-2024 terlihat semakin meningkat secara bertahap. Capaian pada tahun 2024 berada pada level 9,92 tahun. Artinya, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas adalah 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas manusia dari sisi pendidikan terutama penduduk yang baru masuk dalam kelompok usia lebih dari 25 tahun. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, capaian rata-rata lama sekolah penduduk DIY berada pada kelompok tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan di DIY juga ditandai oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun yang tercatat semakin meningkat. HLS DIY pada kondisi Maret 2024 mencapai 15,7 tahun.

Infrastruktur Pendidikan

Ketersediaan sarana dan infrastruktur pendukung pendidikan menjadi kekuatan awal dalam membangun kualitas SDM. Ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif akan mempengaruhi efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh positif terhadap output pendidikan. Ketersediaan fasilitas sekolah, guru, dan kelas yang ideal dengan jumlah siswa akan memacu kualitas keluaran yang maksimal. Sebaliknya, jika ketersediaan fasilitas yang tidak mencukupi maka kualitas hasil didik yang berada di bawah standar. Fasilitas pendidikan yang tersebar secara merata akan mendorong peningkatan partisipasi sekolah. Tingkat aksesibilitas pendidikan salah satunya dapat diukur dengan indikator rasio murid-guru.

Tabel 5.3. Perkembangan Rasio Murid-Guru menurut Jenjang Pendidikan di DIY, 2019/2020-2024/2025

Tahun	Rasio Murid-Guru						
	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	
SD	Murid	290.848	285.832	278.561	274.664	270.566	266.009
	Guru	18.662	18.522	18.625	18.586	18.269	18.469
	Rasio	16	15	15	15	15	14
SMP	Murid	128.507	130.426	133.478	133.305	132.408	131.033
	Guru	8.838	8.635	8.743	8.673	8.413	8.300
	Rasio	15	15	15	15	16	16
SMA	Murid	55.940	57.347	58.413	60.030	61.082	62.382
	Guru	4.464	4.429	4.301	4.265	4.153	3.959
	Rasio	13	13	14	14	15	16
SMK	Murid	88.076	87.207	86.566	87.093	88.514	89.806
	Guru	6.682	6.799	6.694	6.497	6.216	5.965
	Rasio	13	13	13	13	14	15

Sumber: diolah dari data <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

Tabel 5.3 menyajikan rasio beban kerja guru serta rata-rata kepadatan kelas pada setiap jenjang pendidikan. Secara umum, rasio murid-guru pada jenjang pendidikan SD, SLTP, maupun SLTA di wilayah DIY masih berada dalam taraf ideal. Artinya, masih memenuhi persyaratan bagi seorang guru untuk bisa mengawasi dan memberi perhatian kepada murid, serta menjaga mutu pengajaran tetap berjalan dengan baik. Demikian pula dengan kapasitas kelas pada setiap jenjang pendidikan, masih memenuhi taraf ideal untuk menampung jumlah peserta didik, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara optimal. Namun demikian, ukuran tersebut bersifat rata-rata dan belum mencerminkan sebaran sarana kelas dan tenaga pengajar antarwilayah.

Pada tahun ajaran 2024/2025 semester ganjil, rasio murid-guru pada tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK masing-masing tercatat sebesar 14, 16, 16, dan 15. Angka sebesar 14 pada level SD memiliki makna rata-rata seorang guru pada tingkat SD memiliki beban untuk mengawasi dan memberi pengajaran kepada 14 orang peserta didik. Angka rasio murid-guru pada tingkat SD semakin menurun seiring dengan berjalannya waktu. Sebaliknya, dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya, rasio-murid-guru pada tingkat SMP, SMA, dan SMK terlihat cenderung meningkat. Sebagai catatan, rasio murid-guru pada jenjang SMA/MA dan SMK masih bersifat agregat dan belum mencerminkan rasio yang sesuai dengan jurusan dan mata pelajaran yang diampu.

Bab **M**



Indikator
Angkatan Kerja

Indikator Angkatan Kerja

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS adalah *The Labor Force Concept* merujuk pada rekomendasi *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang dilakukannya, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pertumbuhan angkatan kerja secara alamiah memiliki pola yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Namun, laju pertumbuhan kesempatan kerja baru sering kali tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga tidak semua tenaga kerja yang tersedia dapat terserap oleh pasar. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja ini memicu berbagai persoalan ketenagakerjaan yang cukup serius, seperti pengangguran, tingkat upah, kualitas hidup pekerja, hingga masalah sosial lainnya. Tingginya tingkat pengangguran tidak hanya menjadi pemborosan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memicu kemiskinan, meningkatkan keresahan sosial, serta meningkatkan risiko kriminalitas. Tingginya tingkat pengangguran juga menghambat pembangunan, baik dari segi kesejahteraan ekonomi maupun stabilitas sosial, yang pada akhirnya berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan meliputi penciptaan lapangan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Bab ini memberikan gambaran mengenai indikator kesejahteraan terkait dengan aspek angkatan kerja di DIY. Indikator yang disajikan meliputi komposisi penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta karakteristik penduduk bekerja berdasarkan lapangan usaha, status pekerjaan, pendidikan, dan jumlah jam kerja.

Sasaran utama pembangunan bidang ketenagakerjaan adalah meningkatkan penciptaan kesempatan kerja baru dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Komposisi Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja di DIY pada Februari 2024 mencapai 3,01 juta orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 2,20 juta orang (73,18 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 808,04 ribu orang. Komposisi angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 2,13 juta orang dan penduduk yang menganggur sebanyak 71,33 ribu orang. Sementara komposisi bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang mengurus rumah tangga.

Struktur ketenagakerjaan di DIY menunjukkan sebagian besar penduduk usia kerja terlibat dalam aktivitas ekonomi, dengan tingkat partisipasi kerja yang tinggi. Rendahnya jumlah penduduk menganggur mengindikasikan DIY memiliki tingkat pengangguran yang terkendali. Namun, jumlah penduduk bukan angkatan kerja, khususnya yang mengurus rumah tangga sebanyak 487,46 ribu orang, menandakan adanya kelompok yang berpotensi untuk didorong masuk ke pasar kerja melalui kebijakan yang mendukung partisipasi kerja perempuan atau pekerja informal.

Tabel 6.1 Penduduk Usia Kerja Menurut Status Keadaan Ketenagakerjaan di DIY (ribu orang), 2020–2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2020 ¹	Agustus 2020 ¹	Februari 2021 ¹	Agustus 2021 ¹	Februari 2022 ²	Agustus 2022 ²	Februari 2023 ²	Agustus 2023 ²	Februari 2024 ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Angkatan Kerja	2.205,04	2.228,16	2.299,91	2.334,96	2.237,78	2.336,08	2.233,81	2.221,69	2.204,94
Bekerja	2.130,49	2.126,32	2.201,51	2.228,52	2.154,30	2.241,13	2.153,90	2.139,71	2.133,61
Pengangguran	74,55	101,85	98,40	106,43	83,48	94,95	79,91	81,98	71,33
Bukan Angkatan Kerja	909,88	904,59	858,75	840,83	758,53	881,80	808,11	777,23	808,04
Sekolah	320,15	277,81	273,24	253,48	237,11	263,29	252,42	230,46	219,58
Mengurus RT	469,96	526,85	456,97	472,34	413,15	499,16	442,56	428,42	487,46
Lainnya	119,78	99,93	128,54	115,01	108,27	119,35	113,14	118,35	101,00
Jumlah	3.114,92	3.132,75	3.158,65	3.175,79	2.996,31	3.217,87	3.041,92	2.998,93	3.012,98

Catatan: ¹ Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

² Penghitungan dengan menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur menggunakan proporsi jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang masuk dalam pasar kerja, baik berstatus bekerja maupun pengangguran. Indikator ini disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memperlihatkan besarnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi serta menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam perekonomian di suatu wilayah.

TPAK belum secara langsung menggambarkan baik atau buruknya kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah. Peningkatan TPAK perlu ditelusuri lebih jauh, apakah dipengaruhi tingkat pengangguran atau tingkat penyerapan tenaga kerja (penduduk yang berstatus bekerja) selama kurun waktu tersebut.

TPAK DIY pada Februari 2024 mencapai 73,18 persen, mengalami penurunan sebesar 0,25 persen poin jika dibandingkan kondisi Februari 2023. Penurunan TPAK dipengaruhi adanya puncak panen tanaman pangan. Tahun 2023 puncak panen terjadi

pada kuartal pertama, sementara tahun 2024 terjadi pada kuartal kedua. Puncak panen berpengaruh terhadap TPAK khususnya di daerah perdesaan seiring permintaan pekerja pertanian.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki di DIY pada Februari 2024 sebesar 83,19 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 63,53 persen. TPAK laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya yang menganggap bahwa mencari nafkah menjadi tanggung jawab utama laki-laki. Sedangkan aktivitas domestik mengurus rumah tangga identik dengan tugas perempuan sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja. Selain faktor budaya, ketersediaan kesempatan kerja bagi perempuan yang lebih terbatas juga menjadi penyebab adanya *gap* antara TPAK laki-laki dan perempuan. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2023, TPAK laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,20 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 0,70 persen poin. Peningkatan TPAK laki-laki dan penurunan TPAK perempuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan akses kerja bagi perempuan, agar dapat lebih terlibat dalam perekonomian DIY tanpa harus mengabaikan peran domestik perempuan.

TPAK menurut daerah tempat tinggal menunjukkan adanya kecenderungan TPAK perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan. TPAK perdesaan di DIY pada Februari 2024 sebesar 77,92 persen, sedangkan TPAK perkotaan sebesar 71,59 persen. Penduduk perkotaan cenderung memilih menyelesaikan pendidikan setinggi-tingginya sebelum memasuki pasar tenaga kerja dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Oleh karena itu,

Tabel 6.2 TPAK Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di DIY (persen), 2010–2024

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Tipe Daerah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb 10	80,18	62,65	71,41	67,01	77,99	71,41
Agu 10	78,62	61,35	69,76	66,96	73,84	69,76
Feb 11	81,17	65,08	72,93	71,50	75,78	72,93
Agu 11	81,67	59,62	70,39	67,98	75,19	70,39
Feb 12	80,84	62,17	71,29	68,72	76,42	71,29
Agu 12	80,84	62,62	71,52	68,01	78,52	71,52
Feb 13	79,72	60,73	70,01	67,09	75,85	70,01
Agu 13	77,95	61,01	69,29	66,03	75,80	69,29
Feb 14	77,70	66,24	71,84	69,06	77,39	71,84
Agu 14	80,93	61,60	71,05	67,65	77,85	71,05
Feb 15	83,95	62,72	73,10	71,95	76,20	73,10
Agu 15	79,95	57,30	68,38	66,95	71,77	68,38
Feb 16	81,33	63,45	72,21	68,55	81,09	72,21
Agu 16	82,24	62,10	71,96	70,12	76,44	71,96
Feb 17	81,07	63,29	72,00	69,87	77,37	72,00
Agu 17	80,72	62,69	71,52	69,86	75,72	71,52
Feb 18	80,90	63,89	72,21	69,65	78,89	72,21
Agu 18	82,69	64,42	73,37	71,89	77,23	73,37
Feb 19	82,39	64,29	73,16	72,12	75,97	73,16
Agu 19	81,95	64,28	72,94	71,30	77,39	72,94
Feb 20	80,40	61,55	70,79	69,05	75,60	70,79
Agu 20	78,20	64,33	71,12	71,03	71,39	71,12
Feb 21	80,12	65,80	72,81	70,88	78,33	72,81
Agu 21	82,83	64,59	73,52	72,01	77,91	73,52
Feb 22	82,04	67,59	74,68	72,60	80,22	74,68
Agu 22	82,22	63,38	72,60	71,64	75,43	72,60
Feb 23	82,99	64,23	73,43	72,18	76,82	73,43
Agus 23	83,76	64,75	74,08	73,05	77,08	74,08
Feb 24	83,19	63,53	73,18	71,59	77,92	73,18

Catatan: Tahun 2010-2019 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2010

Tahun 2020-2021 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

Tahun 2022-2024 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

penduduk perkotaan menjadi lebih selektif memilih pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikan yang dimiliki. Sementara, penduduk perdesaan memiliki masa sekolah yang relatif lebih pendek. Penduduk perdesaan merasa sudah cukup menyelesaikan jenjang pendidikan dasar atau menengah, sebelum masuk pasar tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga meskipun hanya sebagai pekerja keluarga atau bekerja di sektor informal. Konsekuensinya, jumlah jam kerja relatif pendek dan produktivitas pekerja juga lebih rendah.

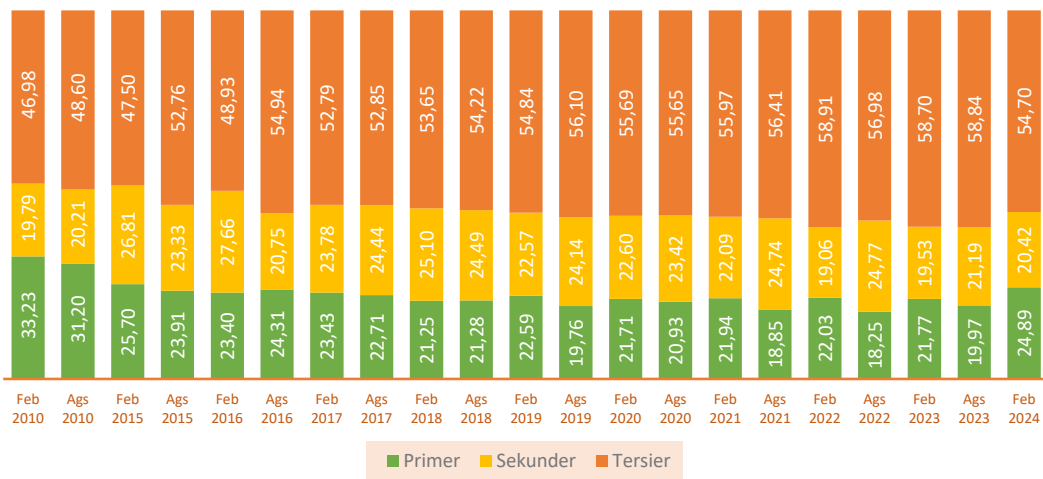
Lebih rendahnya TPAK perkotaan juga dipengaruhi oleh partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja. Keterlibatan perempuan di perdesaan khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian terlihat lebih masif. Sementara, penduduk perempuan di perkotaan cenderung memilih pekerjaan domestik dibandingkan bekerja pada sektor informal.

TPAK menurut kelompok umur memiliki pola menyerupai huruf “U terbalik”. Level TPAK rendah pada kelompok usia 15-19 tahun terjadi karena pada umumnya

kelompok usia tersebut masih menempuh pendidikan. TPAK semakin meningkat hingga mencapai level tertinggi pada kelompok usia 40-54 tahun. Selanjutnya, secara berangsur-angsur TPAK kembali menurun seiring dengan semakin banyaknya penduduk yang mulai memasuki masa pensiun. Penurunan TPAK pada kelompok usia di atas 54 tahun mencerminkan pergeseran fokus dari pekerjaan ke masa pensiun atau aktivitas non-ekonomi lainnya. Pola ini terjadi karena semakin sedikit penduduk usia lanjut yang aktif bekerja, baik karena alasan kesehatan maupun keterbatasan peluang kerja bagi kelompok usia tersebut.

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi ekonomi dalam menyerap tenaga kerja. Indikator ini memberikan gambaran lapangan usaha apa saja yang dominan dalam menyerap tenaga kerja. Lapangan usaha dalam Sakernas dapat dirinci menjadi tiga sektor (primer, sekunder, dan tersier) maupun 17 kategori lapangan usaha (mulai dari kategori pertanian sampai dengan jasa lainnya).



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

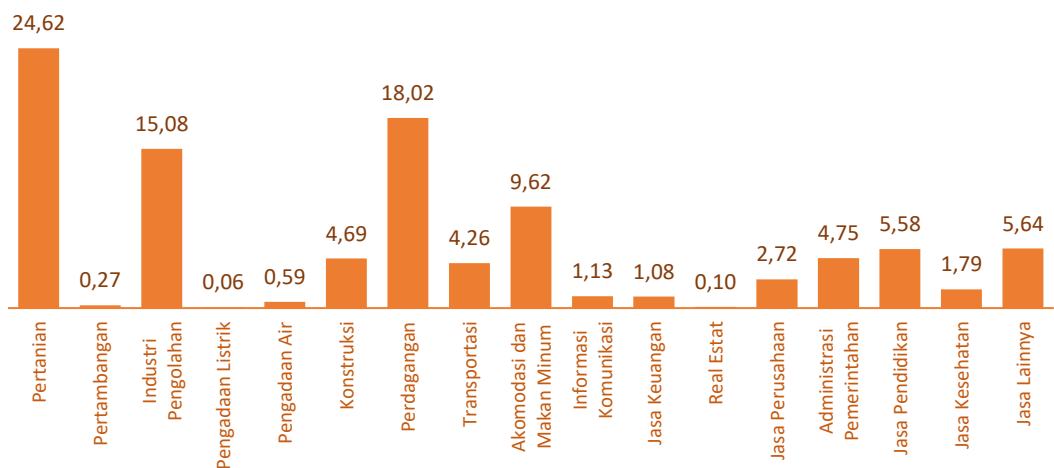
Gambar 6.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan Utama di DIY, 2010–2024

Pasar tenaga kerja di DIY didominasi oleh sektor tersier atau jasa. Sektor ini mampu menyerap 54,70 persen tenaga kerja pada Februari 2024, meskipun mengalami penurunan sebesar 4,00 persen poin dibandingkan Februari 2023. Di sisi lain, sektor sekunder atau manufaktur menyerap 20,42 persen tenaga kerja di DIY pada Februari 2024, meningkat 0,89 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 19,53 persen. Sementara itu, sektor primer menyerap 24,89 persen tenaga kerja pada Februari 2024, mengalami peningkatan sebesar 3,12 persen poin dibandingkan Februari 2023. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor primer ini terutama didorong oleh lapangan usaha pertanian, yang memasuki masa panen tanaman pangan pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertanian masih berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja di DIY, terutama pada waktu panen.

Sektor primer yang pada awal pembangunan paling dominan dalam menyerap angkatan kerja perannya mulai tergantikan oleh sektor tersier dan

sekunder. Andil sektor primer dalam menyerap angkatan kerja secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Penurunan proporsi penduduk yang bekerja di sektor primer dipengaruhi oleh laju pertumbuhan sektor pertanian yang cenderung lebih lambat dibandingkan sektor lain. Kondisi ini sebagai akibat dari dampak derasnya laju konversi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, industri, maupun infrastruktur lainnya. Perubahan struktur tenaga kerja tersebut dapat menggambarkan proses transformasi dalam perekonomian.

Berdasarkan 17 kategori lapangan usaha, kategori pertanian terlihat paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja di DIY, yaitu mencapai 24,62 persen pada Februari 2024. Lapangan usaha terbesar berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran (18,02 persen); industri pengolahan (15,08 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (9,62 persen). Kategori jasa lainnya dan jasa pendidikan berturut-turut menyerap 5,64 persen dan 5,58 persen. Sementara, kategori yang lainnya menyerap tenaga kerja bervariasi di bawah 5 persen.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Gambar 6.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut 17 Kategori Lapangan Usaha di DIY, Februari 2024

Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan

Gambaran mengenai status dan kedudukan pekerja dapat dilihat dari indikator distribusi penduduk bekerja menurut status dalam pekerjaan utama. Indikator ini disajikan secara berkala menggunakan hasil Sakernas. Komposisi penduduk bekerja berdasarkan status dalam pekerjaan utama di DIY selama beberapa tahun terakhir sangat bervariasi. Status pekerjaan utama penduduk DIY pada Februari 2024 sebagian besar buruh/karyawan/pegawai yakni sebesar 34,49 persen, meningkat 2,24 persen poin dibanding Februari 2023 yang mencapai 37,26 persen. Peningkatan buruh/karyawan/pegawai antara lain karena adanya pengangkatan dan penandatanganan PPPK pada periode tersebut.

Komposisi terbesar berikutnya adalah penduduk yang berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar (20,13 persen) diikuti berusaha sendiri (19,36 persen). Secara umum, penduduk yang berstatus berusaha, baik berusaha sendiri maupun dibantu buruh pada Februari 2024 mencapai 43,67 persen, meningkat 2,20 persen poin dibanding Februari 2023. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan adanya peningkatan semangat

kewirausahaan di kalangan angkatan kerja. Pertumbuhan ini dapat menjadi indikator positif bagi perkembangan ekonomi lokal, karena tingginya jumlah pekerja mandiri dan usaha kecil dapat mendorong inovasi dan kemandirian ekonomi di masyarakat.

Komposisi pekerja bebas, baik di sektor pertanian maupun nonpertanian, mencapai 4,75 persen pada Februari 2024. Proporsi ini mengalami penurunan sebesar 0,73 persen poin dibandingkan Februari 2023 yang tercatat sebesar 5,48 persen. Sebagian besar pekerja bebas ini berada di sektor nonpertanian, khususnya konstruksi. Penurunan ini mencerminkan pergeseran pekerja bebas ke sektor lain yang lebih stabil atau menawarkan upah yang lebih baik.

Komposisi pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar pada Februari 2024 mencapai 12,09 persen, turun 3,71 persen poin dibandingkan Februari 2023. Aktivitas ekonomi yang kembali normal pasca pandemi membuat jumlah penduduk yang membantu usaha keluarga tanpa upah semakin berkurang. Penurunan jumlah pekerja tak dibayar ini dapat menjadi sinyal pemulihan ekonomi yang lebih inklusif, di mana semakin banyak penduduk yang memiliki akses terhadap pekerjaan yang lebih produktif dan menguntungkan.

Tabel 6.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di DIY, 2020–2024

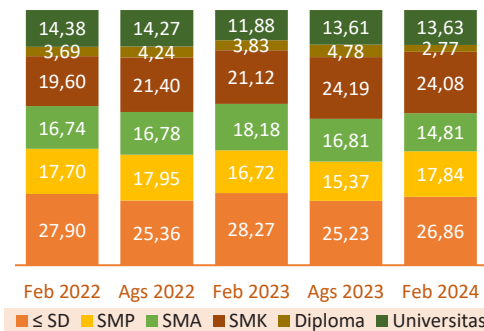
Status Pekerjaan Utama	Feb 2020	Ags 2020	Feb 2021	Ags 2021	Feb 2022	Ags 2022	Feb 2023	Ags 2023	Feb 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Berusaha sendiri	19,33	18,13	19,99	19,17	18,03	20,90	18,74	21,62	19,36
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	15,77	17,58	17,24	16,05	18,28	14,60	18,51	14,26	20,13
Berusaha dibantu buruh tetap	5,22	3,81	4,88	3,53	3,63	3,69	4,22	3,35	4,18
Buruh/karyawan/pegawai	43,19	38,78	37,97	41,12	39,06	42,93	37,26	42,87	39,49
Pekerja bebas di pertanian	1,15	1,70	1,67	1,33	1,90	1,03	0,82	0,79	1,20
Pekerja bebas di nonpertanian	4,64	5,52	3,32	5,41	4,03	4,83	4,65	4,45	3,54
Pekerja keluarga/tak dibayar	10,70	14,48	14,92	13,40	15,06	12,02	15,80	12,66	12,09
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan

Tingkat pendidikan mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di DIY pada Februari 2024 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah yaitu SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) sebesar 26,86 persen, diikuti oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 24,08 persen. Sementara itu, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebanyak 16,41 persen, yang mencakup 13,64 persen dengan tingkat pendidikan Universitas dan 2,77 persen dengan tingkat pendidikan Diploma I/II/III.

Perbaikan kualitas penduduk bekerja ditunjukkan oleh meningkatnya penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi. Dalam setahun terakhir, peningkatan terbesar terjadi pada tenaga kerja dengan pendidikan SMK yaitu sebesar 2,96 persen poin, diikuti tenaga kerja dengan pendidikan Universitas yang naik sebesar 1,76 persen poin. Semakin tinggi tingkat pendidikan, seseorang cenderung memiliki keahlian dan produktivitas yang tinggi dalam bekerja sehingga lebih siap dan mampu bersaing dalam dunia kerja.



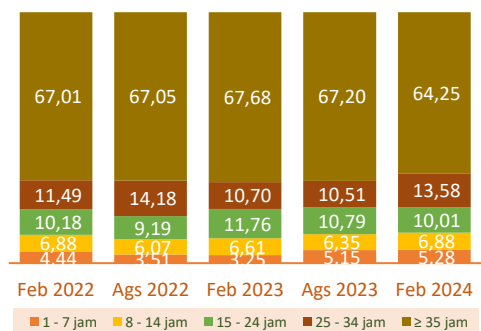
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di DIY, 2022–2024

Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja

Indikator lainnya yang cukup menarik untuk dikaji menyangkut produktivitas tenaga kerja adalah rata-rata lama bekerja (jam kerja) dalam seminggu. Semakin tinggi jam kerja, maka pendapatan atau upah/gaji cenderung semakin tinggi. Berdasarkan jam kerja, pekerja dapat dibedakan menjadi dua yaitu pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi.

Berdasarkan proporsi penduduk bekerja menurut jam kerja, sebagian besar penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu), mencapai 64,25 persen pada Februari 2024, turun 3,43 persen poin dibandingkan Februari 2023. Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan waktu kerja kurang dari 35 jam seminggu disebut sebagai pekerja tidak penuh. Pekerja tidak penuh di DIY pada Februari 2024 mencapai 35,75 persen. Jika dilihat lebih rinci, masih terdapat 5,28 persen penduduk yang bekerja 1-7 jam seminggu dan 6,88 persen penduduk bekerja 8-14 jam seminggu. Kelompok dengan jumlah jam kerja rendah ini pada umumnya adalah pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga serta pekerja paruh waktu.



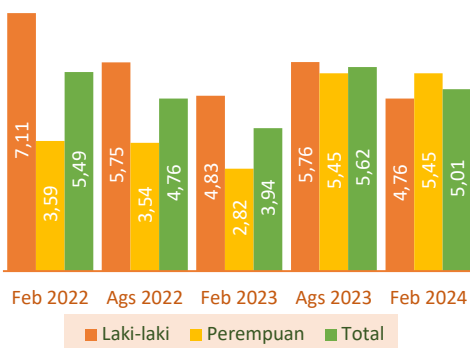
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Seminggu di DIY, 2022–2024

Setengah Pengangguran

Pekerja tidak penuh dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pekerja paruh waktu (tidak berusaha mencari pekerjaan lain) dan pekerja setengah pengangguran (seseorang yang masih mau bekerja apabila ada tawaran pekerjaan lain). Tingkat setengah pengangguran di DIY pada Februari 2024 sebesar 5,01 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 penduduk yang bekerja terdapat sekitar 5 orang yang termasuk setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran yang cukup signifikan mencerminkan adanya keinginan tenaga kerja untuk meningkatkan jam kerja atau mendapatkan penghasilan tambahan.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat setengah pengangguran perempuan pada Februari 2024 lebih tinggi daripada laki-laki. Tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 5,45 persen dan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 4,67 persen. Dibandingkan Februari 2023, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,16 persen poin, sedangkan tingkat pengangguran perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,62 persen poin.



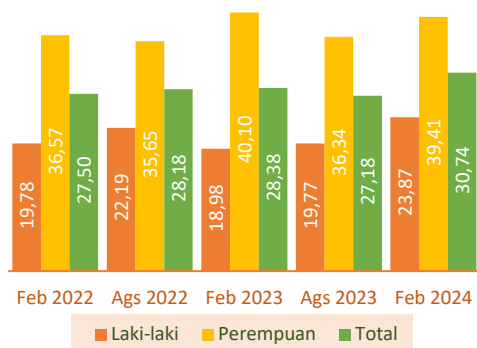
Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.5 Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Jenis Kelamin (persen) di DIY, 2022–2024

Pekerja Paruh Waktu

Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, tetapi tidak mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain. Tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2024 sebesar 30,73 persen, meningkat 2,35 persen poin dibanding Februari 2023. Peningkatan pekerja paruh waktu ini dapat mencerminkan kebutuhan fleksibilitas kerja di kalangan masyarakat, baik karena alasan pribadi maupun kondisi pasar kerja. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan adanya keterbatasan lapangan kerja penuh.

Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada Februari 2024, tingkat pekerja paruh waktu laki-laki sebesar 23,87 persen dan perempuan sebesar 39,41 persen. Dibandingkan Februari 2023, tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2024 untuk laki-laki mengalami peningkatan sebesar 4,89 persen poin sedangkan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,69 persen poin. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki sebagai pencari nafkah berusaha meningkatkan penghasilannya dengan jam kerja yang lebih memadai.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas

Gambar 6.6 Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen) di DIY, 2022–2024

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Termasuk dalam kategori pengangguran adalah penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin/putus asa mendapatkan (*discouraged workers*) dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (*future starts*). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT digunakan untuk memonitoring dan mengevaluasi indikator ketenagakerjaan dalam pembangunan. Peningkatan TPT menggambarkan adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau kecepatan laju pertumbuhan kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Perkembangan TPT DIY selama periode 2010-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif. TPT DIY pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,24 persen. Secara umum, angka tersebut memberi gambaran bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3-4 orang yang menganggur. Apabila dibandingkan dengan Februari 2023, TPT DIY pada Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin. Kondisi ini menunjukkan kegiatan perekonomian di DIY sudah kembali normal kembali pasca pandemi Covid-19. Hal ini terlihat dari TPT Februari 2024 sudah lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2020 (sebelum pandemi) yang mencapai 3,38 persen.

Tabel 6.4 TPT Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal di DIY (persen), 2010–2024

Bulan/ Tahun	Jenis Kelamin			Tipe Daerah		
	L	P	L+P	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Feb 10	7,10	4,63	6,02	7,42	4,21	6,02
Agu 10	6,19	5,08	5,69	6,97	4,01	5,69
Feb 11	6,27	4,64	5,53	5,86	4,90	5,53
Agu 11	4,14	4,55	4,32	5,13	2,86	4,32
Feb 12	4,91	2,76	3,95	4,84	2,36	3,95
Agu 12	3,96	3,74	3,86	4,73	2,37	3,86
Feb 13	3,22	4,37	3,73	4,45	2,47	3,73
Agu 13	3,59	2,81	3,24	3,93	2,04	3,24
Feb 14	2,67	1,60	2,16	2,68	1,24	2,16
Agu 14	3,88	2,65	3,33	4,00	2,17	3,33
Feb 15	5,23	2,59	4,07	5,30	0,95	4,07
Agu 15	3,72	4,54	4,07	4,55	3,02	4,07
Feb 16	3,56	1,90	2,81	3,54	1,32	2,81
Agu 16	3,68	1,50	2,72	2,79	2,55	2,72
Feb 17	2,86	2,81	2,84	3,56	1,20	2,84
Agu 17	3,46	2,48	3,02	3,61	1,66	3,02
Feb 18	2,88	3,28	3,06	3,93	1,06	3,06
Agu 18	3,32	3,44	3,35	4,07	1,60	3,35
Feb 19	2,83	2,89	2,86	3,53	1,12	2,86
Agu 19	3,18	3,09	3,14	3,78	1,52	3,14
Feb 20	3,92	2,70	3,38	4,16	1,40	3,38
Agu 20	5,37	3,64	4,57	5,43	2,18	4,57
Feb 21	4,17	4,41	4,28	4,79	2,96	4,28
Agu 21	5,28	3,67	4,56	5,44	2,21	4,56
Feb 22	3,54	3,95	3,73	4,06	2,94	3,73
Agu 22	3,90	4,27	4,06	4,78	2,06	4,06
Feb 23	3,48	3,70	3,58	3,90	2,75	3,58
Agus 23	4,05	3,24	3,69	4,19	2,33	3,69
Feb 24	3,18	3,31	3,24	3,45	2,65	3,24

Catatan: Tahun 2010-2019 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2010

Tahun 2020-2021 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015

Tahun 2022-2024 menggunakan penimbang proyeksi penduduk hasil SP2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Fluktuasi perubahan TPT antar periode sangat terkait dengan kondisi perekonomian DIY secara makro, terutama laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika perekonomian melambat atau mengalami resesi dan daya beli menurun, maka TPT cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami ekspansi dan daya beli penduduk meningkat, maka TPT cenderung menurun.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT di daerah perkotaan pada Februari 2024 sebesar 3,45 persen, sedangkan TPT di daerah perdesaan sebesar 2,65 persen. Relatif rendahnya TPT perdesaan menunjukkan bahwa angkatan kerja di daerah perdesaan lebih mudah masuk ke dalam pasar kerja. Hal ini terjadi karena pada umumnya mereka kurang selektif dalam menentukan jenis pekerjaan dan terbatasnya kesempatan kerja formal di perdesaan dibandingkan perkotaan. Artinya, mereka akan menerima jenis pekerjaan apa saja termasuk bekerja di sektor informal, bekerja pada lapangan usaha di sektor pertanian, bahkan meski statusnya hanya sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar. Fenomena migrasi angkatan kerja baru pada kelompok terdidik dari daerah perdesaan menuju daerah perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan upah yang diharapkan juga memberi pengaruh terhadap perbedaan level TPT di kedua wilayah. Sementara, angkatan kerja baru di daerah perkotaan lebih selektif dalam memilih lapangan usaha dan jenis pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan maupun tingkat upah yang diharapkan. Lamanya waktu dalam mencocokkan jenis pekerjaan inilah yang mendorong TPT daerah perkotaan menjadi lebih tinggi, khususnya jenis pengangguran yang bersifat friksional.

Perbandingan TPT menurut jenis kelamin menunjukkan pola yang cukup dinamis. Terkadang, TPT laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, namun ada kalanya TPT perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Pada Februari 2024, TPT laki-laki di DIY tercatat sebesar 3,18 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan TPT perempuan yang mencapai 3,31 persen. Dibandingkan dengan Februari 2023, TPT untuk kedua kelompok ini mengalami penurunan. TPT laki-laki turun sebesar 0,30 persen poin, sementara TPT perempuan turun sebesar 0,40 persen poin. Penurunan ini mengindikasikan perbaikan di pasar tenaga kerja DIY, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Meski demikian, perbedaan kecil antara TPT laki-laki dan perempuan bisa menunjukkan adanya faktor lain, seperti preferensi kerja atau ketersediaan jenis pekerjaan tertentu, yang memengaruhi tingkat pengangguran di kedua kelompok.

Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Februari 2024, TPT untuk jenjang Sekolah Menengah Umum (SMU) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lainnya sebesar 6,13 persen. TPT tertinggi kedua yaitu pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 4,21 persen diikuti TPT tamatan Diploma I/II/III sebesar 3,87 persen dan TPT universitas sebesar 3,43 persen. Sementara TPT paling rendah adalah pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 1,10 persen dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,91 persen. Hal ini masih terjadi permasalahan titik temu antara penawaran tenaga kerja (lebih selektif) terutama pada tingkat pendidikan SMA, SMK, maupun perguruan tinggi, sementara untuk pendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja.

Bab

VII



Indikator Konsumsi Penduduk

Indikator Konsumsi Penduduk

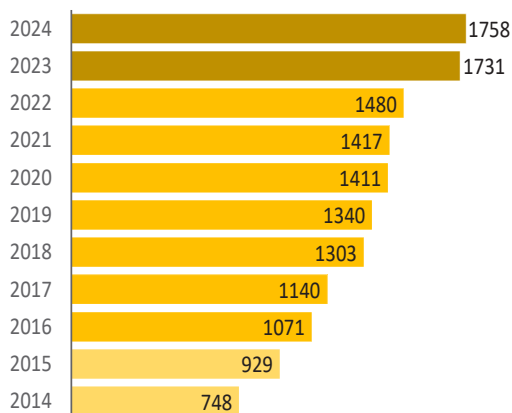
Salah satu ukuran ekonomi yang merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah secara kuantitatif adalah level pendapatan yang diterima rumah tangga. Semakin tinggi level pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin meningkat. Sebaliknya, semakin rendah level pendapatan menggambarkan kesejahteraan yang semakin memburuk. Namun demikian, dalam operasional di lapangan untuk mendapatkan data pendapatan rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Kesadaran dan keterbukaan rumah tangga selaku responden/narasumber untuk memberikan informasi data pendapatan yang sebenarnya masih kurang. Akibatnya, data pendapatan rumah tangga sering kali *under-estimate*. Oleh karena itu, digunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi (*consumption approach*) untuk mengukur taraf pendapatan rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi per kapita penduduk beserta polanya, konsumsi kalori, dan protein. Perbandingan level konsumsi per kapita penduduk antarwilayah menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah. Demikian pula pertumbuhan konsumsi per kapita antarwaktu, akan menggambarkan adanya peningkatan atau penurunan kesejahteraan penduduk. Pola konsumsi penduduk sangat rentan dipengaruhi oleh faktor tingkat harga relatif, perubahan harga (inflasi/deflasi) dari komoditas yang dikonsumsi, faktor sosial budaya, dan perilaku lingkungan. Budaya setempat dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada sekelompok masyarakat. Indikator pola konsumsi dapat diukur menggunakan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk komoditas makanan dan nonmakanan.

Pengeluaran Konsumsi Per kapita Penduduk

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Bulan Maret 2014-2024, nilai nominal pengeluaran per kapita penduduk DIY terlihat semakin meningkat. Pengeluaran per kapita dicatat dalam bentuk nilai nominal dan belum menggambarkan nilai riil, karena belum dikoreksi dengan unsur perubahan harga (inflasi). Nilai pengeluaran per kapita penduduk DIY pada kondisi Maret 2014 berada pada level Rp748,- ribu. Nilai nominal pengeluaran per kapita ini terus

Perbandingan konsumsi penduduk antarwilayah mampu menggambarkan tingkat kesejahteraan secara rata-rata, sementara perubahan konsumsi penduduk antarwaktu menggambarkan peningkatan atau penurunan kesejahteraan.

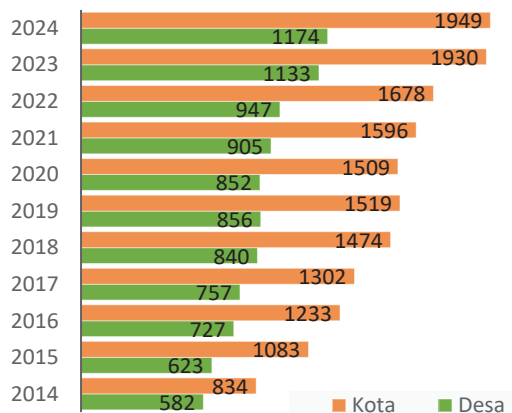


Gambar 7.1. Pengeluaran Per kapita Penduduk DIY, 2014-2024 (000 Rp)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2014-2024, BPS DIY

meningkat hingga ke level Rp1.758,00 ribu di tahun 2024. Peningkatan ini secara umum menggambarkan kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik. Syaratnya adalah peningkatan tersebut dinikmati atau dirasakan oleh semua lapisan penduduk secara merata. Selama periode 2014-2024, pengeluaran per kapita nominal penduduk DIY secara rata-rata tumbuh sebesar 9,17 persen per tahun.

Perbandingan pengeluaran per kapita menurut wilayah menunjukkan gap yang masih lebar. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk perkotaan selalu lebih tinggi dari perdesaan. Pada kondisi Maret 2024, pengeluaran per kapita di wilayah perkotaan mencapai Rp1,94 juta sebulan. Sementara, pengeluaran perkapita di perdesaan hanya Rp1,17 juta sebulan. Perbedaan level ini menggambarkan kesejahteraan penduduk perkotaan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Adanya gap pengeluaran yang cukup besar menuntut peran pemerintah untuk lebih fokus dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di kawasan perdesaan. Kebijakan pembangunan yang dilakukan harus lebih berorientasi ke upaya pemerataan sampai

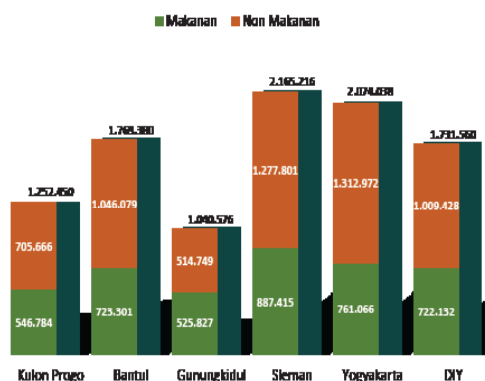


Gambar 7.2. Pengeluaran Per kapita menurut Wilayah di DIY, 2014-2024 (000 Rp)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2014-2024, BPS DIY

wilayah pinggiran dan perdesaan, tidak sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Produktivitas pertanian harus terus ditingkatkan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perdesaan. Harapannya adalah pendapatan maupun konsumsi penduduk perdesaan akan meningkat dan *gap* ketimpangan antarwilayah akan semakin mengecil.

Menurut data Susenas Maret 2023, rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman sebesar Rp2,16 juta sebulan. Artinya, kesejahteraan



Gambar 7.3. Rata-rata Pengeluaran Per kapita Kabupaten/Kota di DIY, 2023 (Rp)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY
Data tahun 2024 belum tersedia

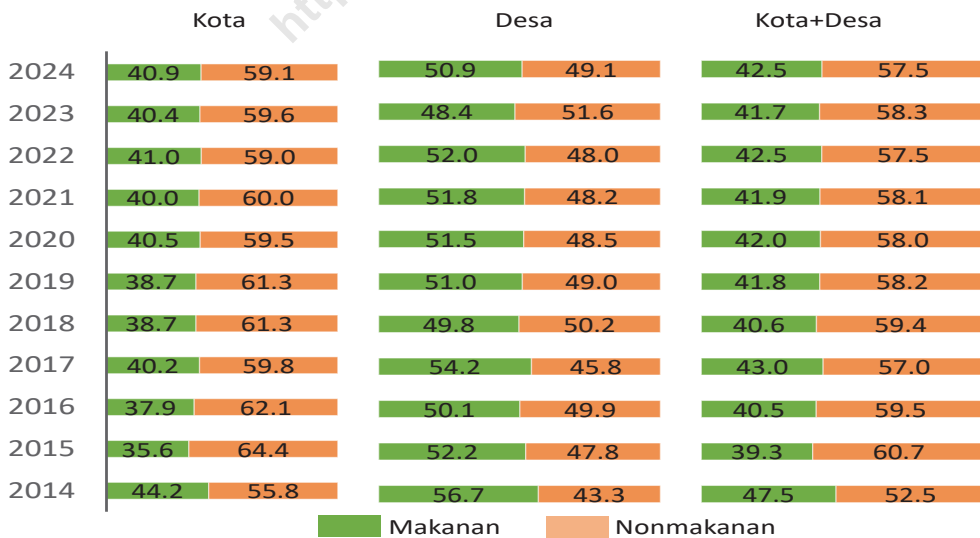
penduduk di Kabupaten Sleman relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berikutnya adalah Kota Yogyakarta dengan rata-rata pengeluaran sebesar Rp2,07 juta sebulan. Sementara, pengeluaran per kapita terendah terjadi di Gunungkidul (GK) sebesar Rp1,04 juta sebulan.

Komposisi Pengeluaran Penduduk

Jenis pengeluaran dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni komoditas makanan dan nonmakanan. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin tinggi level pendapatan yang diterima oleh penduduk atau rumah tangga, maka akan semakin besar proporsi pengeluaran untuk kelompok nonmakanan. Sebaliknya, proporsi pengeluaran kelompok makanan akan cenderung menurun. Selama satu dekade terakhir, komposisi pengeluaran penduduk DIY sudah didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas nonmakanan. Komposisi pengeluaran untuk komoditas nonmakanan pada kondisi Maret 2024 mencapai 57,5 persen. Komposisi ini berfluktuasi namun

cenderung meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Sementara, proporsi pengeluaran untuk komoditas makanan hanya tercatat sebesar 42,5 persen. Komposisi pengeluaran untuk kelompok makanan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Fenomena ini secara kasar menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk DIY yang semakin membaik.

Komposisi pengeluaran per kapita nonmakanan di wilayah perkotaan terlihat lebih dominan selama periode 2014-2024. Proporsi pengeluaran per kapita nonmakanan di perkotaan sudah mencapai 59,1 persen pada kondisi Maret 2024. Sementara, pengeluaran per kapita makanan proporsinya hanya sebesar 40,4 persen dan cenderung menurun. Komposisi pengeluaran per kapita di wilayah perdesaan masih relatif berfluktuasi dan komposisinya hampir berimbang antara kelompok makanan dan nonmakanan. Kadang-kadang kelompok makanan lebih dominan, namun di saat yang lain konsumsi kelompok makanan lebih dominan tergantung pada



Gambar 7.4. Komposisi Pengeluaran Perkapita Sebulan Makanan dan Bukan Makanan Menurut Wilayah di DIY, 2024 (Persen)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

perubahan harga komoditas. Pada kondisi Maret 2024, proporsi pengeluaran makanan di perdesaan mencapai 50,9 persen dan pengeluaran nonmakanan mencapai 49,1 persen.

Pola Pengeluaran menurut Desil

Pola konsumsi penduduk juga bisa dikaji berdasarkan golongan pengeluaran penduduk yang dikelompokkan menurut desil (kelompok 10 persen populasi yang telah diurutkan pengeluarannya). Berdasarkan hasil Susenas pada kondisi Maret 2022 dan 2023, terlihat bahwa nilai rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan maupun kelompok nonmakanan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran atau desil.

Rata-rata pengeluaran per kapita 2023 kelompok makanan pada desil ke-1 atau 10 persen penduduk berpendapatan terendah mencapai Rp287,00 ribu sebulan. Sementara, pengeluaran nonmakanannya mencapai Rp 195,00 ribu sebulan. Pada

desil ke-10 atau 10 persen penduduk berpendapatan tertinggi, rata-rata pengeluaran kelompok makanan mencapai Rp2,04 juta sebulan dan kelompok nonmakanan sebesar Rp5,15 juta sebulan.

Secara proporsional, rata-rata pengeluaran kelompok makanan cenderung menurun seiring dengan peningkatan desil. Sementara, proporsi pengeluaran nonmakanan justru semakin meningkat seiring dengan peningkatan desil pengeluaran. Pada desil ke-1, proporsi pengeluaran kelompok makanan mencapai 59,52 persen dan kelompok nonmakanan sebesar 40,48 persen. Sebaliknya, pada desil ke-10 proporsi pengeluaran kelompok makanan mencapai 28,35 persen dan kelompok nonmakanan mencapai 71,65 persen.

Pola Konsumsi Makanan dan Nonmakanan

Andil konsumsi kelompok makanan terhadap total pengeluaran per kapita penduduk selama sebulan terlihat relatif

Tabel 7.1. Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Desil dan Kelompok di DIY, 2022-2023

Desil	2022					2023				
	Non Makanan		Makanan		Jumlah	Non Makanan		Makanan		Jumlah
	Rata-rata	%	Rata-rata	%		Rata-rata	%	Rata-rata	%	
1	165 435	(40,39)	244 118	(59,61)	409 553	195.831	40,48	287.984	59,52	483.815
2	210 810	(38,21)	340 924	(61,79)	551 733	274.570	41,72	383.571	58,28	658.141
3	264 227	(40,07)	395 141	(59,93)	659 369	349.125	43,89	446.400	56,11	795.525
4	317 977	(41,95)	439 956	(58,05)	757 933	422.892	45,72	502.047	54,28	924.939
5	381 952	(43,71)	491 867	(56,29)	873 819	522.527	47,97	566.692	52,03	1.089.219
6	502 269	(48,69)	529 352	(51,31)	1 031 621	654.405	50,17	650.054	49,83	1.304.459
7	621 747	(48,85)	651 116	(51,15)	1 272 863	841.187	52,46	762.244	47,54	1.603.431
8	859 005	(53,46)	747 879	(46,54)	1 606 884	1.160.836	56,16	906.331	43,84	2.067.167
9	1 330 336	(58,35)	949 733	(41,65)	2 280 068	1.995.431	61,46	1.251.243	38,54	3.246.674
10	3 860 859	(72,04)	1 498 438	(27,96)	5 359 297	5.157.908	71,65	2.040.551	28,35	7.198.459
Jml	851 530	(57,52)	628 845	(42,48)	1 480 374	1.009.428	58,3	722.132	41,7	1.731.560

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022-2023, BPS DIY
Data tahun 2024 belum tersedia

Tabel 7.2. Komposisi Konsumsi Per Kapita menurut Komoditas di DIY, 2020-2024 (%)

Komoditas	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Padi-Padian	3,71	4,00	3,87	3,91	4,57
Umbi-Umbian	0,34	0,44	0,46	0,38	0,35
Ikan	1,65	1,87	1,79	1,59	1,42
Daging	1,94	2,17	2,37	2,08	2,13
Telur dan Susu	2,96	2,96	2,92	2,64	2,88
Sayur-Sayuran	2,82	3,53	3,30	3,18	3,27
Kacang-Kacangan	0,89	1,05	1,03	1,08	1,08
Buah-Buahan	2,33	2,16	2,55	2,31	2,63
Minyak dan Kelapa	0,92	1,08	1,24	1,02	1,01
Bahan Minuman	1,38	1,53	1,52	1,37	1,50
Bumbu-Bumbuan	0,61	0,76	0,82	0,76	0,77
Konsumsi Lainnya	0,67	0,79	0,89	0,79	0,84
Makanan Jadi	17,65	16,11	15,99	16,84	13,58
Rokok	3,15	3,50	3,73	3,77	4,14
Makanan	41,03	41,94	42,48	41,7	40,16
Perumahan	24,88	26,52	27,98	26,9	29,1
Aneka Barang Jasa	15,77	16,71	15,28	15,44	16,59
Pakaian, Alas Kaki	2,84	2,10	1,92	2,12	2,11
Barang tahan lama	8,76	6,82	5,92	6,43	5,31
Pajak dan Asuransi	3,70	4,72	5,19	4,38	4,76
Pesta dan Upacara	2,12	1,19	1,23	3,03	1,97
Non Makanan	58,97	58,06	57,52	58,3	59,84

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2020-2024, BPS DIY

stabil pada level 40 persen. Konsumsi per kapita menurut jenis komoditas makanan selama periode 2020-2024 mempunyai pola yang hampir sama. Meskipun demikian, besaran/proporsi setiap kelompok komoditas berfluktuasi setiap tahun.

Pengeluaran per kapita kelompok makanan yang terbesar digunakan untuk konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi. Proporsi selama tahun 2020-2024 berkisar antara **13-18** persen terhadap total konsumsi per kapita sebulan dan cenderung berfluktuasi. Fluktuasi konsumsi komoditas makanan dan minuman jadi didorong oleh konsumsi penduduk di wilayah perkotaan, terutama yang mereka berstatus indekost/sewa/kontrak seperti mahasiswa dan para

pelajar. Pada umumnya, mereka tidak melakukan aktivitas memasak sendiri dan lebih memilih membeli makanan dan minuman jadi. Selain itu, peningkatan proporsi penduduk pada kelas pendapatan menengah ke atas juga memiliki andil cukup besar terhadap konsumsi makanan dan minuman jadi.

Konsumsi untuk kelompok padi-padian juga tercatat masih cukup besar, karena sumber makanan pokok penduduk adalah beras. Namun demikian, proporsinya cenderung berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh perubahan orientasi konsumsi makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2024, andil kelompok padi-padian tercatat sebesar 4,57 persen terhadap total konsumsi per kapita sebulan. Andil konsumsi terbesar berikutnya adalah kelompok komoditas sayur-sayuran, telur dan susu, buah-buahan, daging serta rokok dan tembakau dengan proporsi antara 2 sampai 5 persen. Sementara, proporsi untuk konsumsi kelompok komoditas lainnya bervariasi dengan level di bawah 2 persen dari total konsumsi sebulan penduduk DIY.

Komposisi pengeluaran kelompok nonmakanan cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 proporsinya mencapai 59,84 persen. Selama lima tahun terakhir, pengeluaran nonmakanan didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga. Besarnya proporsi kelompok ini bervariasi antara 24-30 persen dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Komposisi pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk kelompok aneka barang dan jasa (termasuk pendidikan dan kesehatan). Proporsi pengeluaran untuk barang tahan lama mencapai 5,31 persen. Proporsi

ini turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketika pendapatan meningkat, maka konsumsi penduduk terhadap barang tahan lama seperti elektronik, meubelair, peralatan komunikasi, perabot, perhiasan, dan lainnya juga akan semakin meningkat. Sementara, proporsi pengeluaran untuk kelompok yang lainnya (pakaian, pajak, dan pesta) bervariasi di bawah 5 persen. Perubahan komposisi pengeluaran penduduk menurut komoditas sangat dipengaruhi oleh tingkat harga komoditas, pendapatan yang diterima penduduk, serta karakteristik sosial ekonomi lainnya.

Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia ditetapkan masing-masing sebesar 2.150 kkal dan 57 gram protein.

Rata-rata energi atau kalori yang dikonsumsi oleh penduduk DIY selama periode 2017-2024 berfluktuasi antara 2.015 kkal sampai 2.254 kkal per kapita sehari. Jika mengacu pada standar kecukupan kebutuhan minimum energi

Tabel 7.3. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Sehari menurut Wilayah di DIY, 2017-2024 (Persen)

Tahun	Energi (kkal)			Protein (gram)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	2 259	2 243	2 254	72,76	62,73	69,78
2018	2 251	2 151	2 224	73,20	62,02	70,18
2019	2 231	2 119	2 201	73,26	62,81	70,43
2020	2 169	2 086	2 147	71,69	61,55	68,95
2021	2 155	2 113	2 144	67,30	59,36	65,25
2022	2 067	1 898	2 024	65,43	54,50	62,65
2023	2 057	2 039	2 053	65,72	57,98	63,78
2024	2 036	1 952	2 015	64,85	54,53	62,32

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2017-2024, BPS DIY

yang sebesar 2.150 kkal per kapita sehari, maka rata-rata konsumsi energi penduduk DIY mulai tahun 2017 sudah berada di atas standar yang ditentukan. Namun, rata-rata energi yang dikonsumsi penduduk pada kondisi Maret 2024 hanya sebesar 2.015 kkal (di bawah standar kecukupan) sehari dan menurun jika dibandingkan dengan Maret tahun 2023 yang sebesar 2.053 kkal sehari.

Secara umum, konsumsi energi per kapita sehari penduduk di wilayah perdesaan DIY selalu lebih rendah dari konsumsi energi penduduk perkotaan. Konsumsi energi per kapita penduduk perkotaan selama 2024 tercatat sebesar 2.036 kkal sehari. Sementara, konsumsi energi penduduk perdesaan sebesar 1.952 kkal sehari. Perbedaan tingkat konsumsi energi ini dipengaruhi oleh kuantitas atau jumlah komoditas makanan yang dikonsumsi oleh penduduk perkotaan yang lebih banyak. Selain itu, jenis komoditas makanan yang dikonsumsi penduduk perkotaan juga lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan.

Tabel 7.4. Konsumsi Energi Per Kapita Sehari (kkal) menurut Kelompok di DIY, 2022-2024

Kelompok Makanan	2022		2023		2024	
	kkal	%	kkal	%	kkal	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Padi-Padian	687	33,9	677	32,9	652	32,36
Umbi-Umbian	36	1,77	32,53	1,58	29,99	1,49
Ikan	25	1,22	23,69	1,15	21,77	1,08
Daging	86	4,25	88,76	4,32	85,17	4,23
Telur dan Susu	73	3,60	69,08	3,37	68,77	3,41
Sayur-Sayuran	43	2,10	41,83	2,04	38,79	1,93
Kacang-Kacangan	65	3,20	66,63	3,25	63,22	3,14
Buah-Buahan	60	2,95	57,89	2,82	53,98	2,68
Minyak & Kelapa	238	11,8	254	12,4	259,4	12,87
Bahan Minuman	118	5,8	106,3	5,18	102,8	5,10
Bumbu-Bumbuan	10	0,48	8,93	0,44	7,73	0,38
Lainnya	62	3,06	59,29	2,89	56,53	2,81
Makanan Jadi	523	25,8	567	27,6	574,9	28,53
Jumlah	2 024	100	2 053	100	2 015	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022-2024, BPS DIY

Sumber utama energi yang dikonsumsi oleh penduduk DIY sebagian besar berasal dari kelompok makanan jadi dan padi-padian. Selama 3 tahun terakhir, sumber energi dari kelompok makanan jadi cenderung menurun, sementara kelompok padi-padian cenderung meningkat. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola konsumsi penduduk akibat meningkatnya tingkat pendapatan maupun perubahan gaya hidup pada kelas menengah ke atas. Fenomena ini cukup selaras dengan perkembangan aktivitas kuliner dan restoran yang terlihat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada kondisi Maret 2024, rata-rata konsumsi energi per kapita sehari dari kelompok padi-padian mencapai 652 kkal dan memberi sumbangan sebesar 32,36 persen. Sementara, konsumsi energi dari komoditas makanan jadi mencapai 574,9 kkal dan memberi andil sebesar 28,53

persen terhadap total konsumsi energi. Jenis komoditas padi-padian yang paling besar sumbangannya adalah beras. Sumber energi terbesar berikutnya berasal dari kelompok kelompok minyak dan kelapa dengan andil 12,87 persen serta bahan minuman dengan andil 5,10 persen. Kelompok komoditas yang lainnya memberi andil konsumsi energi dengan besaran yang bervariasi kurang dari 5 persen. Pada tahun 2024, hampir semua konsumsi kelompok makanan mengalami penurunan kecuali kelompok minyak dan kelapa yang naik dari 254 kkal (12,4 persen) pada tahun 2023 menjadi 259,4 kkal (12,87 persen) pada tahun 2024.

Konsumsi protein penduduk DIY selama periode 2017-2024 menunjukkan kecenderungan yang semakin berfluktuatif. Konsumsi protein per kapita penduduk DIY sudah melebihi standar minimum yang ditentukan oleh Permenkes RI yakni 57 gram sehari. Bahkan, pada tahun 2019 konsumsi protein per kapita sudah berada di atas level 70,43 gram sehari.

Berdasarkan wilayah, konsumsi protein per kapita penduduk perkotaan tercatat selalu lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Hal ini terjadi karena konsumsi kelompok makanan yang menjadi sumber protein penduduk perkotaan sudah lebih bervariasi dibandingkan dengan konsumsi penduduk perdesaan. Konsumsi protein per kapita sehari penduduk perkotaan pada tahun 2024 mencapai 64,85 gram sehari. Sementara, konsumsi penduduk perdesaan mencapai 54,53 gram sehari. Angka ini memberi gambaran bahwa pada tahun 2024 konsumsi protein secara rata-rata sudah melebihi angka kecukupan minimum yang ditentukan yakni 57 gram sehari. Namun jika dibedakan per wilayah (desa dan kota) masih ada penduduk desa

secara rata-rata yang konsumsi proteinnya dibawah kecukupan minimum.

Sumber utama protein yang dikonsumsi penduduk DIY berasal dari kelompok makanan dan minuman jadi serta kelompok padi-padian. Rata-rata konsumsi protein per kapita kelompok makanan dan minuman jadi pada tahun 2024 sebesar 21,98 gram sehari dan memberi andil sebesar 35,2 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari sumber makanan jadi memiliki kecenderungan yang semakin menurun dalam beberapa tahun terakhir.

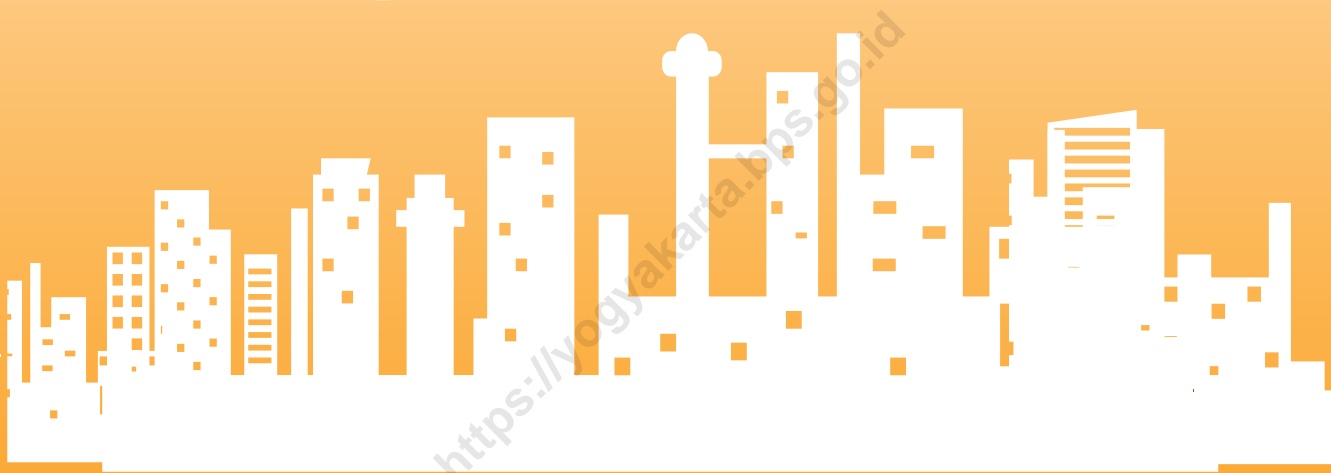
Tabel 7.5. Konsumsi Protein Per Kapita Sehari (Gram) menurut Kelompok di DIY, 2022-2024

Kelompok Makanan	2022		2023		2024	
	Gram	%	Gram	%	Gram	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
Padi-Padian	16,17	25,8	15,95	25,0	15,38	24,7
Umbi-Umbian	0,38	0,60	0,32	0,50	0,28	0,45
Ikan	4,24	6,77	4,07	6,38	3,69	5,92
Daging	5,22	8,33	5,35	8,39	5,09	8,17
Telur dan Susu	4,18	6,68	3,98	6,24	3,92	6,29
Sayur-Sayuran	2,61	4,16	2,57	4,03	2,39	3,83
Kacang-Kacangan	6,34	10,1	6,55	10,3	6,19	9,93
Buah-Buahan	0,65	1,03	0,63	0,99	0,63	1,01
Minyak & Kelapa	0,25	0,40	0,25	0,39	0,26	0,42
Bahan Minuman	1,11	1,77	1,14	1,79	1,09	1,75
Bumbu-Bumbuan	0,36	0,61	0,37	0,58	0,33	0,53
Lainnya	1,19	1,90	1,12	1,76	1,1	1,76
Makanan Jadi	19,93	31,8	21,48	33,7	21,98	35,2
Jumlah	65,25	100	63,78	100	62,33	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022-2024, BPS DIY

Sementara, rata-rata konsumsi protein per kapita dari kelompok padi-padian tercatat sebesar 15,38 gram atau memberi andil 24,7 persen terhadap total konsumsi protein. Konsumsi protein dari kelompok padi-padian cenderung menurun persentasenya dalam beberapa tahun terakhir. Sumber terbesar berikutnya berasal dari konsumsi kelompok kacang-kacangan dengan nilai konsumsi 6,19 gram atau memberi andil 9,93 persen; kelompok telur dan susu sebesar 3,92 gram atau memiliki andil 6,29 persen; kelompok daging sebesar 5,09 gram dengan andil 8,17 persen; serta kelompok ikan sebesar 3,69 gram atau memiliki andil 5,92 persen. Konsumsi protein dari keempat kelompok ini cenderung meningkat. Andil konsumsi protein per kapita dari kelompok makanan yang lainnya bervariasi di bawah 5 persen. Selama tahun 2024, konsumsi per kapita semua kelompok makanan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 kecuali konsumsi per kapita Kelompok Minyak dan Kelapa yang mencapai 0,26 gram (0,42 persen) pada tahun 2024 dari 0,25 gram (0,39 persen) pada tahun 2023. Adapun konsumsi per kapita Kelompok Buah-buahan cenderung tetap yaitu 0,63 gram baik pada tahun 2023 maupun 2024.

Bab VIII



<https://yogyakarta.bps.go.id>

Indikator Perumahan dan Pemukiman

Indikator

Perumahan dan Pemukiman

Perumahan dan permukiman menjadi kebutuhan mendasar manusia selain pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Secara umum perumahan dimaknai sebagai permukiman, yaitu kumpulan rumah baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil dari upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Prasarana, sarana, dan fasilitas umum tersebut di antaranya meliputi penyediaan air minum, pembuangan sampah, tersedianya listrik, telepon, jalan, dan infrastruktur lainnya. Secara khusus, perumahan didefinisikan sebagai hunian tempat tinggal yang mempunyai fungsi dan peranan yang sangat strategis sebagai tempat berkumpul, berinteraksi, serta pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Terwujudnya kesejahteraan penduduk akan ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, tenang, dan nyaman.

Rumah memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal atau hunian, disamping sebagai sarana pembinaan keluarga. Di masa sekarang fungsi rumah sebagai tempat tinggal telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan status sosial pemiliknya. Meskipun demikian fungsi rumah sebagai sarana pembinaan keluarga tetap diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang optimal bagi penghuninya, yaitu tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2024, pemerintah memiliki beberapa target dan program pembangunan nasional bidang pemerintahan, di antaranya program sejuta rumah yang bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku pembangunan perumahan, pembangunan rumah layak huni dimana Kementerian PUPR menargetkan 70 persen rumah tangga di Indonesia menghuni rumah layak huni pada tahun 2024, Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) KPR yang bertujuan menyediakan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan (khususnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah), serta paket-paket rumah khusus (di antaranya rumah khusus bagi warga pejuang Timor-Timor di Kabupaten Kupang, rumah khusus MBR di

Pada tahun 2024, pemerintah memiliki beberapa target dan program pembangunan nasional bidang pemerintahan, di antaranya Program Sejuta Rumah (PSR), Pembangunan Rumah Layak Huni, Tapera KPR, dan Paket-paket Rumah Khusus untuk menyediakan rumah yang layak huni bagi masyarakat.

Magelang, dan hunian tetap pasca bencana di Sulawesi Tengah).

Pembangunan perumahan dan pemukiman memerlukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi secara periodik. Ketersediaan data maupun indikator bidang perumahan secara berkesinambungan sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan perumahan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Secara berkala, BPS telah melakukan pengumpulan data terkait dengan kondisi dan fasilitas tempat tinggal atau rumah melalui pendekatan rumah tangga dalam kegiatan Susenas. Meskipun masih terbatas, indikator tersebut diharapkan mampu menjadi informasi yang strategis.

STATUS KEPEMILIKAN RUMAH TINGGAL

Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap status kepemilikan bangunan tempat tinggal. Oleh karena itu status kepemilikan tempat tinggal bisa menjadi indikator kesejahteraan penduduk. Rumah tangga berpenghasilan tinggi cenderung memiliki kesempatan lebih

besar untuk memiliki bangunan tempat tinggal sendiri dibandingkan dengan rumah tangga berpenghasilan lebih rendah. Dalam kegiatan Susenas, status kepemilikan bangunan tempat tinggal dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu milik sendiri, sewa/kontrak, bebas sewa, dan dinas/lainnya. Rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, proporsi rumah tangga di DIY yang menempati tempat tinggal milik sendiri sebesar 83,48 persen dan sisanya menempati rumah bukan milik sendiri. Secara lebih dirinci, proporsi rumah tangga yang menempati rumah berstatus kontrak/sewa sebesar 6,39 persen, berstatus bebas sewa sekitar 9,73 persen, dan yang menempati rumah dinas/lainnya sebanyak 0,40 persen. Pola status kepemilikan tempat tinggal di DIY sendiri cukup fluktuatif. Meskipun demikian selama tujuh tahun terakhir secara rata-rata menunjukkan lebih

Tabel 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di DIY, 2018-2024 (Persen)

Tahun	Status Kepemilikan Tempat Tinggal			
	Milik Sendiri	Kontrak/ Sewa	Bebas Sewa	Rumah Dinas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	76,54	13,71	8,99	0,76
2019	73,29	17,53	8,80	0,37
2020	74,55	15,01	10,02	0,43
2021	76,53	13,98	9,33	0,17
2022	73,77	18,26	7,62	0,35
2023	86,43	6,08	7,24	0,25
2024	83,48	6,39	9,73	0,40

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2024, BPS DIY



Gambar 8.1. Proporsi Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2024 (Persen)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

dari 77 persen rumah tangga di DIY telah menempati rumah milik sendiri. Setiap satu rumah di DIY secara rata-rata dihuni oleh sekitar 1,14 keluarga. Dengan kata lain dalam setiap rumah ditinggali oleh lebih dari satu keluarga.

Berdasarkan wilayah administratif, di wilayah perdesaan sekitar 96 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri dan di wilayah perkotaan sekitar 80 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri. Wilayah perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi menarik minat kaum migran untuk datang dan mencari peluang usaha dan bekerja. Selain itu, jenjang pendidikan tinggi juga lebih banyak terdapat di perkotaan yang terkadang menyebabkan pelajar untuk indekost. Keterbatasan lahan dan mahalnya harga properti merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh para pendatang sehingga sewa rumah/kamar menjadi solusi untuk mengatasi masalah tempat tinggal bagi para migran tersebut. Proporsi rumah tangga yang menempati bangunan secara kontrak/kost di perkotaan mencapai lebih dari 8 persen.

Semua wilayah kabupaten dan kota di DIY didominasi oleh rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dengan proporsi terbesar di Kabupaten Kulon Progo yang mencapai 93,30 persen dan terendah di Kota Yogyakarta sebesar 51,44 persen. Selanjutnya rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa tertinggi di Kota Yogyakarta mencapai 22,66 persen dan diikuti oleh Kabupaten Sleman yang mencapai 6,73 persen. Sebagai wilayah yang memiliki banyak lembaga pendidikan dan juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, banyak penduduk migran di Kota Yogyakarta dan Sleman sehingga proporsi rumah tangga yang menempati rumah secara kontrak/sewa juga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

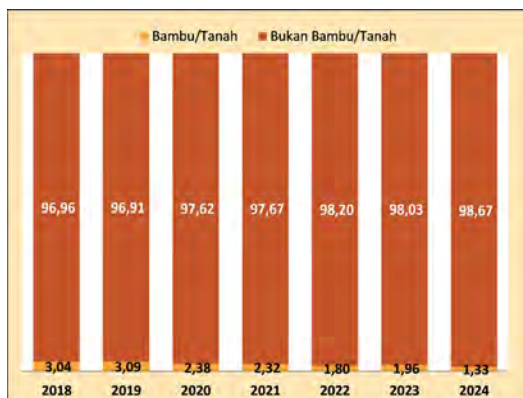
KONDISI BANGUNAN TEMPAT TINGGAL

Kualitas bangunan rumah atau tempat tinggal penduduk bisa dikaji dari kondisi bangunan secara fisik. Beberapa aspek yang dapat mencerminkan kondisi fisik tempat tinggal di antaranya adalah jenis dan luas lantai, jenis dinding, dan jenis atap. Semakin baik kualitas fisik rumah mencerminkan kualitas kesejahteraan penduduk yang juga semakin membaik. Sebaliknya, kesejahteraan penduduk yang rendah akan tercermin dari kualitas tempat tinggal yang kurang/belum layak.

Jenis Lantai Terluas dan Luas Lantai

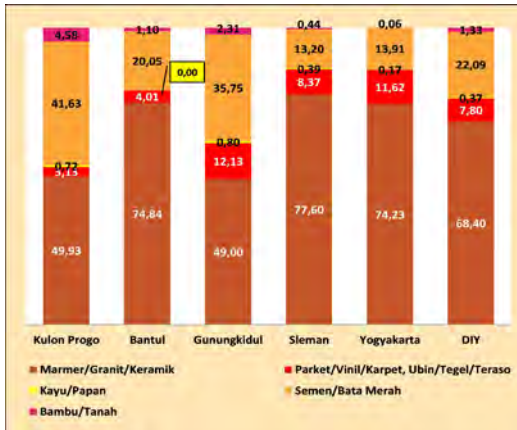
Jenis lantai yang ditempati rumah tangga bisa memiliki korelasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Semakin baik kondisi ekonomi atau semakin sejahtera rumah tangga maka jenis lantai rumah yang ditempati juga akan semakin berkualitas. Meskipun demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi preferensi rumah tangga dalam memilih jenis lantai tempat tinggal, seperti faktor budaya, kesadaran tentang rumah yang sehat, gaya hidup, dan lainnya.

Jenis lantai terluas dari bangunan tempat tinggal dalam kegiatan Susenas



Gambar 8.2. Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Lantai Bangunan Terluas di DIY, 2018-2024 (Persen)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2024, BPS DIY



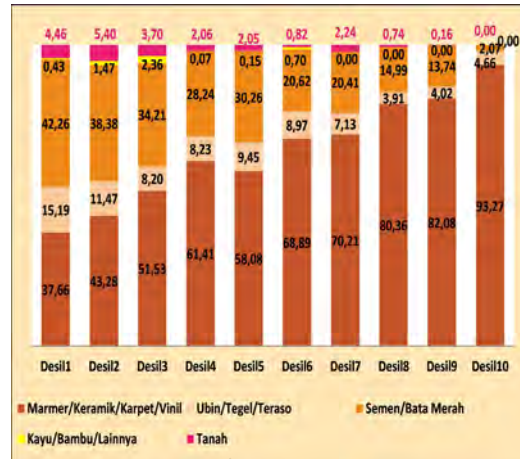
Gambar 8.3. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Wilayah di DIY, 2024 (Persen)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

dikategorikan menjadi beberapa jenis. Tingkatan atau kualitas lantai yang paling baik adalah lantai yang terbuat dari marmer/granit/keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, papan berkualitas tinggi, dan semen/bata merah. Sementara, jenis lantai yang lainnya seperti bambu, kayu/papan kualitas rendah, dan tanah merepresentasikan lantai dengan kualitas yang lebih rendah. Bahkan, rumah tangga yang menempati bangunan dengan lantai terluas dari tanah dianggap belum menempati rumah yang layak huni.

Berdasarkan hasil Susenas bulan Maret 2018-2024, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati rumah dengan jenis lantai terluas bukan tanah/bambu. Proporsi lantai terluas bukan tanah/bambu pada kondisi Maret 2024 mencapai 98,67 persen dan sisanya menempati bangunan dengan jenis lantai bambu/tanah. Hal ini merupakan gambaran adanya perbaikan kualitas rumah dan juga kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan untuk bangunan yang menjadi tempat tinggal penduduk DIY.

Jika dilihat menurut jenis lantai terluas, pada kondisi Maret 2024 sebagian besar



Gambar 8.4. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas Tempat Tinggal dan Desil Pengeluaran Per Kapita di DIY, 2023 (Persen)

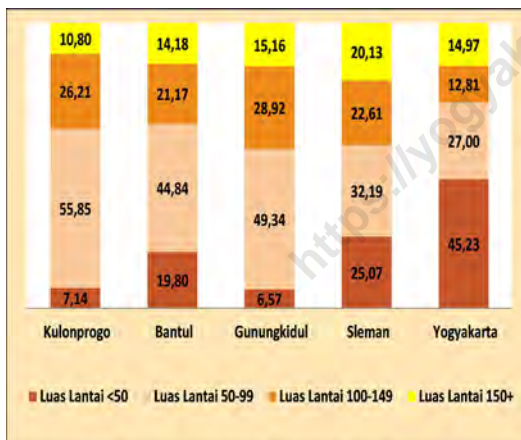
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

rumah tangga di DIY menempati rumah dengan jenis lantai terluas dari keramik/marmer/granit. Proporsinya pengguna lantai keramik/marmer/granit mencapai 68,40 persen. Komposisi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah dan parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso dengan proporsi masing-masing sebesar 22,09 persen dan 7,80 persen. Data tersebut memberi gambaran bahwa mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati tempat tinggal dengan jenis lantai yang sudah layak. Sementara, rumah tangga yang menempati lantai yang belum layak yakni lantai bambu/tanah proporsinya tercatat sebesar 1,33 persen. Sebagian besar rumah tangga tersebut terdapat di kawasan perdesaan, khususnya di wilayah Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul.

Relasi antara kesejahteraan penduduk atau rumah tangga dengan jenis lantai disajikan dalam Gambar 8.4. Proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis lantai terluas dari keramik/marmer/granit terlihat semakin membesar

seiring dengan kenaikan desil pengeluaran per kapita. Pada desil kesatu (kelompok 10 persen penduduk berpengeluaran terendah) proporsinya sebesar 37,66 persen. Pada desil kesepuluh (10 persen penduduk berpengeluaran per kapita tertinggi) proporsinya sebesar 93,27 persen. Sebaliknya, proporsi rumah tangga dengan jenis lantai terluas dari semen/bata merah terlihat semakin menurun seiring dengan kenaikan desil pengeluaran per kapita.

Selain itu, kualitas tempat tinggal juga bisa dikaji menggunakan indikator luas lantai. Diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di DIY menempati bangunan yang memiliki luas lantai 50 m² atau lebih, yaitu sebesar 79,03 persen. Sementara itu sisanya menempati bangunan dengan



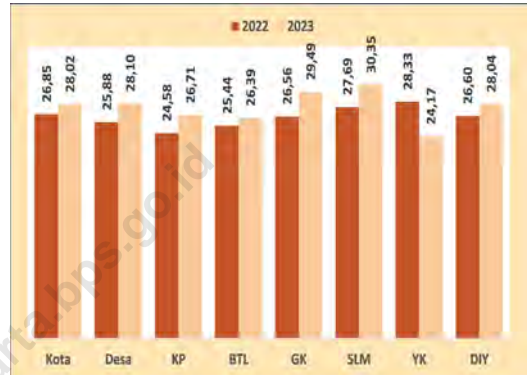
Gambar 8.5. Luas Lantai Rumah Tinggal menurut Wilayah di DIY, 2024 (m²)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

luas kurang dari 50 m². Bangunan tempat tinggal dengan luas 50 m² atau lebih tersebut tersebar hampir di seluruh wilayah DIY kecuali Kota Yogyakarta karena selain wilayahnya yang paling kecil, kepadatan penduduk Kota Yogyakarta juga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Luas lantai bangunan sangat dipengaruhi oleh aspek nilai dan ketersediaan tanah, maupun preferensi penduduk di wilayah yang

bersangkutan.

Selanjutnya juga diketahui bahwa mayoritas rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan luas lantai per kapita di atas 10 m². Proporsinya mencapai 91,75 persen. Sementara, proporsi rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m² tercatat sekitar 8,25 persen.



Gambar 8.6. Luas Lantai Per Kapita menurut Wilayah di DIY, 2022-2023 (m²)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2022-2023, BPS DIY

Secara rata-rata luas lantai per kapita tempat tinggal pada kondisi Maret 2023 sebesar 28,04 m². Rata-rata ini sedikit meningkat dibandingkan dengan periode Maret 2022. Rumah tangga di kawasan perkotaan memiliki rata-rata luas lantai per kapita yang sedikit lebih rendah dari rumah tangga di perdesaan. Rata-rata luas lantai per kapita tertinggi pada periode Maret 2023 tercatat di Kabupaten Sleman sebesar 30,35 m². Hal ini kemungkinan banyak penduduk tunggal yang tinggal di wilayah tersebut, antara lain mahasiswa karena di Sleman banyak perguruan tinggi.

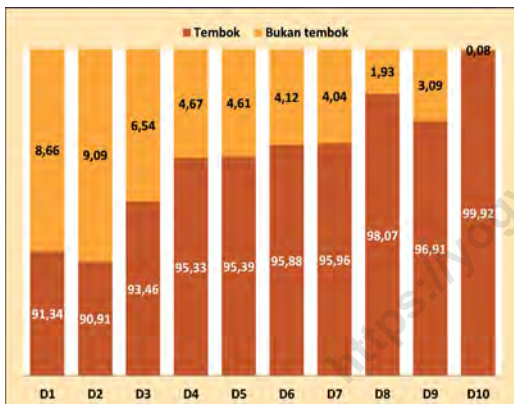
Jenis Dinding Bangunan Terluas

Jenis dinding terluas dari bangunan yang ditempati oleh rumah tangga juga menggambarkan derajat kesejahteraan penduduk secara umum. Jenis dinding bangunan tempat tinggal bisa terbuat

Tabel 8.2. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Jenis Dinding Terluas, 2021-2024 (Persen)

Tahun	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tembok	95,48	95,56	95,64	96,67
Plesteran anyaman bambu/kawat/kayu/papan/batang kayu	2,97	2,82	2,78	2,05
Bambu/Anyaman Bambu/Lainnya	1,55	1,62	1,57	1,28
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021-2024, BPS DIY



Gambar 8.7. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Dinding dan Desil di DIY, 2023 (Persen)

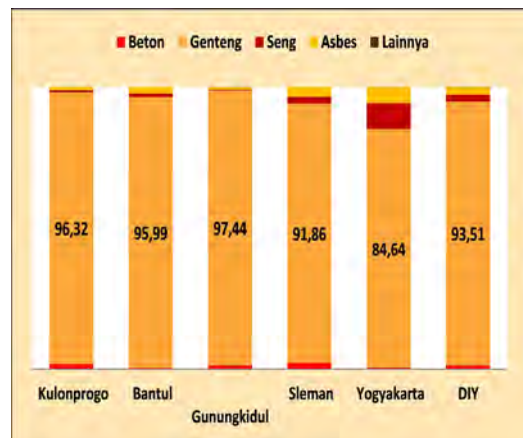
Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

dari tembok, plesteran, kayu, batang kayu, bambu, anyaman bambu, dan lainnya. Kualitas dinding yang baik dari sisi kesehatan dan kenyamanan adalah dinding yang berjenis tembok.

Hasil Susenas bulan Maret 2021-2024 menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis dinding terluas berupa tembok. Pada tahun 2024 proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan dinding terluas berupa tembok mencapai 96,67 persen. Secara umum,

angka tersebut menggambarkan bahwa mayoritas rumah tangga telah menempati bangunan yang sudah layak huni. Sementara, rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding terluas selain tembok didominasi oleh plesteran anyaman bambu/kawat/kayu/papan/batang kayu dan bambu/anyaman bambu/lainnya dengan proporsi masing-masing sebesar 2,05 persen dan 1,28 persen. Sebagian besar rumah tangga dengan jenis dinding rumah dari kayu dan anyaman bambu terdapat di Kulon Progo dan Gunungkidul.

Berdasarkan kelompok atau desil pengeluaran per kapita, proporsi rumah tangga yang menempati bangunan dengan jenis dinding berupa tembok semakin meningkat seiring dengan peningkatan desil pengeluaran per kapita. Rumah tangga pada kelompok pengeluaran per kapita 10 persen tertinggi hampir semuanya menempati bangunan dengan jenis dinding terbuat dari tembok. Sementara, pada kelompok pengeluaran per kapita 20 persen terendah masih terdapat 17,75 persen rumah tangga yang menempati rumah dengan jenis dinding bukan tembok. Namun demikian, variabel jenis dinding terlihat kurang sensitif dalam



Gambar 8.8. Proporsi Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas dan Wilayah di DIY, 2024

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

menggambarkan perbedaan kesejahteraan antar rumah tangga karena proporsi pada semua kelompok pengeluaran per kapita didominasi oleh jenis dinding tembok dengan proporsi di atas 90 persen.

Jenis Atap Terluas

Tingkat kesehatan dan kenyamanan hunian tempat tinggal juga sangat ditentukan oleh pemilihan jenis atap bangunan. Jenis atap bangunan tempat tinggal bisa merepresentasikan status sosial rumah tangga. Artinya, semakin baik kesejahteraan rumah tangga akan dicerminkan oleh jenis atap yang semakin berkualitas. Namun, faktor budaya dan karakteristik wilayah juga ikut berpengaruh terhadap pemilihan jenis atap. Jenis atap terluas dari bangunan secara berjenjang dikategorikan menjadi beton, genteng, seng, asbes, dan lainnya.

Sampai dengan kondisi Maret 2024, sebagian besar rumah tangga di DIY telah menempati bangunan dengan jenis atap terluas dari genteng tanah liat. Proporsinya di atas 93 persen dari total rumah tangga. Artinya, sebagian besar rumah tangga telah menempati bangunan yang cukup layak dari sisi jenis atap. Sementara, proporsi rumah tangga dengan jenis atap terluas yang lain terlihat bervariasi di bawah 3 persen. Secara umum, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait dengan jenis atap terluas antarwilayah perkotaan dan perdesaan serta antar kabupaten, kecuali untuk wilayah kota Yogyakarta yang memiliki karakteristik jenis atap terluas sedikit berbeda. Berdasarkan kelompok pengeluaran per kapita (desil), distribusi rumah tangga menurut jenis atap terluas juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Artinya, variabel jenis atap hampir sama dengan jenis dinding kurang sensitif menggambarkan perbedaan karakteristik

kesejahteraan antar rumah tangga.

FASILITAS DAN SARANA PENDUKUNG RUMAH

Selain kondisi fisik tempat tinggal, kualitas rumah sebagai proksi indikator kesejahteraan rumah tangga juga bisa dilihat dari fasilitas dan sarana pendukung yang tersedia. Beberapa sarana dan fasilitas pokok yang dapat dikaji terdiri dari sumber penerangan, sumber air bersih untuk minum dan kelayakannya, sarana MCK dan sanitasi, jenis bahan bakar untuk memasak, dan lainnya.

Sumber Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga merupakan salah satu aspek yang merepresentasikan kesejahteraan rumah tangga. Secara garis besar, sumber penerangan yang digunakan rumah tangga dikategorikan menjadi beberapa jenis, yakni listrik PLN (dengan meteran dan tanpa meteran), listrik non PLN, dan sumber lainnya seperti petromak, sentir, dan sebagainya. Secara umum, listrik merupakan sumber penerangan

Tabel 8.3. Proporsi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Penerangan, 2018-2024 (Persen)

Tahun	Sumber Penerangan			Jumlah
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2018	99,92	0,00	0,08	100
2019	99,82	0,00	0,18	100
2020	99,74	0,16	0,09	100
2021	100,00	0,00	0,00	100
2022	99,95	0,02	0,04	100
2023	100,00	0,00	0,00	100
2024	99,73	0,14	0,14	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2024, BPS DIY

yang lebih baik dibandingkan dengan sumber penerangan lainnya atau non listrik. Alasannya adalah penggunaan listrik lebih praktis, murah, efisien, modern, dan ramah lingkungan. Rumah tangga yang menggunakan penerangan listrik terutama dari sumber PLN dengan meteran dianggap mempunyai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang menggunakan sumber lainnya.

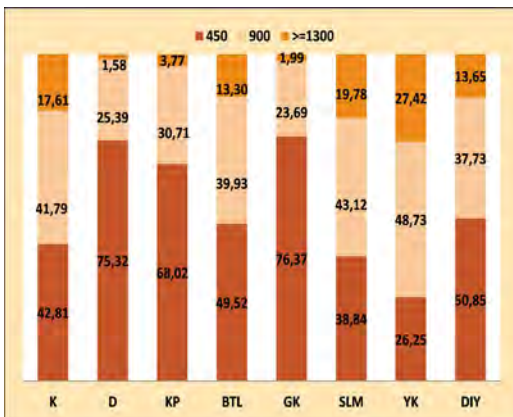
Potret sumber penerangan bagi rumah tangga bisa dikaji menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama menggunakan data hasil Susenas, terutama pertanyaan kor mengenai kondisi perumahan. Pendekatan kedua menggunakan data jumlah sambungan dan konsumsi listrik oleh konsumen rumah tangga menggunakan data sekunder dari PLN. Kedua pendekatan menghasilkan indikator yang berbeda, karena konsep, definisi, dan cakupan yang berbeda.

Berdasarkan hasil Susenas selama tujuh tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama sudah mendekati level 100 persen. Artinya hampir semua rumah tangga di DIY terjangkau oleh

aliran listrik. Dilihat secara lebih dirinci, sebanyak 99,73 persen rumah tangga di DIY sudah menggunakan sumber listrik dari PLN dengan meteran sendiri. Sisanya sebanyak 0,14 persen adalah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tanpa meteran atau dengan menyalur listrik dari rumah tangga lain dan sebanyak 0,14 persen yang sumber penerangannya bukan listrik.

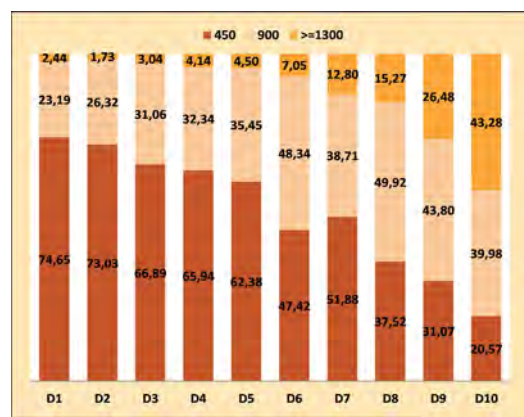
Distribusi rumah tangga di DIY yang menggunakan listrik PLN dengan meteran menurut daya yang terpasang (watt) pada kondisi Maret 2023 didominasi oleh kelompok 450 watt dan 900 watt. Proporsi kedua kelompok masing-masing tercatat sebesar 50,85 persen dan 37,73 persen. Sementara 13,65 persen rumah tangga menggunakan listrik dengan daya terpasang 1.300 watt ke atas. Proporsi kelompok 450 watt semakin menurun seiring semakin meningkatnya kebutuhan pemakaian listrik dalam rumah tangga.

Berdasarkan wilayah terlihat bahwa mayoritas rumah tangga di wilayah perdesaan menggunakan listrik dengan daya 450 watt, sementara mayoritas rumah tangga perkotaan menggunakan daya listrik lebih besar dari 450 watt. Proporsi rumah



Gambar 8.9. Distribusi Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2023 (%)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY



Gambar 8.10. Distribusi Rumah Tangga menurut Desil Pengeluaran dan Daya Listrik yang Terpasang di DIY, 2023 (%)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

tangga di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta yang menggunakan daya listrik terpasang 450 watt tercatat sebesar 38,84 persen dan 26,25 persen. Sementara, rumah tangga di tiga kabupaten lainnya mayoritas masih menggunakan listrik dengan daya terpasang 450 watt. Secara umum, hal ini memberi gambaran perbedaan level kesejahteraan penduduk antarwilayah di DIY.

Distribusi rumah tangga berdasarkan desil pengeluaran per kapita dan daya listrik yang terpasang menunjukkan hubungan positif. Artinya, semakin tinggi desil pengeluaran per kapita dari rumah tangga maka daya listrik yang digunakan juga semakin besar. Hal ini terkait dengan tuntutan kebutuhan rumah tangga pada kelompok menengah ke atas yang banyak menggunakan barang-barang elektronik. Barang-barang tersebut membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah yang lebih besar, sehingga daya listrik yang digunakan adalah 900 watt ke atas. Di samping itu, kebijakan pemerintah juga menentukan bahwa pengguna utama listrik dengan daya 450 watt adalah kalangan rumah tangga tidak mampu. Pada umumnya, mereka berada pada kelompok desil pengeluaran per kapita kesatu sampai kelima atau 50 persen penduduk berpendapatan terendah.

Berdasarkan data sekunder dari PT PLN, konsumen rumah tangga masih mendominasi jumlah pelanggan PT PLN Yogyakarta. Jumlah konsumen rumah tangga pada 2023 tercatat sekitar 1,48 juta pelanggan atau sebesar 91,46 persen dari total seluruh konsumen PLN. Jumlah konsumen rumah tangga menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada 2023 jumlah pengguna listrik rumah tangga tumbuh sebesar 4,41 persen dibandingkan kondisi 2022. Total daya listrik yang dikonsumsi oleh rumah tangga selama 2023 mencapai 1.928

juta KWH dan memiliki pangsa sekitar 54,09 persen terhadap total listrik yang terjual. Rata-rata konsumsi listrik per konsumen rumah tangga mencapai 1.428 KWH dalam satu tahun.

Sumber Air Minum Rumah Tangga

Tingkat kemudahan rumah tangga untuk mengakses air bersih maupun cara mengaksesnya menjadi salah satu ukuran kesejahteraan penduduk dari sisi kesehatan. Air bersih yang digunakan rumah tangga sebagai sumber air minum maupun memasak menjadi aspek yang sangat penting dalam menopang kualitas kesehatan penduduk. Air yang digunakan oleh rumah tangga untuk minum dan memasak bisa berasal dari beberapa sumber. Air minum dan air untuk memasak yang termasuk dalam kategori bersih dan sehat bersumber dari air kemasan bermerek, air isi ulang, leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus memenuhi syarat jarak

Tabel 8.4. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Sumber Air Minum Utama, 2018-2024 (%)

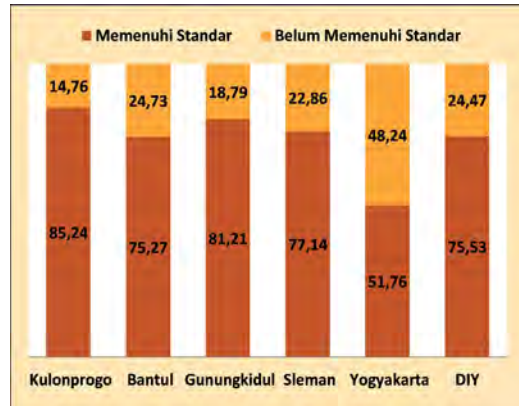
Sumber Air Minum	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang	25,2	28,6	28,8	25,7	18,8	22,8	26,7
Leding	12,9	11,2	10,9	11,4	12,2	10,3	10,5
Sumur Bor/Pompa	14,8	16,6	19,6	19,6	19,4	25,0	20,8
Sumur/Mata Air Terlindung	38,2	35,1	33,1	33,5	41,3	32,8	30,9
Sumur/Mata Air Tidak Terlindung	5,2	4,6	3,2	3,7	3,0	2,7	2,1
Lainnya	3,7	3,9	4,5	6,2	5,4	6,4	9,0
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2018-2024, BPS DIY

ke tempat penampungan kotoran/tinja minimal 10 meter. Sementara itu, sumber yang lainnya seperti sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan (sungai, danau, waduk, rawa, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya termasuk dalam kategori sumber air yang kurang memenuhi kaidah bersih dan sehat.

Penggunaan sumber air bersih untuk minum dan memasak oleh rumah tangga DIY selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Pada kondisi Maret 2024, tercatat sebanyak 88,9 persen rumah tangga telah menggunakan air dari sumber yang bersih dan sehat untuk minum. Sementara, sebanyak 88,82 persen rumah tangga telah menggunakan air bersih untuk aktivitas mandi, mencuci, dan lainnya (MCK).

Sumber air yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga untuk minum selama tujuh tahun terakhir berasal dari sumur dan mata air terlindung. Proporsinya mencapai 30,9 persen dari total rumah tangga pada kondisi Maret 2024. Pola perkembangannya cenderung fluktuatif. Proporsi terbesar berikutnya adalah air kemasan bermerek/air isi ulang, sumur bor/pompa, dan leding dengan proporsi masing-masing sebesar 26,7 persen, 20,8 persen, dan 10,5 persen. Proporsi rumah tangga yang menggunakan ketiga sumber air tersebut juga memiliki pola yang fluktuatif. Sementara, proporsi rumah tangga yang menggunakan sumber dari sumur/mata air tak terlindung dan lainnya (air permukaan dan air hujan) masing-masing sebesar 2,1 persen dan 9,0 persen. Selama dua tahun proporsi penggunaan sumber air minum dari sumur/mata air tidak terlindung mengalami penurunan, namun sebaliknya penggunaan sumber air minum lainnya (air permukaan dan air hujan) justru meningkat.

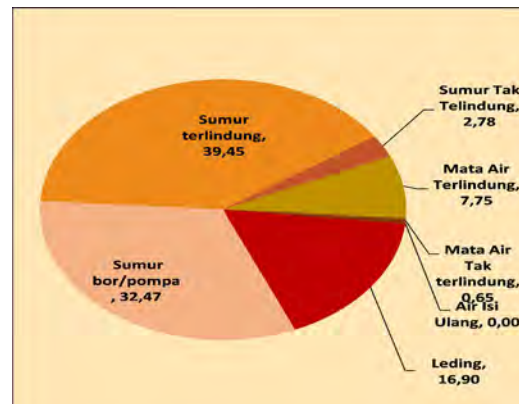


Gambar 8.11. Distribusi Rumah Tangga menurut Standar Air Minum di DIY, 2023 (%)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

Pola perubahan distribusi rumah tangga menurut sumber air minum tersebut secara kasar menggambarkan adanya perbaikan kualitas kesejahteraan dalam rumah tangga.

Air minum yang memenuhi standar bersih dan sehat harus berasal dari sumber yang terlindung dan memiliki jarak dengan tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter. Selain itu, kondisi fisik air tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, dan tidak berbau. Distribusi rumah tangga berdasarkan air minum yang memenuhi standar bersih dan sehat disajikan dalam Gambar 8.11.



Gambar 8.12. Distribusi Rumah Tangga menurut Sumber Air untuk Memasak, Mandi, Cuci, dan Lainnya di DIY, 2024 (%)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

Proporsi rumah tangga yang menggunakan air minum yang telah memenuhi standar bersih dan sehat di DIY mencapai 75,53 persen. Sementara, proporsi di Kota Yogyakarta tercatat paling rendah dari kabupaten lainnya.

Selain untuk kebutuhan minum, air bersih juga digunakan untuk kegiatan memasak, mandi, mencuci, dan lainnya. Sumber air untuk kegiatan tersebut sebagian besar berasal dari sumur terlindung, sumur bor/pompa, dan leding. Proporsi rumah tangga dengan ketiga sumber air tersebut masing-masing sebesar 39,45 persen, 32,47 persen, dan 16,90 persen. Sementara itu rumah tangga yang menggunakan air dari sumber mata air/sumur tak terlindung, air permukaan (danau, rawa, sungai, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya untuk memasak dan MCK jumlahnya relatif kecil, yaitu sekitar 3,43 persen dari total rumah tangga di DIY.

Berdasarkan cara, mayoritas rumah tangga memperoleh air minum tanpa membeli dengan proporsi mencapai sekitar 63 persen. Sisanya, sekitar 37 persen rumah tangga memperoleh air minum dengan membeli baik secara berlangganan maupun eceran. Tingkat kemudahan untuk

mengakses air bersih di daerah perkotaan relatif lebih mudah dibandingkan dengan perdesaan. Bahkan, terdapat beberapa wilayah perdesaan di Gunungkidul, Bantul, dan Kulon Progo yang sering mengalami kesulitan mengakses air bersih ketika musim kemarau.

Tempat Pembuangan Air Besar

Kualitas tempat tinggal juga ditentukan oleh fasilitas pendukung seperti tempat pembuangan air besar. Fasilitas tempat pembuangan air besar yang layak secara kesehatan atau memenuhi syarat sanitasi bisa dilihat dari aspek penggunaan fasilitas, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir kotoran/tinja. Ketersediaan fasilitas tersebut menjadi faktor yang memengaruhi kualitas sanitasi dan sangat diperlukan agar perilaku hidup sehat pada level rumah tangga bisa terjamin.

Berdasarkan hasil Susenas 2021-2024, sebagian besar rumah tangga di DIY telah memiliki fasilitas buang air besar dan hanya digunakan sendiri oleh anggota rumah tangga tersebut. Proporsinya sebesar 86,56 persen. Sementara, proporsi yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama dengan rumah tangga lain

Tabel 8.5. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2021-2024 (%)

Fasilitas buang Air Besar	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ada dan Digunakan Sendiri	83,80	87,30	84,58	86,56
Ada dan Digunakan Bersama	14,72	10,65	14,00	11,84
Ada, di MCK Umum	0,85	1,45	0,82	1,02
Tidak Ada, Ada tetapi Tidak Digunakan	0,63	0,59	0,59	0,58
Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2020-2023, BPS DIY

Tabel 8.6. Distribusi Rumah Tangga di DIY menurut Fasilitas Buang Air Besar, 2021-2024 (%)

Tempat Pembuangan Akhir Tinja	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tangki Septik/SPAL	97,42	97,76	96,89	97,27
Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut	0,90	0,87	1,46	0,91
Lubang Tanah/Kebun	1,68	1,37	1,66	1,79
Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,03
Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2021-2024, BPS DIY

mencapai 11,84 persen. Besarnya proporsi rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar tersebut secara tidak langsung menggambarkan aspek kesejahteraan rumah tangga yang semakin membaik. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas milik umum tercatat sebesar 1,79 persen dan rumah tangga yang tidak memiliki atau memiliki fasilitas buang air besar tetapi tidak digunakan sebesar 0,03 persen.

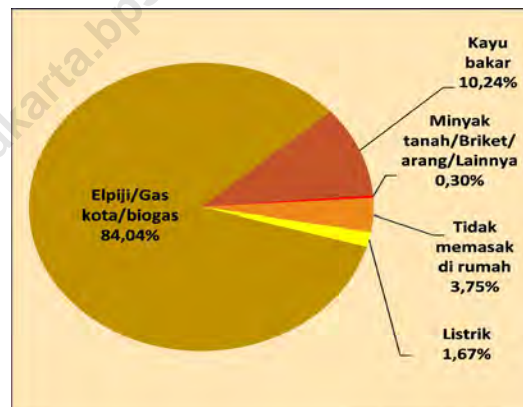
Tempat pembuangan akhir tinja dari sebagian besar rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar adalah tangki septik dan jaringan SPAL. Berdasarkan Susenas Maret 2024 proporsinya sebesar 97,27 persen. Kedua jenis tempat pembuangan akhir tinja ini telah memenuhi syarat kesehatan. Sisanya adalah rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di lubang tanah atau kebun sebesar 1,79 persen; dan di sawah/kolam/sungai dengan proporsi 0,91 persen. Kedua jenis tempat pembuangan akhir tinja ini belum memenuhi standar kesehatan dan sanitasi. Meskipun demikian sudah tidak ada rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir selain yang telah disebutkan. Berdasarkan wilayah, sebagian besar rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja di bawah standar sanitasi terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar adalah leher angsa. Proporsi pada bulan Maret 2024 mencapai 99,20 persen, sisanya menggunakan kloset jenis plengsengan dan cemplung/cubluk. Semakin besar proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar jenis leher angsa mengindikasikan kesadaran masyarakat tentang sanitasi dan kesehatan yang semakin meningkat. Jenis leher angsa dianggap sebagai paling

sehat, karena di bawahnya terdapat saluran berbentuk huruf “U” untuk menampung air sehingga bau tinja tidak bisa keluar. Perkembangan dalam empat tahun terakhir proporsi penggunaan kloset jenis leher angsa terlihat semakin meningkat.

Bahan Bakar Utama untuk Memasak

Karakteristik kesejahteraan penduduk atau rumah tangga juga bisa dikaji dari aspek jenis bahan bakar utama untuk memasak. Semakin sejahtera rumah tangga, maka akan semakin besar kecenderungan untuk berpindah ke bahan bakar yang lebih praktis dari sisi penggunaan, efisien dari sisi nilai, dan ramah lingkungan.



Gambar 8.13. Distribusi Rumah Tangga menurut Bahan Bakar Utama untuk Memasak di DIY, 2024 (%)

Sumber: Diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024, proporsi rumah tangga di DIY yang melakukan aktivitas memasak mencapai 96,25 persen. Sisanya, sebesar 3,75 persen rumah tangga tidak melakukan aktivitas memasak. Jenis bahan bakar utama yang digunakan mayoritas rumah tangga untuk memasak adalah gas elpiji. Proporsinya mencapai 84,04 persen. Proporsi terbesar berikutnya adalah rumah tangga yang menggunakan kayu bakar sebesar 10,24 persen. Pada umumnya, rumah tangga

pengguna kayu bakar untuk memasak tinggal di kawasan perdesaan, terutama di Gunungkidul dan Kulon Progo yang masih memiliki persediaan kayu bakar melimpah dan relatif murah.

Gas dan kayu bakar merupakan bahan bakar utama untuk memasak yang cukup populer di DIY. Di daerah perdesaan juga masih banyak dijumpai rumah tangga yang tetap memasak menggunakan kayu bakar disamping juga menggunakan gas. Harga bahan bakar gas yang meningkat menjadi salah satu penyebab penggunaan kayu bakar masih dipertahankan, selain karena kebutuhan khusus sehingga memasak harus tetap menggunakan kayu bakar. Berdasarkan desil pengeluaran per kapita, rumah tangga pengguna kayu bakar dominan pada desil pengeluaran per kapita kesatu sampai kelima. Sementara, penggunaan bahan bakar elpiji sangat dominan pada desil pengeluaran per kapita keempat sampai kesepuluh dengan proporsi di atas 80 persen.

Bab IX



Indikator
Kemiskinan dan
Ketimpangan

Indikator Kemiskinan dan Ketimpangan

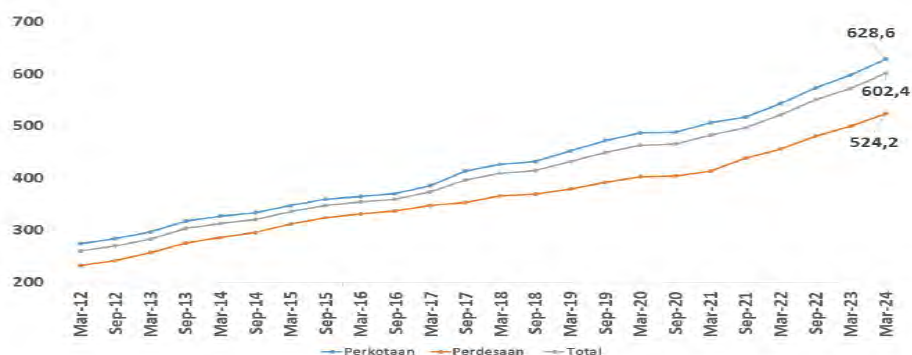
Kemiskinan menjadi tolok ukur utama kesejahteraan rakyat. Semakin tinggi kemiskinan mencerminkan kesejahteraan yang semakin memburuk. Sebaliknya, semakin rendah kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan yang semakin membaik. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sasaran yang ingin dicapai adalah mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat. Fakta ini menyiratkan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk diatasi dan ditanggulangi secara bersama-sama.

Gambaran mengenai kondisi kemiskinan di suatu wilayah, pola perkembangan, tingkat kedalaman dan keparahan dapat dikaji menggunakan beberapa indikator kemiskinan. Indikator kemiskinan yang lazim digunakan adalah Indeks *Foster, Greer, Thorbecke* (FGT). Indeks ini membagi ukuran kemiskinan menjadi tiga, yakni persentase penduduk miskin (P_0), Indeks kedalaman kemiskinan (P_1), dan indeks keparahan kemiskinan (P_2).

Pengukuran Kemiskinan dan Perkembangan Garis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural. Dengan kata lain kemiskinan bersifat multidimensional. Namun demikian, metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter atau ekonomi. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau penduduk. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan *kebutuhan dasar minimum (basic needs approach)*. *Kebutuhan* dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin, apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung dalam

Mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di semua tempat menjadi salah satu butir tujuan pembangunan berkelanjutan.



Gambar 9.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Wilayah di DIY, 2012-2024 (000 Rp/kapita/bulan)

Sumber: Statistik Kemiskinan DIY 2024

bentuk absolut berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kemiskinan juga diestimasi menggunakan data Susenas yang dikumpulkan secara berkala pada bulan Maret dan September setiap tahun.

Perkembangan nilai nominal garis kemiskinan di DIY selama periode 2012-2024 terus meningkat (Gambar 9.1). Peningkatan ini terjadi seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa kebutuhan rumah tangga atau inflasi serta perubahan dalam pola konsumsi penduduk. Nilai nominal garis kemiskinan pada kondisi Maret 2012 tercatat sebesar Rp260,2 ribu per kapita per bulan. Nilai nominal ini terus meningkat hingga Rp602,4 ribu per kapita per bulan pada kondisi bulan Maret 2024. Artinya, secara nominal garis kemiskinan meningkat secara rata-rata sebesar 10,95 persen per tahun selama periode Maret 2012-Maret 2024.

Secara nominal, garis kemiskinan DIY selalu lebih tinggi dari garis kemiskinan nasional yang pada Maret 2024 mencapai Rp455.6 ribu per kapita per bulan. Hal ini menjadi salah satu penyebab level kemiskinan DIY yang cenderung lebih tinggi

dari angka kemiskinan nasional, karena ukuran kemiskinan sangat sensitif terhadap besarnya garis kemiskinan yang digunakan.

Perkembangan garis kemiskinan di wilayah perkotaan maupun perdesaan menunjukkan pola yang semakin meningkat searah dengan perkembangan tingkat harga komoditas barang dan jasa. Pada posisi Maret 2024, garis kemiskinan perkotaan DIY ditetapkan pada level Rp628,6 ribu per kapita per bulan dan garis kemiskinan perdesaan DIY pada level Rp524,2 ribu per kapita per bulan. Level garis kemiskinan di wilayah perkotaan DIY tercatat selalu lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Perbedaan garis kemiskinan antarwilayah tersebut sangat terkait dengan pola konsumsi penduduk perkotaan yang lebih bervariasi dari konsumsi penduduk perdesaan. Persoalan kuantitas atau frekuensi konsumsi dan jenis komoditas yang dikonsumsi juga turut memberi pengaruh terhadap perbedaan level garis kemiskinan antarwilayah di DIY. Selain itu, perbedaan tingkat pendapatan per kapita antarwilayah yang cukup lebar serta karakteristik sosial budaya yang berbeda juga menjadi penyebab perbedaan pola konsumsi penduduk antarwilayah.

Hal menarik berikutnya ialah terdapat trend adanya *gap* garis kemiskinan antarwilayah yang semakin melebar. Pada tahun 2012, *gap* garis kemiskinan antarwilayah masih Rp42,8 ribu per kapita per bulan. Lalu cenderung menurun hingga Rp37,2 ribu per kapita per bulan pada tahun 2017. Namun, setelah itu kembali meningkat hingga mencapai Rp104,4 ribu per kapita per bulan pada tahun 2024.

Dalam hal andil, komoditas makanan terhadap garis kemiskinan DIY mencapai 72,47 persen dan 27,53 persen sisanya merupakan andil komoditas non makanan dalam garis kemiskinan di perkotaan. Sementara, andil komoditas makanan terhadap garis kemiskinan perdesaan mencapai 73,62 persen dan 26,38 persen sisanya non makanan. Beberapa jenis komoditas yang memiliki andil paling dominan dalam garis kemiskinan DIY di antaranya adalah beras, telur ayam ras, daging ayam ras, gula pasir serta pada komoditi non perumahan utamanya perumahan, bensin, dan listrik.

Perkembangan Penduduk Miskin DIY

Perkembangan jumlah penduduk miskin (*Head Count* atau disingkat HC) maupun persentasenya (*Head Count Index* atau HCI) di DIY selama dua dekade terakhir menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian, polanya cukup berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin di DIY pada kondisi Maret 2000 masih cukup besar akibat dampak krisis ekonomi 1997/1998 yang belum sepenuhnya pulih. Jumlah penduduk miskin pada saat itu tercatat sebanyak 1,04 juta jiwa atau 33,4 persen dari total penduduk DIY.

Kondisi perekonomian yang semakin membaik ditandai oleh peningkatan pendapatan per kapita penduduk. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan

jumlah penduduk miskin. Secara bertahap, jumlah jiwa penduduk miskin maupun persentasenya semakin menurun hingga mencapai 445,6 ribu jiwa atau 10,83 persen dari penduduk DIY pada kondisi Maret 2024.

Berdasarkan data *series* selama periode 2000-2024, jumlah penduduk miskin di DIY terlihat meningkat beberapa kali yakni pada kondisi Maret 2003, Maret 2005, Maret 2006, September 2011, Maret 2014, Maret 2015, Maret 2016, dan Maret 2020. Secara proporsional, penduduk miskin juga terlihat meningkat selama periode-periode tersebut. Peningkatan jumlah maupun persentase penduduk miskin terjadi akibat kenaikan harga yang cukup tinggi terutama harga bahan makanan pokok, bahan bakar, dan energi akibat kebijakan pemerintah maupun mekanisme pasar. Kenaikan harga komoditas strategis ini berimplikasi pada kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak akhirnya adalah daya beli penduduk sedikit menurun dan garis kemiskinan meningkat lebih tinggi. Secara otomatis, kondisi ini akan menaikkan jumlah penduduk miskin (jiwa) maupun persentasenya. Penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin pada kondisi Maret 2020 hingga Maret 2021 dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai pertengahan Maret 2020. Lalu dengan dinyatakan Pemerintah sebagai Pandemi Covid-19 beserta diterapkan kebijakan pembatasan mobilitas sosial untuk penanganannya berdampak terhadap pendapatan rumah tangga menurun secara nyata, sehingga tingkat kemiskinan juga meningkat. Baru, sejak September 2021 hingga saat ini terjadi tren pengurangan tingkat kemiskinan seiring aktivitas ekonomi yang sudah mulai longgar dan program bantuan sosial ekonomi dari pemerintah.

Table 9.1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin menurut Wilayah di DIY, 2000-2024

Tahun	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	000 Jiwa	P ₀ (%)	000 Jiwa	P ₀ (%)	000 Jiwa	P ₀ (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2000	436,6	24,58	599,2	45,17	1 035,8	33,39
Mar 2001	266,8	14,56	500,8	38,65	767,6	24,53
Mar 2002	303,8	16,17	331,9	25,96	635,7	20,14
Mar 2003	303,3	16,44	333,5	24,48	636,8	19,86
Mar 2004	301,4	15,96	314,8	23,65	616,2	19,14
Mar 2005	340,3	16,02	285,5	24,23	625,8	18,95
Mar 2006	346,0	17,85	302,7	27,64	648,7	19,15
Mar 2007	335,3	15,63	298,2	25,03	633,5	18,99
Mar 2008	324,2	14,99	292,1	24,32	616,3	18,32
Mar 2009	311,5	14,25	274,3	22,60	585,8	17,23
Mar 2010	308,4	13,98	268,9	21,95	577,3	16,83
Mar 2011	304,3	13,16	256,6	21,82	560,9	16,08
Sep 2011	298,9	12,88	265,3	22,57	564,2	16,14
Mar 2012	305,9	13,13	259,4	21,76	565,3	16,05
Sep 2012	306,5	13,10	255,6	21,29	562,1	15,88
Mar 2013	315,5	13,43	234,7	19,29	550,2	15,43
Sep 2013	325,5	13,73	209,7	17,62	535,2	15,03
Mar 2014	333,0	13,81	211,8	17,36	544,9	15,00
Sep 2014	324,4	13,36	208,2	16,88	532,6	14,55
Mar 2015	329,7	13,43	220,6	17,85	550,2	14,91
Sep 2015	292,6	11,93	192,9	15,62	485,6	13,16
Mar 2016	297,7	11,79	197,2	16,63	494,9	13,34
Sep 2016	301,3	11,68	187,6	16,27	488,8	13,10
Mar 2017	309,0	11,72	179,5	16,11	488,5	13,02
Sep 2017	298,4	11,00	167,9	15,86	466,3	12,36
Mar 2018	305,2	11,03	154,9	15,12	460,1	12,13
Sep 2018	298,5	10,73	151,8	14,71	450,3	11,81
Mar 2019	304,7	10,89	143,8	13,89	448,5	11,70
Sep 2019	298,7	10,62	142,2	13,67	440,9	11,44
Mar 2020	326,1	11,53	149,6	14,31	475,7	12,28
Sep 2020	353,2	12,17	149,9	14,57	503,1	12,80
Mar 2021	358,7	12,23	147,8	14,44	506,4	12,80
Sep 2021	331,7	11,20	142,8	13,99	474,5	11,91
Mar 2022	315,5	10,56	139,3	13,65	454,8	11,34
Sep 2022	321,1	10,64	142,6	14,00	463,6	11,49
Mar 2023	312,8	10,27	135,6	13,36	448,5	11,04
Mar 2024	319,4	10,29	126,2	12,49	445,6	10,83

Sumber: Statistik Kemiskinan DIY 2024

Berdasarkan wilayah, kemiskinan di perdesaan tercatat selalu lebih tinggi dari perkotaan selama hampir dua dekade terakhir. Hal ini terlihat dari persentase penduduk miskin perdesaan levelnya yang selalu lebih tinggi dari perkotaan. Dari sisi jumlah, penduduk miskin daerah perkotaan sudah melampaui jumlah penduduk miskin di perdesaan sejak tahun 2005 akibat pengaruh perubahan klasifikasi status wilayah dari *rural* menuju *urban*.

Perkembangan kemiskinan di wilayah perkotaan menurun secara bertahap dari 24,58 persen atau 436,6 ribu jiwa di bulan Maret 2000 menjadi 10,29 persen atau 319,4 ribu jiwa pada kondisi Maret 2024. Artinya, lebih dari dua dekade terakhir tingkat kemiskinan

perkotaan berkurang sebesar 14,29 poin (persen). Perkembangan kemiskinan di daerah perdesaan juga terlihat semakin menurun dalam dua dekade terakhir. Secara bertahap, kemiskinan menurun dari 599,2 ribu jiwa atau 45,17 persen pada kondisi bulan Maret 2000 menjadi 126,2 ribu jiwa atau 12,49 persen pada kondisi Maret 2024. Artinya, level kemiskinan di wilayah perdesaan menurun hingga 32,68 poin (persen).

Berdasarkan data selama dua dekade terakhir, penurunan kemiskinan di wilayah

perdesaan terlihat berjalan lebih cepat dari wilayah perkotaan. Akibatnya, selisih atau *gap* kemiskinan semakin berkurang dan semakin konvergen.

Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan tidak sekedar mencakup tentang dimensi jumlah dan persentase penduduk miskin. Namun juga menyangkut dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, indeks kedalaman kemiskinan (P_1) menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara, indeks keparahan kemiskinan (P_2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan data *series* selama dua dekade terakhir, terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik secara rata-rata maupun di wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY. Penurunan ini menjadi sinyal yang mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan, meskipun dari sisi polanya terlihat cukup berfluktuasi. Penurunan indeks kedalaman berarti rata-rata pengeluaran pada penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, penurunan indeks keparahan berarti tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin semakin berkurang.

Nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan DIY pada kondisi Maret 2024 masing-masing sebesar 1,87 dan 0,45. Nilai kedua indeks lebih meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret dan September 2019 sebelum terjadi dampak

pandemi Covid-19. Kenaikan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun, nilai kedua indeks mengalami penurunan mulai September 2021 seiring masa pemulihan Pandemi Covid-19 baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 9.2. Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di DIY, 2010-2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2010	2,27	3,89	2,85	0,56	1,02	0,73
Mar 2011	1,93	3,67	2,51	0,50	0,93	0,65
Sep 2011	1,93	3,54	2,48	0,48	0,81	0,59
Mar 2012	3,56	3,29	3,47	1,32	0,79	1,14
Sep 2012	2,29	4,07	2,89	0,58	1,09	0,75
Mar 2013	2,08	3,02	2,40	0,50	0,63	0,55
Sep 2013	2,18	2,03	2,13	0,52	0,34	0,46
Mar 2014	2,22	2,11	2,19	0,53	0,40	0,48
Sep 2014	2,03	2,98	2,35	0,52	0,79	0,61
Mar 2015	2,55	3,70	2,93	0,71	1,09	0,83
Sep 2015	2,19	2,57	2,32	0,60	0,68	0,63
Mar 2016	1,78	3,41	2,30	0,38	1,05	0,59
Sep 2016	1,26	2,83	1,75	0,22	0,67	0,36
Mar 2017	2,15	2,29	2,19	0,58	0,47	0,55
Sep 2017	1,79	2,86	2,09	0,39	0,64	0,46
Mar 2018	1,91	2,48	2,07	0,47	0,59	0,50
Sep 2018	1,58	1,85	1,65	0,35	0,34	0,35
Mar 2019	1,73	1,78	1,74	0,41	0,32	0,38
Sep 2019	1,49	1,70	1,54	0,31	0,28	0,30
Mar 2020	1,86	2,16	1,94	0,43	0,53	0,46
Sep 2020	1,98	2,37	2,08	0,48	0,57	0,50
Mar 2021	2,35	2,61	2,42	0,65	0,66	0,65
Sep 2021	2,05	2,10	2,06	0,56	0,45	0,53
Mar 2022	1,93	2,25	2,01	0,48	0,58	0,51
Sep 2022	1,38	1,95	1,53	0,25	0,38	0,28
Mar 2023	1,62	2,00	1,72	0,37	0,41	0,38
Mar 2024	1,73	2,28	1,87	0,42	0,54	0,45

Sumber: Statistik Kemiskinan DIY 2024

Sebaran Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota di DIY

Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin maupun persentasenya yang sangat bervariasi antarwilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan jumlah jiwa, sebaran penduduk miskin tahun 2023-2024 sebagian besar terdapat di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebesar 126,93 ribu dan 120,41 ribu jiwa pada kondisi tahun 2024. Sementara, populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 28,79 ribu jiwa dan diikuti oleh Kulon Progo sebanyak 71,48 ribu jiwa. Ukuran jumlah penduduk miskin ini belum mempertimbangkan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat bervariasi. Sementara, jika berdasarkan ukuran persentase (P_0), maka Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi dua daerah yang memiliki level kemiskinan tertinggi di DIY. Persentase penduduk miskin di kedua kabupaten pada kondisi 2024 tercatat sebesar 15,62

persen dan 15,18 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,26 persen dan 7,46 persen pada tahun 2024 menjadi dua daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di DIY.

Secara umum, perbedaan level kemiskinan antarwilayah tersebut merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antarwilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kondisi geografis; struktur ekonomi dan kesempatan kerja; dan kualitas infrastruktur publik terutama pendidikan, kesehatan, serta pasar menjadi beberapa penyebab utama. Penyebab yang lain adalah perbedaan tingkat kemudahan dalam mengakses sarana yang tersedia. Perkembangan kemiskinan di kabupaten/kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan terbesar dari sisi jumlah terjadi di Gunungkidul. Sementara, penurunan terbesar dari sisi persentase terjadi di Gunung Kidul. Penurunan kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon Progo berlangsung lebih cepat dan program pengentasan kemiskinan mampu berjalan lebih efektif dibandingkan dengan Kota Yogyakarta dan Sleman. Hal ini terjadi karena kemiskinan di

Tabel 9.3. Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, serta Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Wilayah di DIY, 2023-2024

Kabupaten/ Kota	2023					2024				
	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp)	HC (000 Jiwa)	P0	P1	P2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kulon Progo	416 870	70,74	15,64	2,54	0,61	438 007	71,48	15,62	2,48	0,62
Bantul	488 340	128,51	11,95	1,79	0,44	510 740	126,93	11,66	2,18	0,56
Gunungkidul	382 249	122,54	15,6	2,71	0,6	401 209	120,41	15,18	2,56	0,65
Sleman	491 652	97,5	7,52	1,34	0,32	513 926	97,94	7,46	1,21	0,27
Yogyakarta	662 267	29,48	6,49	0,86	0,18	686 973	28,79	6,26	0,76	0,14

Sumber: www.yogyakarta.bps.go.id

Kota Yogyakarta dan Sleman levelnya sudah rendah (sekitar 6-7 persen) dan yang tersisa hanya kerak kemiskinan atau penduduk miskin yang persisten. Sementara, kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon Progo secara level masih tinggi sehingga lebih signifikan terdampak intervensi.

Perkembangan Distribusi Pendapatan

Kebijakan untuk mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi berdampak bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Namun, di sisi lain juga sering membawa persoalan berupa peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena distribusi aset dan *skill* yang tidak tersebar secara merata antarpenduduk. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi sesuai dengan kepemilikan aset dan keterampilan yang dimiliki. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan antarpenduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank Dunia, Gini Rasio, indeks Theil, Ukuran Desil, dan lainnya.

Berdasarkan data Susenas pada bulan Maret tahun 2010-2023, distribusi pendapatan penduduk yang diprosi dengan pendekatan pengeluaran per kapita menunjukkan pola yang semakin tidak merata atau semakin timpang. Pada kondisi Maret 2022-2023, 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah memiliki *share* pengeluaran sebesar 18 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lebih dari satu dekade, *share* pengeluaran kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah tercatat kurang dari 18 persen dari total pengeluaran penduduk. Sejalan dengan itu, penduduk pada golongan pendapatan 20 persen tertinggi memiliki porsi pengeluaran sebesar 46,7 persen pada

periode Maret 2023. Porsi ini meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2010 sebesar 45,5 persen dari total pengeluaran penduduk DIY. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi selama tahun 2020-2022 di masa pandemi Covid-19 porsi golongan pendapatan 20 persen tertinggi meningkat.

Lebih jauh, indikasi ketimpangan pengeluaran antarpenduduk yang semakin melebar juga ditunjukkan oleh rasio Kuznets. Rasio ini mengukur perbandingan kelompok pengeluaran 20% penduduk berpendapatan tertinggi terhadap jumlah kelompok pengeluaran 40% penduduk pada golongan berpendapatan terendah. Pada tahun 2010, rasio Kuznets menunjukkan ketimpangan penduduk 20% pendapatan tertinggi lebih besar 2,52 kali dari pengeluaran penduduk 40% terendah. Secara tren, rasio Kuznets di DIY cenderung meningkat selama satu dekade meski terjadi penurunan kembali hingga mencapai 2,59 pada tahun 2023.

Indikasi adanya ketimpangan

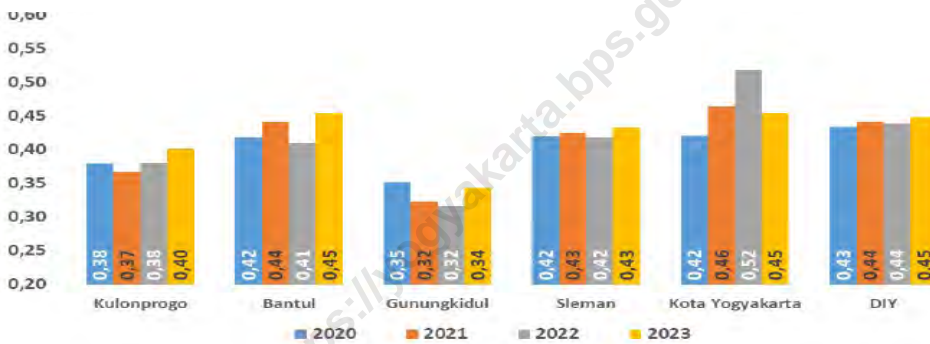


Gambar 9.2. Perkembangan Distribusi Pengeluaran menurut Kelompok Pendapatan Penduduk di DIY, 2010-2023

Sumber: www.yogyakarta.bps.go.id

pendapatan antarpenduduk yang cukup lebar juga diperjelas oleh nilai Gini rasio. Selama periode 2020-2023, levelnya bervariasi pada kisaran 0,4 atau berada dalam kategori ketimpangan moderat/ sedang. Namun demikian, nilai Gini Rasio DIY cenderung meningkat secara berfluktuasi. Pada kondisi 2020, nilai Gini rasio DIY berada pada level 0,43. Level ini meningkat hingga pada level 0,45 di tahun 2023. Kecenderungan peningkatan nilai indeks Gini menggambarkan distribusi pendapatan antarpenduduk yang bergerak semakin tidak merata.

Secara wilayah administrasi, kondisi peningkatan tren ketimpangan dan tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran juga terjadi antar kabupaten dan kota. Hal ini dindikasikan dari Gini Ratio yang menunjukkan tertinggi di wilayah Kota Yogyakarta bahkan di atas Provinsi DIY. Disusul oleh Kabupaten Bantul dan Sleman. Sementara itu, pada Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul cenderung lebih rendah.



Gambar 9.3. Perkembangan Indeks Gini menurut Wilayah di DIY, 2020-2023

Sumber: www.yogyakarta.bps.go.id



Bab

X



Indikator
Sosial Lainnya

Indikator Sosial Lainnya

Kesejahteraan penduduk yang meningkat juga diindikasikan oleh meningkatnya aktivitas berwisata, kemudahan mengakses informasi dan komunikasi, tingkat keamanan, rendahnya tingkat kejahatan, serta kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual.

Tingkat kesejahteraan penduduk juga bisa dikaji dari aspek sosial yang lain. Peningkatan kesejahteraan penduduk akan ditandai dan diikuti oleh meningkatnya beberapa aktivitas seperti perjalanan dan kegiatan pariwisata, kemudahan dalam mengakses media informasi dan komunikasi, tingkat keamanan yang membaik, tingkat kejahatan yang menurun, aktivitas menabung meningkat, dan kemudahan dalam mengakses kehidupan spiritual. Aktivitas wisata yang merupakan bentuk kebutuhan tersier penduduk. Semakin tinggi kesejahteraan seseorang, maka akan semakin tinggi pula peluangnya untuk memenuhi kebutuhan non primer, termasuk kebutuhan berwisata. Di sisi yang lain, tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah juga bisa dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat kunjungan wisatawan dari daerah lain. Semakin tinggi tingkat kunjungan wisatawan dapat memberi dampak penambahan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui belanja yang dikeluarkan oleh para wisatawan.

Akses terhadap media informasi dan komunikasi merupakan basis perkembangan pengetahuan seseorang. Berbagai informasi dapat mengubah pandangan dan cara hidup ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, kepemilikan sarana beserta kemudahan dalam mengakses media informasi juga bisa menggambarkan tingkat kesejahteraan seseorang. Ukuran kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari kegiatan non ekonomi yang menyangkut kebutuhan spiritual seperti keagamaan. Waktu yang dimiliki tidak semata-mata untuk kegiatan mencari nafkah, tetapi juga harus bisa meluangkan waktu untuk kegiatan keagamaan. Khususnya pada masyarakat muslim, tingkat kesejahteraan secara umum bisa dilihat dari peningkatan jumlah jamaah haji dari waktu ke waktu.

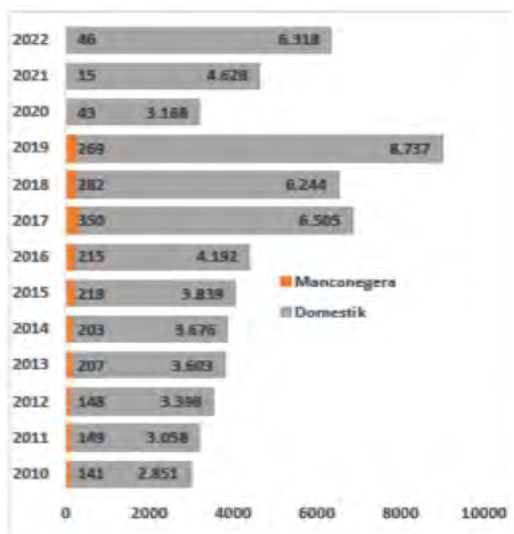
Pariwisata dan Perjalanan

Pariwisata merupakan industri yang digerakkan oleh permintaan atau dihidupi oleh wisatawan dan supplainya disediakan oleh kegiatan sektoral terutama lapangan usaha akomodasi, makan dan minum, transportasi, jasa, dan lainnya. DIY dikenal menjadi salah satu destinasi pariwisata di Indonesia yang banyak memiliki potensi baik wisata alam maupun budaya, baik wisata yang bersifat masal maupun minat khusus. Kegiatan pariwisata

di DIY senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan eksistensinya, dengan harapan dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan aktivitas pariwisata adalah jumlah kunjungan wisata baik domestik maupun mancanegara. Jumlah wisatawan yang berkunjung bisa diukur dengan pendekatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di wilayah DIY atau berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke setiap destinasi wisata di wilayah DIY.

Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi lain di DIY terlihat semakin meningkat. Jumlah wisatawan menginap selama tahun 2022 mencapai 6,3 juta orang, sudah mulai mendekati jumlah sebelum pandemi pada tahun 2019. Selama tahun 2012-2022, jumlah kunjungan wisatawan yang menginap di hotel dan akomodasi di DIY rata-rata tumbuh 12,22 persen per tahun. Pertumbuhan ini lebih didorong

Gambar 10.1. Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2010-2022 (ribu Orang)



Sumber: BPS DIY, 2010-2022

oleh kunjungan wisatawan nusantara yang polanya cenderung meningkat. Berdasarkan data terbaru, meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Agustus 2024 turun 8,85 persen dibandingkan Juli 2024, yaitu dari 11.120 kunjungan menjadi 10.136 kunjungan, secara umum jumlah kunjungan ke DIY mengalami peningkatan. Adapun kunjungan wisatawan nusantara pada Januari-Agustus 2024 naik 20,89 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023, dari 21,04 juta perjalanan menjadi 25,44 juta perjalanan.

Wisatawan nusantara mampu tumbuh pada tahun 2022 mencapai 36,5 persen, dan wisatawan asing tumbuh 206,7 persen setelah tahun sebelumnya mengalami kontraksi negatif karena pandemi Covid-19. Namun demikian, secara pangsa, wisatawan mancanegara masih menyumbang 0,3 persen, masih cukup rendah dibanding

Tabel 10.1. Pertumbuhan Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel dan Akomodasi Lain menurut Asal di DIY, 2011-2022 (Persen)

Tahun	Nusantara		Mancanegara		Pertumbuhan Total
	Pertumbuhan	Pangsa	Pertumbuhan	Pangsa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2011	7,3	95,4	5,7	4,65	7,2
2012	11,1	95,8	-0,7	4,17	10,6
2013	6,0	94,6	39,9	5,43	7,4
2014	2,0	94,8	-1,9	5,23	1,8
2015	4,4	94,6	7,4	5,37	4,6
2016	9,2	95,1	-1,4	4,88	8,6
2017	55,2	94,9	62,8	5,11	55,5
2018	-4,0	95,7	-19,4	4,32	-4,8
2019	39,9	97,0	-4,6	2,99	38,0
2020	-63,7	98,7	-84,0	1,34	-64,3
2021	46,1	99,7	-65,1	0,32	44,6
2022	36,5	99,3	206,7	0,72	37,1

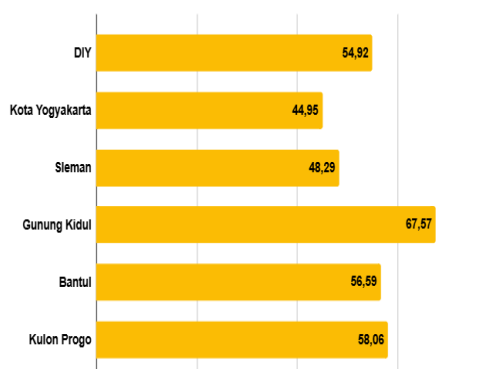
Sumber: BPS DIY, 2010-2022

sebelum pandemi Covid-19 antara 3-5 persen. Berdasarkan negara asalnya, selama Januari-Agustus 2024, jumlah wisatawan mancanegara didominasi oleh wisatawan asal Malaysia, Singapura, Tiongkok, Prancis, dan Amerika Serikat.

Di lain sisi, aktivitas wisata penduduk domestik DIY dapat diukur menggunakan indikator perjalanan. Konsep perjalanan yang digunakan BPS dalam kegiatan Susenas adalah perjalanan yang dilakukan penduduk dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela dan bukan untuk tujuan memperoleh upah/gaji di tempat yang dikunjungi atau sekolah, serta bersifat bukan perjalanan rutin. Perjalanan yang dicakup adalah bepergian ke obyek pariwisata atau menginap di akomodasi komersial atau menempuh jarak 100 km atau lebih secara pulang pergi.

Jumlah penduduk DIY yang melakukan kegiatan perjalanan selama tahun 2022 mencapai 54,92 persen. Proporsi ini meningkat nyata dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 40,88 persen. Secara kabupaten/kota, persentase penduduk di Gunungkidul yang paling tinggi hingga mencapai 67,57 persen dan

Gambar 10.2. Penduduk DIY yang Melakukan Kegiatan Perjalanan Sejak 1 Januari-31 Desember 2022 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2022, BPS DIY

yang paling rendah ialah penduduk di Kota Yogyakarta sebesar 44,95 persen. Peningkatan ini menggambarkan mobilitas penduduk untuk tujuan wisata yang semakin meningkat. Secara rata-rata, jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk selama tahun 2022 adalah 3 kali perjalanan. Aktivitas perjalanan wisata membutuhkan biaya yang mahal, sehingga peningkatannya juga mendorong peningkatan belanja/konsumsi penduduk. Peningkatan ini sekaligus menggambarkan kualitas kesejahteraan penduduk yang semakin membaik.

Secara umum, tidak ada perbedaan yang nyata antara laki-laki dan perempuan dalam melakukan kegiatan perjalanan. Perbedaan yang cukup mencolok terlihat antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan memiliki tingkat mobilitas berwisata yang lebih tinggi dari penduduk perdesaan. Sementara, mobilitas untuk melakukan perjalanan penduduk di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi dibandingkan dengan tiga daerah yang lainnya.

Berdasarkan tujuan, sebagian besar perjalanan terakhir yang dilakukan oleh penduduk DIY selama tahun 2022 bertujuan untuk kegiatan berlibur/rekreasi. Tujuan terbesar berikutnya adalah mengunjungi teman/keluarga.

Akses pada Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK)

Kesejahteraan penduduk memiliki relasi dengan kemudahan dalam mengakses informasi dari berbagai sumber. Semakin sejahtera penduduk, maka akan semakin mudah akses penduduk terhadap sumber informasi. Hal ini akan direpresentasikan oleh semakin besarnya proporsi penduduk yang bisa memanfaatkan media teknologi untuk komunikasi dan mengakses informasi.

Tabel 10.2. Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Seluler/Nirkabel dan Menggunakan Telepon Seluler serta Komputer Selama Bulan Terakhir menurut Wilayah/Jenis Kelamin/Usia di DIY, 2021-2024 (persen)

Wilayah/Jenis Kelamin/ Kelompok Usia	Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel				Memiliki Telepon Seluler/ Nirkabel				Menggunakan Komputer/ Laptop/Tablet				
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Wilayah	Perkotaan	85,3	80,6	84,8	-	73,9	73,8	75,3	-	24,4	21,5	22,3	-
	Perdesaan	75,9	70,6	75,6	-	58,2	60,4	59,5	-	8,00	10,5	10,6	-
	K+D	82,8	78,1	82,5	-	69,8	70,4	71,4	-	20,2	18,7	19,4	-
Jenis Kelamin	Laki-laki	85,2	80,4	84,3	85,6	73,1	73,2	73,6	74,7	20,8	18,5	19,6	19,9
	Perempuan	80,6	75,8	80,8	82,1	66,6	67,6	69,2	69,7	19,6	18,9	19,2	19,9
	L+P	82,8	78,1	82,5	83,8	69,8	70,4	71,4	72,2	20,2	18,7	19,4	19,9
Kelom- pok Usia	Usia 5-12	89,5	83,3	75,8	-	35,5	37,7	33,8	-	13,2	10,5	9,5	-
	Usia 13-15	99,3	98,3	97,1	-	90	91,9	92,2	-	26,6	27	40,0	-
	Usia 16-18	99,7	99,4	98,5	-	97,8	99,4	97,0	-	39,2	46,9	49,9	-
	Usia 19-24	99,2	98,2	98,7	-	98,2	97,3	97,4	-	53,2	46,1	49,4	-
	Usia 25-35	98,2	98,1	98,4	-	95,2	96,6	96,4	-	29,9	27,00	28,0	-
	Usia 36-64	79,7	80,4	82,7	-	69,7	71,8	73,7	-	12,1	12,6	11,0	-
	65+	35,9	35,3	39,1	-	21,1	21,7	23,3	-	0,8	1,1	1,0	-

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2020-2023, BPS DIY

Dalam era globalisasi, berbagai informasi yang ada di seluruh belahan dunia dapat diakses melalui berbagai media termasuk media elektronik. Seiring dengan kemajuan teknologi, maka rumah tangga tidak hanya menggunakan PC (*personal Computer*) di rumah tangga untuk mengakses informasi. Masyarakat sudah mulai beralih menggunakan media lain seperti telepon seluler, tablet, dan berbagai media lainnya untuk mengakses berbagai informasi dan pengetahuan maupun media sosial.

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2021-2024, proporsi penduduk DIY berusia di atas 5 tahun yang menggunakan telepon seluler (HP) terlihat semakin meningkat. Pada kondisi Maret 2024, proporsinya dari total penduduk usia 5 tahun ke atas mencapai 83,8 persen, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih tinggi proporsinya

dalam menggunakan HP. Begitu juga pada kelompok usia 16-35 tahun, yang mencapai 98-99 persen penduduk. Adapun penduduk yang tinggal di perkotaan juga lebih banyak yang menggunakan HP dibanding mereka yang tinggal di perdesaan.

Namun demikian, proporsi penduduk yang menggunakan tidak serta merta mencerminkan kepemilikan telepon seluler. Sebab, tidak semua penduduk berusia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler, menggunakan HP milik sendiri, ada yang menggunakan secara bersama dalam satu keluarga. Tercatat pada Maret 2024, persentase masyarakat yang memiliki telepon seluler hanya 72,2 persen. Tren menunjukkan perkembangan meningkat khususnya pada kelompok penduduk laki-laki. Di lain sisi, penggunaan komputer, baik PC, laptop, dan tablet terlihat relatif meningkat. Proporsinya yang berkisar di antara 20 persen menunjukkan bahwa ada

Tabel 10.3. Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir di DIY, 2021-2024 (Persen)

Wilayah/Jenis Kelamin/ Kelompok Usia	Mengakses Internet Dalam 3 Bulan Terakhir				
	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Wilayah	Perkotaan	78,8	79,4	82,2	-
	Perdesaan	60,3	63,7	68,0	-
	K+D	74	75,4	78,6	-
Jenis Kelamin	Laki-laki	76,8	77,9	80,7	82,4
	Perempuan	71,2	72,9	76,6	77,9
	L+P	74,0	75,4	78,6	80,1
Kelom- pok Usia	Usia 5-12	84,0	82,6	77,6	-
	Usia 13-15	99,7	98,7	98,3	-
	Usia 16-18	99,7	99,2	98,8	-
	Usia 19-24	98,8	98,4	99,01	-
	Usia 25-35	97,2	98,1	98,5	-
	Usia 36-64	66,2	71,3	76,6	-
	65+	13,1	16,0	24,2	-

Sumber: diolah dari Susenas Maret, 2021-2024, BPS DIY

kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih mengakses informasi dari telepon seluler (HP) dibandingkan melalui komputer. Pertimbangannya adalah HP lebih praktis, nyaman, ringan, dan *mobile* dibandingkan dengan komputer.

Dilihat dari aspek TIK lain, tidak semua penduduk yang memiliki dan menggunakan telepon seluler dan komputer juga menggunakannya untuk mengakses internet. Proporsi penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir pada kondisi Maret 2021 sudah mencapai 74,0 persen, meningkat menjadi 80,1 persen pada Maret 2024. Angka ini meningkat tajam dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, dan merupakan yang tertinggi. Artinya, populasi penduduk DIY yang mengakses internet semakin bertambah. Peningkatan ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi

informasi yang berjalan sangat pesat serta tingkat harga media (*gadget*) yang semakin terjangkau. Fakta ini juga menggambarkan tingkat melek teknologi dan informasi di DIY yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan. Penggunaan media gawai sudah bergeser menjadi kebutuhan sekunder, bukan lagi kebutuhan tersier.

Adapun perbandingan proporsi penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet antarwilayah masih cukup timpang. Penduduk di kawasan perkotaan lebih banyak yang mengakses internet dibandingkan penduduk perdesaan. Ketimpangannya masih di atas lima belas persen selama 2021-2023. Secara eksplisit, ketimpangan ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, tingkat kesejahteraan penduduk perkotaan lebih baik dari penduduk perdesaan. Kedua, adanya perbedaan pola dan gaya hidup penduduk antarwilayah. Ketiga, ketersediaan jaringan dan infrastruktur penunjang telekomunikasi belum merata antarwilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengakses internet dibandingkan perempuan. Proporsi penduduk laki-laki di DIY yang mengakses internet pada kondisi Maret 2024 mencapai 82,4 persen. Sementara, proporsi penduduk perempuan baru mencapai 77,9 persen.

Berdasarkan data terakhir, proporsi penduduk terbesar yang mengakses internet terdapat pada kelompok usia 13-15 tahun; 16-18 tahun; 19-24 tahun; dan 25-35 tahun. Proporsi keempat kelompok tersebut di atas 97 persen. Kelompok ini merepresentasikan penduduk pada usia muda (16-35 tahun) atau kaum milenial dan Gen Z. Profil mereka sebagian besar masih bersekolah pada jenjang sekolah

Tabel 10.4. Penduduk yang Mengakses Internet Selama Tiga Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di DIY (Persen), 2021-2024

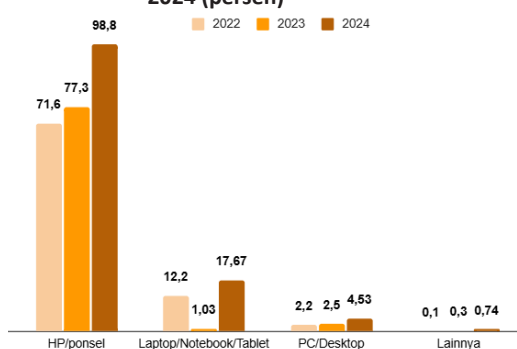
Kabupaten/ Kota	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kulon Progo	66,3	66,3	75,33	75,99
Bantul	75,1	75,1	78,76	80,32
Gunungkidul	57,5	57,5	65,36	65,81
Sleman	81,9	81,9	83,9	86,43
Yogyakarta	85,3	85,3	89,42	90,40
DIY	68,68	74,0	78,61	80,10

Sumber: diolah dari Susenas Maret 2021-2024, BPS DIY

menengah atas dan perguruan tinggi dan juga mencakup mereka yang sedang aktif sebagai angkatan kerja. Kelompok ini paling aktif dalam penggunaan media internet. Pada umumnya, mereka melakukan aktivitas mengakses internet untuk kebutuhan aktualisasi diri di media/jejaring sosial seperti Facebook, WA, Twitter, Instagram, BBM, dan lainnya; sarana mencari berita dan informasi terkait kesempatan kerja; mencari informasi mengenai tugas sekolah/kampus; serta aktivitas hiburan dan permainan.

Secara kewilayahan, proporsi terbesar penduduk yang mengakses internet sampai kondisi Maret 2024 masih terdapat di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Proporsi di kedua wilayah masing-masing sebesar 90,40 persen dan 86,43 persen dari total penduduk berusia 5 tahun ke atas. Besarnya populasi pengakses internet ini memiliki relasi positif dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Kedua wilayah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan tertinggi di DIY. Infrastruktur jaringan internet di kedua daerah juga lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Sementara, proporsi yang terendah masih terdapat di

Gambar 10.3. Persentase Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet menurut Jenis Media, 2022-2024 (persen)



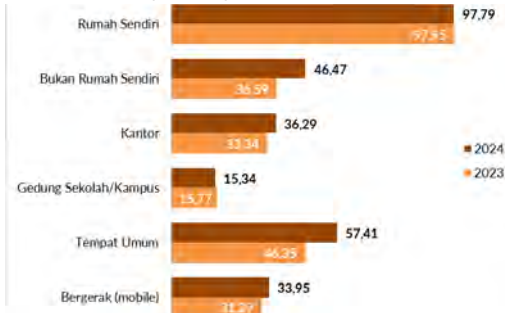
Sumber: diolah dari Susenas Maret 2022-2024, BPS DIY

Gunungkidul, yakni sebesar 65,81 persen. Adapun secara umum, proporsi penduduk yang mengakses internet di semua wilayah terlihat semakin meningkat.

Jenis media untuk mengakses internet bisa berupa *desktop* (PC), laptop, Tablet, telepon seluler (HP), maupun media lainnya. Sampai dengan Maret 2024, sebagian besar penduduk DIY mengakses internet menggunakan media telepon seluler atau *smartphone*. Dari total pengguna internet, sebanyak 98,8 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas mengakses internet menggunakan HP. Angka ini meningkat cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan jenis media yang lain seperti PC, laptop, notebook, tablet, dan lainnya cenderung juga mengalami kenaikan tetapi tidak drastis. Hal ini menggambarkan adanya perubahan pola dalam pemanfaatan media teknologi untuk mengakses internet. Penggunaan HP tidak lagi hanya untuk alat telepon atau SMS saja, tetapi sudah mulai berkembang untuk aktivitas-aktivitas yang melibatkan internet, seperti *browsing*, media sosial, dan hiburan.

Lokasi untuk mengakses internet bisa berada di berbagai tempat. Sebagian besar pengguna internet di wilayah DIY mengakses internet dari rumah sendiri.

Gambar 10.4. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tempat Mengakses Internet, 2023-2024 (Persen)

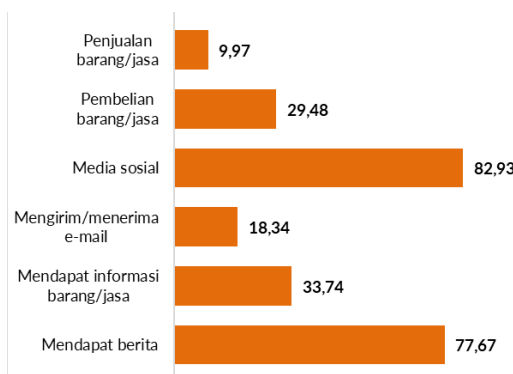


Sumber: diolah dari Susenas Maret 2023-2024, BPS DIY

Proporsinya mencapai 97,79 persen dari total pengguna internet pada kondisi Maret 2024. Proporsi tersebut sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Lokasi pilihan berikutnya adalah tempat umum, bukan rumah sendiri, kantor, dan gedung sekolah/kampus. Adapun proporsi penduduk yang mengakses internet secara bergerak atau *mobile* mencapai 33,95 persen.

Ada beberapa tujuan penduduk yang mengakses internet di DIY. Berdasarkan jenis konten yang diakses, sebagian besar penduduk mengakses internet untuk tujuan media atau jejaring sosial, yakni dengan proporsi mencapai 82,93 persen

Gambar 10.5. Proporsi Penduduk DIY Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Tujuan Mengakses Internet, 2024 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2024, BPS DIY

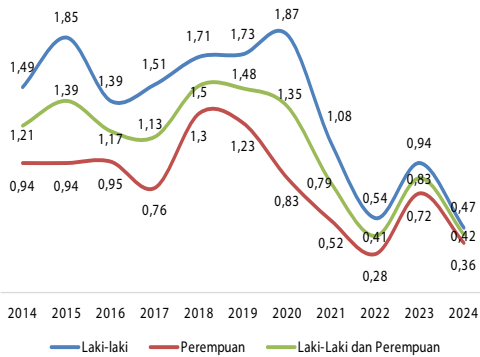
pada kondisi Maret 2024. Disusul untuk tujuan mendapatkan berita/informasi dengan proporsi sebesar 77,67 persen. Sementara itu, penduduk yang mengakses internet untuk tujuan yang lainnya, seperti mendapatkan informasi untuk barang/jasa, mengirim/menerima e-mail, serta pembelian dan penjualan barang dan jasa memiliki proporsi yang bervariasi di sekitar 30 persen dari total pengguna internet.

Tindak Kejahatan

Kesejahteraan penduduk di suatu wilayah juga bisa digambarkan oleh indikator tingkat keamanan maupun tindak kejahatan yang terjadi. Wilayah yang kurang aman dan rawan kejahatan akan menimbulkan keresahan, sehingga masyarakat juga merasa tidak nyaman untuk tinggal di sana. Hal ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut menurun. Semakin sejahtera masyarakat akan diikuti oleh menurunnya kasus kejahatan. Peran pemerintah dalam menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban wilayah sangat penting. Namun, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sendiri juga sangat dibutuhkan.

Proporsi penduduk DIY yang menjadi korban kejahatan selama referensi pencacahan Maret 2014-2024 bervariasi antara 1-2 persen. Proporsi dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami dinamika dari menurun drastis saat tahun 2021-2022 setelah mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, sebelum akhirnya menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,42 persen secara total. Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan selama 1 Januari sampai 31 Desember 2023 berdasarkan jenis kejahatan yang ditanyakan mencakup pencurian, pencurian dengan

Gambar 10.6. Proporsi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan menurut Jenis Kelamin di DIY, 2014-2024 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2014-2024, BPS DIY

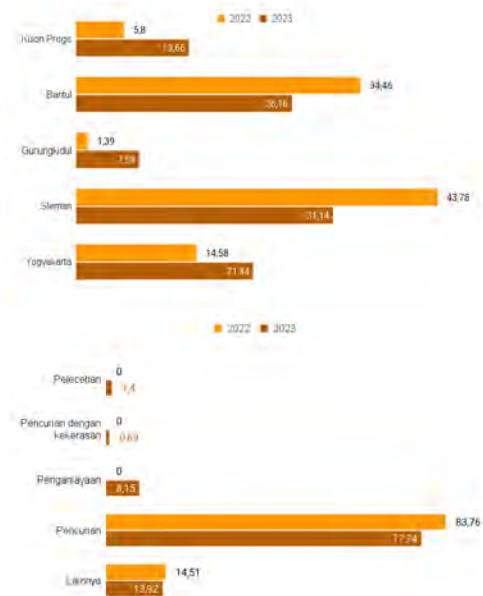
kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan yang selalu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selama 1 Januari-31 Desember 2023, proporsi penduduk laki-laki yang menjadi korban kejahatan mencapai 0,47 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, proporsi perempuan yang menjadi korban kejahatan adalah sebesar 0,36 persen dan juga menurun dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan wilayah, penduduk perkotaan lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan penduduk perdesaan. Sementara itu, penduduk di Kota Yogyakarta dan Sleman lebih rentan menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan tiga kabupaten lainnya. Secara eksplisit, fakta ini menyiratkan bahwa tidak ada korelasi positif antara tingkat kesejahteraan dengan jumlah kasus kejahatan. Kasus kejahatan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial lain, seperti kenakalan remaja, ketimpangan pendapatan, tingkat keramaian,

heterogenitas, kepadatan penduduk, dan faktor lainnya.

Jenis kejahatan yang paling banyak dialami oleh penduduk DIY selama periode 1 Januari-31 Desember 2022 adalah kejahatan pencurian. Proporsinya mencapai 77,74 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sebesar 83,76 persen. Berdasarkan wilayah, kasus kejadian kejahatan paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Sleman sebesar 31,4 persen, lalu Bantul sebesar 26,16 persen, dan Kota Yogyakarta sebesar 21,44 persen. Hanya saja, di Bantul dan Sleman menunjukkan informasi yang menggembirakan dengan proporsi yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun, sebagian besar kejadian kejahatan terjadi di dalam rumah tempat tinggal, kecuali kejadian pelecehan seksual. Kejahatan pelecehan seksual lebih banyak terjadi di luar rumah tempat tinggal.

Gambar 10.7. Sebaran Kasus Kejahatan menurut Jenis dan Wilayah di DIY, 2022-2023 (Persen)



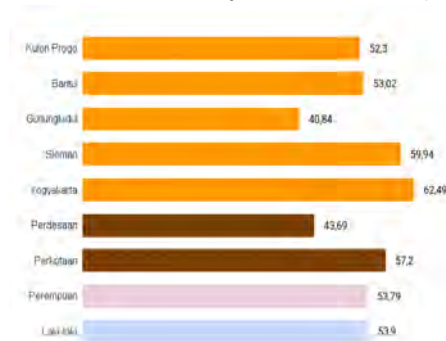
Sumber: diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

Kepemilikan Rekening Tabungan

Ukuran kesejahteraan memiliki relasi yang kuat dengan aktivitas menabung. Semakin sejahtera seseorang, maka akan semakin besar kesempatan dan peluang untuk menabung. Semakin sejahtera juga akan ditandai oleh jumlah tabungan yang semakin meningkat. Jumlah tabungan menjadi hak privasi seseorang dan sangat sulit untuk ditanyakan dalam Susenas. Satu-satunya indikator terkait kemampuan menabung yang dapat dihasilkan dari Susenas adalah kepemilikan rekening tabungan di lembaga perbankan atau koperasi.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2023, proporsi penduduk berusia 5 tahun ke atas di DIY yang memiliki rekening tabungan di bank atau koperasi mencapai 53,84 persen. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 52,66 persen. Kepemilikan rekening tabungan penduduk laki-laki relatif berimbang dibanding penduduk perempuan. Begitu juga, kepemilikan tabungan penduduk di wilayah perkotaan mencapai 57,24 persen jauh lebih tinggi dari perdesaan yang sebesar 43,69 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kemudahan untuk mengakses infrastruktur perbankan di perkotaan yang relatif lebih mudah dan variasi serta budaya konsumsi dan investasi di pada lembaga keuangan dari masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat perdesaan memiliki tabungan dalam bentuk aset fisik seperti sawah dan ternak. Secara wilayah, kepemilikan rekening tabungan penduduk di wilayah Kota Yogyakarta tercatat paling tinggi, yakni 62,49 persen. Sementara, kepemilikan terendah terdapat di Gunungkidul sebesar 40,84 persen.

Gambar 10.8. Proporsi Penduduk DIY Usia 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Rekening Bank atau Koperasi, Maret 2023 (Persen)



Sumber: diolah dari Susenas Maret 2023, BPS DIY

Perkembangan Jumlah Jemaah Haji

Pembangunan kehidupan beragama bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan, ketaqwaan, dan kerukunan. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan pelayanan jemaah haji. Perkembangan jumlah jemaah haji merepresentasikan meningkatnya aspek kesejahteraan, karena haji menjadi salah satu bentuk ibadah yang mensyaratkan kemampuan secara materi atau uang.

Perkembangan jumlah jemaah haji dari DIY selama sebelas tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Jumlah jemaah haji pada tahun 2012 tercatat sebanyak 3.093 orang terdiri dari 1.465 laki-laki dan 1.628 perempuan. Jumlah ini semakin menurun hingga 2.463 orang di tahun 2016 atau turun 5,5 persen setiap tahun selama periode 2012-2016. Penurunan jumlah ini dipengaruhi oleh kebijakan penyesuaian kuota jemaah haji akibat perluasan area di Masjidil Haram di Makkah.

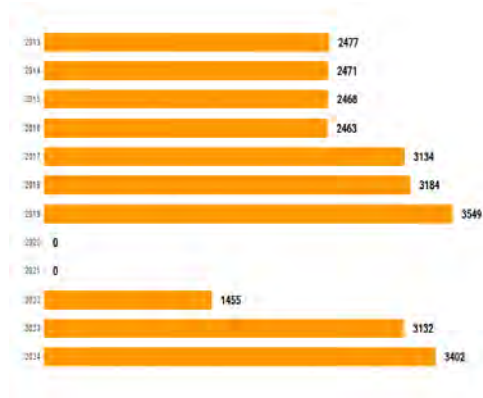
Namun demikian, selama tahun 2017-2019 jumlah jemaah haji kembali meningkat menjadi 3.549 jemaah akibat penambahan

jumlah kuota. Meskipun dari sisi kuota mengalami sedikit penurunan selama 2013-2016, kesejahteraan penduduk DIY secara umum semakin meningkat. Hal ini ditandai oleh fenomena meningkatnya daftar tunggu keberangkatan haji yang sudah melebihi 30 tahun. Artinya, minat umat Islam di DIY untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini semakin meningkat akibat perbaikan kesejahteraan.

Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi sejak pertengahan Maret 2020 berpengaruh luas terhadap mobilitas penduduk, termasuk ibadah haji. Selama masa pandemi, pemerintah Saudi Arabia tidak membuka kuota untuk pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020-2021. Artinya, tidak ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia, termasuk jemaah dari DIY. Baru pada tahun 2022, jemaah haji diberangkatkan kembali dengan jumlah jemaah haji dari DIY mencapai 1.455 orang.

Setelah itu, jumlah pemberangkatan jemaah haji dari DIY terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring ditambahnya kuota haji untuk jemaah asal Indonesia. Tercatat sebanyak 3.132 orang dan 3.402 orang jemaah haji dari DIY diberangkatkan pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 10.9. Jumlah Jemaah Haji Asal DIY, 2012-2024 (orang)

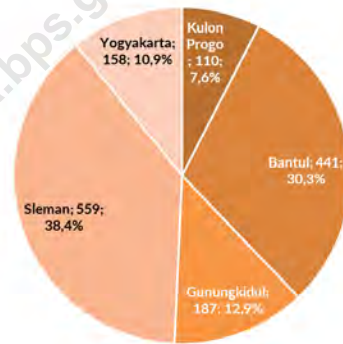


Sumber: Kanwil Kemenag DIY, 2024

Berdasarkan wilayah asal, jemaah haji DIY pada tahun 2022 didominasi oleh jemaah dari Kabupaten Sleman dan Bantul. Proporsi jemaah haji dari kedua kabupaten tersebut masing-masing mencapai 38,4 persen dan 30,3 persen.

Sementara, jemaah haji asal Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul tercatat memiliki proporsi yang terendah. Gambaran ini cukup selaras dengan tingkat kesejahteraan penduduk dari aspek yang lainnya.

Gambar10.10. Sebaran Jemaah Haji DIY menurut Kabupaten/Kota Asal, 2022 (Persen)



Sumber: Kanwil Kemenag DIY, 2023

Bab **XI**



Penutup

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Capaian berbagai indikator yang menggambarkan aspek kesejahteraan rakyat di DIY berada pada kondisi yang baik. Sebagian besar angkanya berada di atas level nasional. Perkembangan indikator dalam beberapa tahun terakhir juga semakin meningkat. Secara umum, fakta ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk DIY.

Ditinjau menurut tipe wilayah, terdapat kecenderungan bahwa posisi capaian berbagai indikator kesejahteraan di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Artinya, kualitas kesejahteraan penduduk di wilayah perkotaan masih lebih baik dari penduduk perdesaan.

Jika ditinjau menurut gender, terdapat kecenderungan capaian beberapa indikator yang terkait dengan angkatan kerja, pendidikan, dan kesehatan menunjukkan bahwa penduduk laki-laki memiliki capaian yang lebih baik dari perempuan. Meskipun demikian, dari sisi partisipasi sekolah sudah menuju ke arah kesetaraan.

Sedangkan jika ditinjau menurut kabupaten/kota, kualitas kesejahteraan penduduk yang lebih baik dicapai oleh Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Sementara, Kabupaten Gunungkidul masih berada pada posisi terbawah.

Indikator kesejahteraan rakyat yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, sampai dengan kondisi Maret 2024 persentase penduduk miskin DIY masih berada pada level dua digit. Demikian juga ketimpangan pendapatan antarpenduduk, pada kondisi Maret 2024 Gini Ratio menunjukkan angka yang masih masuk pada kategori ketimpangan sedang/moderat.

Saran

Dengan mencermati perkembangan indikator kesejahteraan rakyat DIY, maka dapat disampaikan masukan sebagai berikut:

Capaian berbagai indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan kondisi yang terus membaik bahkan sebagian besar angkanya berada di atas level nasional. Namun demikian, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan angkanya masih belum begitu menggembirakan. Perhatian perlu lebih difokuskan pada upaya-upaya percepatan pengurangan tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan antarpenduduk.

1. Upaya-upaya terkait dengan peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya untuk menjaga keberlanjutan pencapaian indikator kesejahteraan yang sudah baik.
2. Pembangunan maupun investasi perlu diarahkan pada wilayah perdesaan untuk bisa menggerakkan ekonomi pedesaan, menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antara perdesaan dan perkotaan. Dari sisi spasial, pembangunan dan investasi perlu diarahkan ke Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo karena dua daerah ini perkembangan indikator kesejahteraannya relatif tertinggal dibanding Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Peran perempuan perlu dilibatkan dalam pembangunan, peningkatan kapasitas dan akses perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi perlu diperluas untuk mengurangi kesenjangan capaian indeks kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan.
3. Perlu membangun database penduduk berdasar kondisi sosial ekonominya dan diperbaiki secara periodik sebagai dasar untuk melakukan intervensi terhadap upaya-upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, stunting dan permasalahan sosial ekonomi lainnya.
4. Mengingat anggaran pemerintah yang terbatas, intervensi upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan perlu difokuskan pada penduduk 40 persen penerima pendapatan terendah. Keberhasilan pada peningkatan kesejahteraan kelompok penduduk ini akan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan antarpenduduk.
5. Perlu diupayakan agar ekonomi DIY bisa tumbuh lebih cepat lagi, karena salah satu prasyarat pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai sehingga tersedia kapasitas untuk melakukan upaya-upaya pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2024*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2023*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2024*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. *Statistik Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2024*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024. *Statistik Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta 2024*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2024 *Statistik Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2024*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2023. *Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPS Provinsi DIY.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Website: www.yogyakarta.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik dan UNFPA. 2014. *Proyeksi Penduduk Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2010-2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- <http://duaanak.com/artikel/kependudukan-dalam-presfektif-pembangunan-ekonomi-guna-pembangunan-nasional/>
- Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,2015, Jakarta “ *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku I Agenda Pembangunan Nasional*”, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2007. *Makroekonomi*, (Edisi 6). Jakarta: Penerbit Erlangga
- Todaro, Michael P. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1 (Edisi 8). Jakarta: Erlangga.



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://yogyakarta.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Jl. Brawijaya, Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183 -

Telp. : (0274) 4342234. Fax. : (0274) 4342230 - E-mail : bps3400@bps.go.id

Homepage : <http://yogyakarta.bps.go.id>